TESIS

KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT AHMAD SYAFI'I MA'ARIF RELEVANSI TERHADAP KEBANGSAAN

Oleh:

Ilham Sahruji

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. Nunu Burhanuddin, Lc, M.Ag

PROGRAM PASCASARJANA (S2)

PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITASA ISLAM NEGERI (UIN) BUKITTINGGI

2024 M/1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis ini dengan judul "**Kebebasan Beragama Menurut Ahmad Syafi'i Maarif Relevansi terhadap Kebangsaan**". Disusun oleh **Ilham Sahruji**, NIM **40121003** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah* pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 15 Februari 2024

Pembimbing

Prof. Dr. Nunu Burhanuddin, Lc.M.Ag
NIP. 197305102000121002

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA POKOK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Sahruji

NIM. : 40121003

Prodi. : Aqidah dan Filsafat Islam (S2)

Dengan ini menyatakan bahwa, data pokok saya yang ada di e-campus berupa Nama, Tempat dan Tanggal Lahir serta Nomor NIK saya sudah benar dan sesuai dengan dokumen ijazah terakhir KK dan KTP yang saya milliki. Saya akan menanggung resiko/sanksi yang diberikan oleh UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi terhadap penulisan ijazah S2 saya jika data yang saya isikan tersebut tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari manapun.

Bukittinggi, 15 Februari 2024

Saya yang menyatakan



(Ilham Sahruji)

Abstrak

Tesis ini berjudul **"Kebebasan Beragama Menurut Ahmad Syafii Maarif Relevansinya Terhadap Kebangsaan**" yang disusun oleh Ilham Sahruji 4012003 program studi Aqidah dan Filsafat Islam (UINSMDD) Bukittinggi 2024.

Latar belakang dari tesis ini ialah Bangsa Indonesia perlu beragama secara damai dalam fakta keragaman, karena itu diperlukan sistem untuk memecahkan masalah tanpa kekerasan. Bangsa Indonesia juga memerlukan sikap yang positif terhadap perbedaan agama. Sebaliknya, bangsa ini juga sebaiknya menghindarkan diri dari pemikiran dan usaha-usaha menghilangkan keragaman agama, ruang lingkup kebebasan beragama Ahmad Sayfi'i Ma'arif.

Metode penelitian dalam tesis ini berdasarkan kepada suatu penelitian literer (*literature review*) dan studi kepustakaan (*library study*). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data dianalisis menggunakan metode diskripsi (*deskriptive method*) dan metode analisis isi (*content analysis*). Peneliti mencoba menelusuri, menganalisis, dan menginterpretasi sesuai data-data yang didapatkan tentang jejak-jejak pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif.

Temuan penelitian ini adalah Pandangan progresif Ahmad Syafi'i Ma'arif terhadap Islam dan masyarakat menekankan pentingnya kebebasan beragama sebagai hak fundamental setiap individu, yang sesuai dengan prinsip-prinsip toleransi dan keadilan dalam Islam. Meskipun demikian, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan mempertimbangkan situasi sosial dan hukum. Di Indonesia, pandangan tersebut sangat relevan mengingat keragaman agama dan budaya yang ada di negara ini. Pendekatan inklusif terhadap kebebasan beragama diperlukan untuk memastikan perdamaian dan harmoni antar umat beragama, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang kebebasan beragama penting dalam konteks Indonesia, sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D Kegunaan Penelitian..... 10

E. Sistematika Penulisan..... 11

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Kebebasan Beragama..... 12

B. Pokok-pokok Kebebasan Beragama 17

C. Kebangsaan Perspektif Tokoh-tokoh Islam Indonesia 26

D. Kajian Terdahulu 58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 61

B. Sumber Penelitian 61

C. Metode Pengumpulan Data 62

D. Metode Analisis Data..... 62

BAB IV PEMBAHASAN

A.Biografi Ahmad Syafi'i Ma'arif..... 64

B Kebebasan Beragama Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif. 77

1. Pengertian Kebebasan Beragama Menurut Ahmad Syafii Maarif. 77

2. Landasan Filosofi Kebebasan Beragama Menurut Ahmad Syafii Maarif. 82

3. Prinsip-prinsip Kebebasan Beragama Menurut Ahmad Syafii Maarif. 86

4. Pikiran-pikiran Pokok Kebebasan Beragama Menurut Ahmad Syafii Maarif. .. 99

C. Relevansi Kebebasan Beragama dengan Prinsip Kebangsaan Indonesia 126

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan..... 155

B. Saran..... 157

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki banyak kelompok yang berbeda-beda berdasarkan ideologi, golongan, ras, suku, agama, dan demografi. Dalam hal ini, ada suatu titik yang diperlukan bagi berbagai kelompok untuk menyatukan perbedaan dan kepentingan mereka, sehingga setiap kelompok memiliki hak yang sama.[1] Budaya yang beragam termasuk suatu fenomena natural yang disebabkan saling berkaitannya budaya pikiran dan gagasan manusia sehingga melahirkan adat-istiadat dan tradisi yang senantiasa berkembang. Dengan saling berkaitannya berbagai kelompok maupun individu yang melibatkan budaya mempunyai pola hidup yang distinct menandakan sebuah hubungan sosial yang bersifat niscaya. Elemen dasar dari keragaman di sini mencangkup keragaman budaya, etnis, negara, bangsa hingga agama yang terus menjalin hubungan dalam sebuah kelompok, terkhusus di wilayah Indonesia. Keragaman ini berpotensi menjadi konflik sosial di Indonesia, meskipun pendiri bangsa telah berupaya mencegah perpecahan dan konflik melalui slogan bhineka tunggal ika.

Tidak jarang, konflik antara orang-orang di Indonesia timbul karena perbedaan agama, ras, suku, dan nilai-nilai kehidupan yang berbeda. Kesalahpahaman seringkali menyebabkan konflik di masyarakat berakhir dengan penghakiman dan kekerasan. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya konflik berubah menjadi kekerasan dalam masyarakat. Lalu terjadi kekerasan, yang menyebabkan pertumpahan darah, dan berakhir dengan bencana kemanusiaan yang merusak berbagai aspek kehidupan dan merusak struktur sosial.[2] Apalagi jika seseorang atau kelompok menggunakan agama sebagai alasan untuk melakukan

[1] Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis: Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur* (Galang Press, 2002).

[2] Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia," *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

tindakan tegas dan penghakiman terhadap kelompok tertentu yang memiliki preferensi yang sangat berbeda dengan mayoritas.

Ini adalah upaya untuk memberi tahu sebuah kelompok apa arti kebebasan beragama. Namun, ini bukan tugas yang mudah; kesadaran kolektif bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk muncul di masyarakat. Sebagai cara untuk mempertahankan pancasila dan kebhinekaan bangsa Indonesia, kebebasan beragama merupakan tantangan tersendiri. Indonesia, sebuah negara dengan budaya yang beragam dan sebagian besar penduduknya beragama Islam, memiliki catatan merah tentang masalah moderasi, ekstremisme, dan konflik keagamaan yang menghancurkan kesatuan, persatuan, dan keharmonisan bangsa. Beberapa contohnya termasuk peristiwa bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober 2002 dan bom Bali 2 pada tanggal 1 Oktober 2005, serta konflik agama berkepanjangan di Poso pada 25 Desember 1998–20 Desember 2001 dan peristiwa lainnya.[3] Pada bulan Oktober 2004, sebuah sekolah Katolik di Ciledug dibarikade oleh sekelompok orang Islam dengan alasan bahwa sekolah itu telah difungsikan secara ilegal menjadi tempat ibadah. Dengan alasan yang sama pula, pada September 2005, 23 buah gereja telah ditutup oleh sekelompok kaum Muslim di Jawa Barat.

Data riset longitudinal Setara Institute menunjukkan potret minus kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan.[4] Data tahun 2021 SETARA Institute menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020, terdapat 171 peristiwa dengan 318 tindakan pelanggaran. Dari data KBB tahun 2021, diketahui bahwa tiga isu pelanggaran KBB yang dominan dilakukan oleh aktor negara adalah: diskriminasi (25 kasus), kebijakan diskriminatif (18 kasus), pentersangkaan penodaan agama (8 kasus). Sementara, enam isu pelanggaran KBB yang dominan dilakukan oleh aktor non-negara adalah intoleransi (62 tindakan), ujaran kebencian (27 kasus), penolakan pendirian tempat ibadah (20 kasus), pelaporan penodaan agama (15

[3] Igneus Alganih, "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)," *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2016).

[4] Laporan lengkap dimaksud, lihat Buntara, Syera Anggreini dan Hasani, Ismail (2022). Mengatasi Intoleransi, *Merangkul Kebereagaman: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2021*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta

kasus), penolakan kegiatan (13 kasus), penyerangan (12 kasus), perusakan tempat ibadah (10 kasus).

Di tahun 2021, pelanggaran KBB oleh aktor negara paling banyak dilakukan oleh kepolisian (16 tindakan) dan pemerintah daerah (15 tindakan). Pelanggaran KBB oleh aktor non-negara paling banyak dilakukan oleh kelompok warga (57 tindakan), individu (44 tindakan), dan organisasi masyarakat/ormas (22 tindakan). Adapun ormas yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB adalah MUI dengan 8 tindakan pelanggaran, tiga di antaranya adalah penyesatan, yaitu menyatakan suatu aliran sebagai sesat dan menyesatkan, yang berimplikasi pada hilangnya hak untuk menganut kepercayaan sesuai nurani karena diberikan pembinaan maupun hilangnya hak menyebarkan suatu ajaran yang telah dianggap sesat oleh MUI.

Ditinjau dari korban, pada tahun 2021, umat Kristen Protestan paling banyak menjadi korban pelanggaran KBB dengan 26 kasus. 20 kasus di antaranya adalah seputar gangguan rumah ibadah yang mencakup penolakan pendirian rumah ibadah, gangguan saat ibadah, perusakan rumah ibadah, dan penyerangan terhadap orang yang terjadi di tempat ibadah/rumah ibadah yang dilakukan baik oleh aktor non-negara dan/atau negara. Berkaitan dengan gangguan rumah ibadah, gereja secara konsisten menempati posisi pertama sebagai rumah ibadah yang mengalami gangguan paling banyak setiap tahunnya sejak 2007, dengan pengecualian di tahun 2008 dan 2016. Pada tahun 2021, terdapat 24 gereja (Protestan dan Katolik) yang mengalami gangguan. Masjid menempati posisi kedua sebagai rumah ibadah yang mengalami gangguan terbanyak dengan 7 gangguan di tahun 2021.[5]

Berangkat dari catatan buruk kebebasan beragama di Indonesia di atas, dan ketidakpastian dasar negara antara sekular dan agama, maka Mujiburrahman mempertanyakan bagaimanakah kiranya bangsa Indonesia dapat merumuskan

[5] Selalu.id, "Begini Lika-Liku Penolakan Gereja Lakarsantri Surabaya," 28 Desember 2021, https://selalu.id/news-816-begini-likaliku-penolakan-gereja-lakarsantri-surabaya, diakses pada 25 Januari 2024, pk.15.33 WIB; Lensa Indonesia, "Anggota DPRD Surabaya sesalkan adanya penolakan pembangunan Gereja di Lakarsantri," 26 Desember 2021, https://www.lensaindonesia.com/2021/12/26/anggota-dprd-surabaya-sesalkan adanya-penolakan-pembangunan-gereja-di-lakarsantri.html, diakses pada 25 Januari 2024, pk.16.42 WIB

kebebasan beragama berdasarkan kesepakatan bersama yang samar-samar mengenai hakikat negara Indonesia yang bukan negara agama dan bukan pula negara sekular?[6] Pertanyaan ini menjadi penting karena hakikat negara Indonesia memang mengalami semacam ambiguitas, atau "bukan-bukan" (bukan sekular dan bukan agama). Kasus-kasus ini merupakan kasus intoleransi dan ekstremisme yang perlu dihindari oleh bangsa Indonesia. Kasus ini merupakan bentuk dari konflik kelompok agama yang berbeda.

Persoalan ambiguitas ini semakin merepotkan manakala dibenturkan dengan realitas keragaman (pluralitas) masyarakat, terutama keragaman agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Selain enam agama (Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu) yang diakui secara resmi oleh negara, Indonesia kaya akan agama atau kepercayaan lokal (*indigenous religion*) seperti komunitas Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Komunitas Tolotang di Sulawesi Selatan, komunitas Kaharingan di Kalimantan dan lain sebagainya – serta aliran-aliran yang ada dalam agama resmi tersebut. Menurut Amin Abdullah, realitas pluralitas agama yang belum berlanjut pada pluralisme agama disebabkan oleh hegemoni kepentingan kelompok tertentu. Kepentingan itu juga sering dijustifikasi dengan landasan teks keagamaan.[7]

Bangsa Indonesia perlu beragama secara damai dalam fakta keragaman, karena itu diperlukan sistem untuk memecahkan masalah tanpa kekerasan. Bangsa Indonesia juga memerlukan sikap yang positif terhadap perbedaan agama (sikap yang terbuka, toleran, siap berdialog dengan kelompok yang berbeda). Sebaliknya, bangsa ini juga sebaiknya menghindarkan diri dari pemikiran dan usaha-usaha menghilangkan keragaman agama. Termasuk di dalamnya tidak mengakui adanya keragaman, menginginkan keseragaman, memaksakan nilai agama satu kelompok atas kelompok yang lain, memakai kekuasaan untuk menindas agama yang berbeda, dan memberikan cap yang buruk pada agama dan pemeluknya yang

[6] Abd Hakim, Yudi Latif, and M Dawam Rahardjo, "Bayang-Bayang Fanatisisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid," *(No Title)*, 2007.

[7] Ahmad Fuad, "Islam Mazhab Kritis, Menggagas Keberagaman Liberatif" (Jakarta: Buku Kompas, 2004).

dianggap berbeda. Bila sistem ini tidak tercapai, maka dapat dipastikan berpotensi menimbulkan benturan (*clash*) antar budaya dan agama.[8]

Sayangnya, dikarenakan klaim kebenaran (*truth claim*) agama atau kepercayaan masing-masing,[9] maka usaha-usaha ke arah toleransi dan dialog terbuka antar agama ini tidak selalu mudah. Selain itu, kompleksitas permasalahan di Indonesia juga menjadikan kesan tumpang-tindihnya problem sosial. Pluralitas kompleks di Indonesia juga menjadikan tidak mudahnya menggagas toleransi dan dialog terbuka di antara masyarakat.

Untuk hidup beragama dalam kemajemukan agama dan ekspresi atasnya, tampaknya dibutuhkan konsep kebebasan beragama. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, kesadaran batin dan agama; dalam hal ini ternasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri. Tak seorang pun dapat dikenakan paksaan sehingga mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau kepercayaan pilihannya.[10]

Kenyataannya, pelanggaran kebebasan beragama tidak hanya berlangsung secara horizontal antar masyarakat**,**[11] akan tetapi tampaknya justru negaralah yang secara langsung atau tidak langsung menjadi penyebab atau bahkan aktor pelanggaran kebebasan beragama. Contoh kasus pelanggaran kebebasan beragama yang hingga kini masih terjadi di Indonesia ialah klaim agama asli dan agama sempalan yang dirasakan sangat problematik dalam kehidupan berbangsa dan

[8] Samuel P Huntington, "Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?," *Dalam Jurnal Ulumul Qur'an*, no. 5 (1996).

[9] Fuad, "Islam Mazhab Kritis, Menggagas Keberagaman Liberatif."

[10] Rumusan kebebasan beragama dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen antara lain UUD 1945 Pasal 29 ayat (2), Deklarasi Universal HAM PBB Pasal 18, Deklarasi PBB tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) Pasal 18. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 22, dan UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan KIHSP.

[11] Salah satu contoh kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia yakni kasus penutupan gereja tahun 2005 di mana SKB Menteri Agama K.H. Achmad Dahlan dan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud pada tahun 1969 dianggap sumber kericuhan, lihat pembahasannya dalam "Sebatang Salib yang Dikunci," Tempo, 11 September 2005, h. 26-33.

bernegara. Pemerintah selalu menuding agama atau kepecayaan lokal sebagai agama sempalan yang harus kembali ke agama induknya (agama-agama resmi yang diakui negara). Padahal, menurut para penganut agama lokal tersebut justru agama merekalah yang seharusnya disebut sebagai agama asli atau agama induk. Karena justru agama-agama besar: Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, yang merupakan agama impor.[12] Pelanggaran ini selanjutnya berujung pada pelanggaran hak-hak sipil sebagian masyarakat. Dalam hal ini, ingin ditekankan bahwa negara sebetulnya memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin berlangsungnya kebebasan beragama.

Selain daripada itu, pemahaman dan sikap eksklusif dalam beragama adalah faktor lain yang dipandang mengganggu kebebasan beragama. Beberapa padanan istilah terkait dengan pemahaman dan sikap eksklusif dalam beragama, antara lain Islam radikal,[13] Islam fundamentalis, Islam militan, Islam ekstrem sampai Islam skripturalis. Ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia harus diubah. Oleh karena itu, kebebasan beragama diangkat oleh banyak tokoh agama Indonesia yang profilik, seperti Ahmad Syafi'i Ma'rif.

Syafii Maarif memandang bahwa Islam adalah agama yang perannya harus dirasakan oleh semua orang (*rahmatan li al-'alamīn*).[14] Karena itu, Islam harus mampu menyentuh semua persoalan kemanusiaan secara arif dan bijaksana.[15] Hal ini berarti bahwa Islam harus melahirkan kedamaian tidak hanya untuk umat Islam tapi juga non Muslim.[16] Tindakan peyoratif dan diskriminatif yang ditujukan

---

[12] Hakim, Latif, and Rahardjo, "Bayang-Bayang Fanatisisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid."

[13] Khamami Zada and Islam Radikal, "Pergulatan Ormas Ormas Garis Keras Di Indonesia," *Bandung: Mizan*, 2002.

[14] A S Maarif, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (books.google.com, 2009), https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=6NXy9gvG4esC%5C&oi=fnd%5C&pg=PA7%5C&dq=%22ahmad+syafii+maarif%22%5C&ots=AYiIizmsrd%5C&sig=FBnZOFgmPbcSlQGctWKUFCcF-Jw.

[15] A S Maarif, *Tuhan Menyapa Kita* (books.google.com, 2006), https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=3T32DwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA87%5C&dq=%22ahmad+syafii+maarif%22%5C&ots=IC3VZjcsUp%5C&sig=TowgVTvUJFPqJGdpbjwO_2q6LDg.

[16] Maarif, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*.

kepada penganut agama lain bukan saja bertentangan dengan sifat dasar Islam, tapi juga turut mencederai cita-cita damai yang selalu dipromosikannya. Syafii Maarif menegaskan bahwa setiap orang, apapun agamanya, harus diperlakukan secara layak dan dihargai sebagai manusia.[17]

Dalam pandangan Syafii Maarif, kehadiran agama-agama tidak boleh dijadikan sebagai sumber masalah tetapi sebagai pemberi solusi atas masalah-masalah sosial yang muncul.[18] Para pemuka agama harus duduk dalam satu meja membicarakan berbagai agenda kemanusiaan yang sedang dihadapi. Tujuannya untuk mencari jalan keluar dari berbagai agenda itu. Jalan keluar merupakan hal yang harus dibayar mahal dan sulit dirumuskan jika masing-masing penganut agama tidak memiliki sikap positif dalam memandang umat beragama lain. Untuk menggapai harmoni masyarakat ini Syafii Maarif juga menggagas perlunya dialog komunitas agama dengan komunitas non agama.[19]

Bagi Syafii Maarif, setiap penganut agama harus bersikap terbuka dan toleran.[20] Kedua sikap itu dibutuhkan dalam menumbuhkembangkan kedamaian beragama. Untuk menggapai harapan mulia itu Syafii Maarif menyarankan suasana bernegara yang demokratis yang dibangun di atas landasan moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Golongan mayoritas dan golongan minoritas harus mendapatkan tempat secara proporsional dalam semua kegiatan bangsa.[21] Menurutnya, sikap tertutup, intoleran, penuh rasa curiga hanya akan bermuara pada kegagalan.[22]

---

[17] Ahmad Syafii Maarif, *Tuhan Menyapa Kita* (IRCISOD, 2020).

[18] A S Maarif, *Mencari Autensitas Dalam Dinamika Zaman* (books.google.com, 2019), https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=c9SuDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA55%5C&dq=%22ahmad+syafii+maarif%22%5C&ots=i8jCnYypki%5C&sig=1ZSCzXOxDw1aIGA1vTrop8UnF9U.

[19] Cebu Declaration, "Cebu Dialogue on Regional Interfaith Cooperation for Peace," *Development and Human Dignity, Cebu, Philippines* 16 (2006).

[20] A S Maarif, *Membumikan Islam* (books.google.com, 2019), https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=LeivDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA191%5C&dq=%22ahmad+syafii+maarif%22%5C&ots=H61WOXJlOt%5C&sig=RNz2jxzYw19_zcCaXuUuHYKNLV0.

[21] Ahmad Syafii Maarif, *Meluruskan Makna Jihad: Cerdas Beragama Ikhlas Beramal* (Center for Moderate Muslim, 2005).

[22] Hery Sucipto and Nadjamuddin Ramly, *Tajdid Muhammadiyah: Dari Ahmad Dahlan Hingga A. Syafii Maarif* (Grafindo Khazanah Ilmu, 2005).

Menurut Syafii Maarif, kesadaran tentang arti pentingnya kehadiran agama-agama lain akan mengantarkan seseorang bersikap terbuka terhadap beragam kebenaran yang bisa datang dari mana saja. Sikap itu akan melahirkan pandangan yang positif terhadap eksistensi umat beragama lain. Sebaliknya, jika pandangan seseorang terhadap sebuah agama dibalut dengan prasangka dan dijadikan rahim permusuhan, maka agama akan melahirkan nestapa bagi para penganutnya. Dalam konteks inilah agama ibarat sosok tertuduh yang membidani lahirnya berbagai kekacauan sosial.[23] Karena itu A.N. Wilson menyatakan bahwa tidak ada kekacauan di masyarakat di mana agama tidak memberikan peran di dalamnya. Agama, menurutnya, harus ikut bertanggung jawab atas berbagai situasi itu. Dorongan yang diberikan agama amat besar dalam kaitannya dengan penganiayaan kepada orang lain.[24]

Mencermati kenyataan tersebut, Syafii Maarif menyarankan agar setiap umat beragama dapat bersikap terbuka. Sikap ini mengharuskannya tidak hanya mencari makna dari kehadiran beragam agama, tapi juga melakukan usaha-usaha yang serius demi terwujudnya sebuah masyarakat yang harmonis melalui dialog dan kerjasama.[25] Masing-masing umat beragama bertanggung jawab untuk mewujudkan nilai-nilai agamanya secara proporsional sehingga kehadirannya bukan merupakan ancaman bagi yang lain melainkan rekan dialog dan rekan kerja dalam sebuah team kemanusiaan. Tanggung jawab bersama itu akan melahirkan kekuatan dalam membincangkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Setiap umat beragama harus memberikan kontribusi positifnya dalam mengatasi beragam penyakit sosial, seperti: kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, ketidakadilan ekonomi, korupsi dan sejenisnya.[26] Siapa pun berhak

[23] Thomas E Odea, "Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal," 1995.

[24] A N Wilson, *Against Religion: Why We Should Try to Live Without It* (Chatto \& Windus, 1991).

[25] Maarif, *Tuhan Menyapa Kita*, 2020.

[26] Niat untuk melakukan perbaikan demi perbaikan masyarakat harus dilakukan oleh para pemeluk agama. Mereka harus peka terhadap berbagai penyakit yang sedang diderita masyarakat. Dalam hal ini nurani masing-masing umat beragama harus dihidupkan.

didukung dan diberikan apresiasi yang tinggi sejauh ia memberikan kontribusi positif bagi kepentingan kemanusiaan.

Ada beberapa alasan mengapa Syafii Maarif dipilih sebagai subjek penelitian. *Pertama*, ia memiliki pemikiran yang moderat, egaliter, inklusif, dan toleran. Sifat ini memungkinkannya untuk memulai pembicaraan dan mengambil langkah-langkah konkret untuk dialog dan kerja sama antar umat beragama. *Kedua*, posisinya yang strategis sebagai aktivis dan Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1998-2005) memberinya kesempatan untuk mendapatkan simpati dari jutaan warga Muhammadiyah dan umat Islam lainnya serta masyarakat non-Muslim secara umum dalam konteks sosial politik. *Ketiga*, sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang peduli terhadap hubungan antar umat beragama, ia memiliki kemampuan untuk memperkuat hubungan tersebut. *Keempat*, dalam dekade terakhir, tindakan teror yang dilakukan atas nama agama telah mengganggu hubungan baik antar pemeluk agama. Upaya Syafii Maarif dianggap tepat untuk mengurangi tindakan teror yang dilakukan atas nama agama. *Kelima*, sebagai Presiden *World Conference on Religions for Peace* (Konferensi Agama-Agama untuk Perdamaian Dunia) dan penerima penghargaan internasional atas upayanya dalam mengembangkan pluralisme dan kebebasan beragama di Indonesia, ia melalui MAARIF Institute memberikan penghargaan kepada mereka yang berperan dalam memperkuat hubungan antar agama. *Keenam*, visinya tentang Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam bukan hanya bagi manusia tetapi juga bagi makhluk lainnya, menjadi landasan teologis yang mempengaruhi pemikiran dan tindakannya. *Ketujuh*, dengan memahami pemikiran Ahmad Syafii Maarif, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan dialog antaragama dan mempromosikan toleransi di tengah keragaman agama di Indonesia.

.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Penelitian ini menginvestigasi substansi kebebasan beragama dalam pemikiran Syafii Maarif dan relevansinya terhadap kebangsaan. Untuk menjaga

fokus, penelitian ini terbatas pada periode saat Syafii Maarif menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sejak saat itu, pemikiran-pemikirannya telah disebarkan secara luas di masyarakat,secara massif terutama di kalangan Muhammadiyah. Meskipun pemikiran-pemikiran Syafii Maarif yang muncul di luar periode tersebut tidak akan dianalisis secara mendalam, namun tetap dianggap sebagai tambahan informasi yang berharga. Adapun rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana Pemikiran Kebebasan Beragama menurut Ahmad Syafii Maarif?
2. Bagaimanakah Pemikiran kebebasan beragama menurut Syafi'i Ma'arif terhadap kebangsaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebebasan beragama meniurut Untuk mengetahui kebebasan beragama Syafii Maarif dan relevansinya dengan pemikiran kebangsaan

2. Untuk mengetahui Pemikiran kebebasan beragama Ahmad Syafi'i Ma'arif dan relevansi terhadap kebangsaan?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
    1) Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai: kebebasan beragama Syafii Maarif.
    2) Dapat dijadikan titik balik bagi penelitian pemikiran filsafat Islam lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

3) Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister, Kesarjanaan Strata dua (S2), Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universita Islam Negeri (UIN) Bukittinggi.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

1) Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kefilsafatan dan teologi bagi kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan sistematis, maka tulisan ini disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sitematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, menguraikan tentang mengenai konsep kebebasan beragama, kebangsaan, dan kajian terdahulu.

Bab III Metodologi penelitian, yang berisikan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Berisi tentang pembahasan mengenai kebebasan beragama Syafii Maarif relevansi terhadap kebangsaan.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan istilah yang terdiri dari dua kata. Kata dasar kedua kata tersebut ialah "bebas" dan "agama". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bebas diartikan dengan merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa, dan dapat melakukan keinginan.[27]

Sedangkan kata *beragama* berarti memeluk agama atau kepercayaan tertentu.[28] Dari pemaknaan secara etimologi ini kebebasan beragama dapat diartikan sebagai sikap merdeka, tidak terikat, serta tidak ada paksaan dalam memeluk atau meyakini keyakinan/agama tertentu.

Dalam Deklarasi Umaum Hak Asasi Manusia pasal 18, yang telah menjadi peraturan internasional, makna bebas dalam kalimat "kebebasan beragama" adalah bahwa, setiap orang bebas atas kebebasan untuk berfikir, hati nurani dan agama. Hak ini juga termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaannya baik untuk diri sendiri, di mata orang lain, di depan umum atau swasta, yang semuanya ditujukan untuk mewujudkan agama atau kepercayannya dalam mengajar, berlatih, beribadat, dan taat.[29] Pemaknaan ini lebih luas daripada pemaknaan kebebasan beragama dalam definisi-definsi pada umumnya.

Kebebasan beragama merupakan dasar bagi terciptanya kerukunan umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan di antara umat manusia. Kebebasan beragama juga merupakan hak manusia yang langsung diberikan oleh Tuhan serta tidak boleh ada seorang pun yang melarangnya.[30] Maka dari itu sudah semestinya kebebasan beragama menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat

---

[27] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balaik Pustaka, 2001, h. 73.
[28] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* h. 43.
[29] Lihat: Naskah Universal Declaration of Human Roght, h. 5.
[30] Dewi Nurni, "Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Al-Qur‟an", dalam Jurnal Syahadah, Vol. 6, No. 2, Tahun 2018, h. 74.

yang beragama. Termasuk Indonesia, sebagai negara yang semua pemeluknya memeluk agama dan keyakinan tertentu.

Sementara itu menurut Basya‟ib, kebebasan beragama adalah kebebasan seseorang dalam mengungkapkan keyakinan agamanya tanpa ditekan atau didiskreditkan atas pilihannya tersebut.[31] Dari teori ini maka jika saya memeluk agama Islam, saya bebas untuk mengungkapkan keyakinan saya di mana pun tanpa ada sikap penekanan dari siapapun atas dasar apapun. Agama yang saya anut merupakan agama pilihan sendiri yang tidak boleh seorang pun mendiskreditkannya.

Gamal Al-Banna mengaitkan kebebasan beragama dengan pluralisme. Karena pluralisme berarti membiarkan adanya eksistensi agama-agama di luar agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian ia mengaitkan pluralisme dengan prinsip tauhid, bahwa kebenaran hanyalah ada pada Allah, sedangkan yang lainnya yang beragam hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang ssemuanya merupakan manifestasi Allah. Dengan demikian siapa pun yang meyakini ke-Esa-an Allah maka harus mengakui keragaman eksistensi yang lain, tidak terkecuali keragaman agama.[32] Artinya bahwa, kebebasan beragama meskinya menjadi pondasi seseorang dalam beragama. Sheingga tidak menganggap kemungkinan-keumngkinan selain Allah sebagai kebenaran mutlak. Selain itu agar meyakini bahwa hanya Allah-lah yang Esa, sedangkan yang lainnya sudah pasti beragama.

Sementara itu menurut Arvind Sharma, kebebasan beragama memang sangat penting dijadikan pedoman bagi warga dan bangsa, apalagi dalam konteks negara demokras. Namun demikian yang sulit soal kebebasan beragama adalah bukan dalam hal meyakini dan mempraktikannya, akan tetapi karena adanya sekelompok orang yang justru menolak itu dan menginginkan konservatif dalam beragama.[33] Artinya menurutnya, tantangan kebebasan beragama sebetulnya bukan dalam soal perdebatan di ruang diskusi atau ilmiah, akan tetapi ketika dihadapkan dengan masyarakat lain yang berbeda keyakinan atau agama.

---

[31] Hamid Basya‟ib, *Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal, Ciputat: Alvabet,* 2006, h. 281.

[32] Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran*, Bandung: Mizan, 2011, hal. 74.

[33] Arvind Sharma, *Problematizing Religious Freedom,* USA: Springer, 2011, hal. 37.

Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi, elah melakukan tiga teroboran penting soal kebebasan beragama atau untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama. Pertama, adanya laporan tahunan yang dilakukan oleh berbagai LSM yang itu dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat ke depannya. Dan kedua, dengan adanya laporan daari lembaga-lembaga swasta dapat menjadi bahan untuk mengadvoksi aturan pemerintah agar benar-benar diterapkan dalam konteksnya (kebebasan beragama). Dan ketiga.[34] Namun hemat penulis tetap saja menjadi problem manakala penelitian-penelitian hasil laporan kebebasan beragama diisi oleh peneliti, penggiat HAM, bahkan pemerintah asing.

Nurcholis Madjid menyebut bahwa kebebasan beragama dalam konteks akidah, ibadah, dan mj‟amalah, yang semuanya dalam koridor makna toleransi, yakni keinginan untuk membiarkan dan sabar terhadap orang lain yang pikiran dan cara hidupnya berbeda, tanpa merusak iman. Dan sebetulnya, toleransi sendiri bermakna memberikan kebebasan terhadap orang lain atau kelompok untuk beribadah, dan mengatur kehidupan mereka selama tidak bertentangan dengan stabilitas masyarakat.[35] Artinya bahwa kebebasan beragama pada dasarnya satu makna dan satu tujuan dengan toleransi itu sendiri.

Dalam definisi Black Law Dictionary, sebagaimana dikutip oleh Hamzah, yaitu sebuah kemerdekaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang kecuali yang sudah ditentukan oleh Undang-undang (UU).[36] Definisi ini mempertegas bahwa setiap manusia bebas atau kemerdekaannya masing-masing. Tidak boleh ada seorang pun yang terinterpensi apalagi dipaksa untuk menganut suatu agama/keyakinan tertentu.

Sementara itu menurut Ibn Sayf, kebebasan dalam konteks kebebasan beragama bukanlah kebebasan dalam makna mutlak. Jik kebebasan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai akhlak, akal, dan kemaslahatan maka tidak bisa dinamakan

---

[34] Budhy Munawar-Rachman, *Memebala Kebebasan Beragama,* Jakarta: LSAM Paramadina, 2015, h. xxviii-vxiv.

[35] Elza Peldi Tahar (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, Jakarta: Kompas, 2009, hal. 328.

[36] Rohana Hamzah K, "Janinan Kebebasan Beragama Menurut UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 di Desaa Mantadulu Kecamatan Antona Kabupaten Luwu Timur", dalam jurnal *Datuk Sulaiman Law Review*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020, h. 16.

kebebasan. Sebab demikian konotasinya negatif, yakni karena keinginan nafsu. Padahal yang dimaksudkan dengan kebebasan dalam konteks ini ialah bermakna pasrah.[37] Sehingga dengan batasan ini seseorang tidak perlu memaksakan orang lain untuk sama atau mengikuti agama/keyakinannya. Sebab masalah apakah seseorang mau memeluk Islam atau tidak adalah hak Allahh. Manusia-dalam berdakwah-diperintah hanya untuk mengajak, dan urusan hasilnya dipasrahkan kepada Allah.

Dister menguraikan maksud kebebasan dalam konteks ini dari mulai makna kesempurnaan eksistensi manusia, kebebasan berkehendak, dan kebebasan dalam arti sosial-politik. Pertama, kebebasan merupakan tujuan yang melengkapi hidup manusia. Pada tingkatan sosial masingmasing manusia mereka memiliki kebebasan sebagai bentuk kesempurnannya di dunia. Dari sini sehingga meskinya tidak boleh ada orang yang memaksakan orang lain melakukann sesuatu. Kedua, kebebasan juga merupakan kemampuan manusia untuk memberi arti dan arah kepada hidup dan kemampuannya termasuk menerima atau menolak kemungkinan dan nilai yang ditawarkan orang lain. Dan ketiga, kebebasan dalam arti sosial dan politik, yaitu bahwa agar hal yang menjadi jalan kesempurnaan dan menentukan pilihan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.[38]

Bahkan, kebebasan adalah hak bagi manusia dan hak keislaman seseorang. Pembahasan bab ini bahkan masuk dalam kajian Islam dan diafirmasi, yaitu dengan bukti bahwa Islam menekankan persamaan kemanusiaan untuk mewujudkan kebebasan. Setiap manusia merupakan anak adam yang terbuat dari tanah. Tidak ada perbedaan di antara mereka di sisi Allah kecuali ketakwaan, sebagaimana disinggung dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13.[39]Islam memberi afirmasi terhadap kebebasan beragama yang merupakan ssatu keniscayaan yang tidak mungkin untukditolak.

Kebebasan beragama merupakan keniscayaan yang walaupun demikian ia tidak bisa berdiri sendiri. Kebebasan beragama merupakan konsekuensi dari adanya

---

[37] Nashir Ibn Saif As-Saif, Al-Hurriyah; Mafhumuha, Dhawabituha, Atsaruha, t.pn: ktb,Net, t.th, h. 8.

[38] Nicko Syukur Dister, Filsafat Kebebasan, Yogyakarta: Kanisius, 1998, h. 16.

[39] Majma Al-Fiqh Al-Islami, *Al-Hurriyah wa Tahbiquha fi Al-Fiqh al-Islami*, Lebanon: Dar Al-Penulisb Al-„Ilmiyyah, 1971, h. 5.

kewajiban, yang melibatkan pemerintah, politik, dan unsur-unsur masyarakat yang lainnya.[40] Dari sini dipahami bahwa kebebasan beragama adalah sesuatu yang harus diusahakan. Keadaannya tidak bisa terbentuk tanpa usaha yang matang dari setiap individu, kelompok, maupun elemen-elemen masyarakat lainnya.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang secara sosiokultural menjadi tempat tumbuh suburnya berbagai agama dan aliran, kebebasan beragama penting. Agar dengan demikian tidak boleh ada satupun dominasi satu kelompok kepada kelompok lain baik dalam skala daerah maupun nasional. Dengan memahami konsep kebebasan beragama secara komprehensif maka sikap tersebut bisa membentuk bangsa dan negara yang aman dari perpecahan.

Maka dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama adalah kemerdekaan yang dimiliki seseorang dalam menentukan agama dan atau keyakinannya, termasuk keluar dari agama yang diyakini sebelumnya. Kebebasan beragama tidak mutlak, karena pasti dibatasi dengan akhlak, kemaslahatan, dan hukum. Kebebasan juga memiliki konsekuensi terhadap kebebasan seseorang dalam dunia sosial politik.

Dalam sejarah Eropa, prinsip kebebasan beragama berakar pada konsep kebebasan berpikir dan berkesadaran (*liberty of thought and liberty of conscience*). Sebuah konsep yang muncul pertama kali dalam Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang mengakhiri sejarah peperangan atas nama agama di Eropa.[41]

Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dan realitas sosial tidak muncul dalam perkembangan sejarah umat manusia, paling tidak, sampai akhir abad ke-18, sebagaimana terlihat dalam permulaan kelahiran negara Amerika Serikat dan Revolusi Perancis. Kebebasan beragama menjadi inti hak asasi manusia – bahkan yang paling mendasar dideklarasikan secara simultan dalam Deklarasi Perancis tahun

---

[40] 4 Elza Peldi taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi,* Jakarta: Kompas, 2009, h. 314

[41] Penjelasan tentang sejarah diskursus kebebasan beragama sebagai dictum internasional dapat ditemui dalam laporan Arcot Krishnawami tahun 1959, *Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practice*, lihat Natan Lerner, "The Nature anf Minimum of Freedom of Religion or Belief," dalam Tore Lindholm, et.all., ed., *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), h. 68-69.

1789 (*The French Declaration des droits des hommes et citoyens*) dan *Bill of Rights* Amerika Serikat.[42]

Dalam pemikiran politik, konsep kebebasan mendapatkan penafsiran yang beragam. Salah satu definisi kebebasan di antaranya bahwa tiadanya halangan atau rintangan bagi seseorang untuk berbuat. John Locke mengemukakan bahwa hukum sekalipun tidak boleh membatasi kebebasan, dan justru harus menjaga dan memperluas kebebasan.[43] Di sisi lain, pandangan modern memandang bahwa kebebasan diakui menemui batasannya bila berbenturan dengan hukum positif. Werner Becker memahami kebebasan dalam arti seseorang dalam batasan-batasan yang telah ditentukan bisa berbuat atau meninggalkan apa yang dikehendakinya. Batasan-batasan ini boleh jadi adalah kondisi biologisnya ataupun hokum positif. Sementara itu, John Stuart Mill menolak kebebasan yang bisa membahayakan orang lain (*harm to others*).[44]

B. Pokok-Pokok Kebebasan Beragama

Sebagai sebuah konsep, kebebasan beragama memiliki prinsipprinsip penting yang harus diimplementasikan oleh warga dan bangsa yang meyakini kebebasan dalam berkeyakinan atau beragama ini.

Banyak pihak menghormati kebebasan beragama sebagai salah satu hak asasi manusia terpenting di era modern: "Sebuah elemen esensial dalam tata internasional yang baik yakni kebebasan beragama."[45] Lebih dari penting, banyak pihak berpendapat bahwa kebebasan beragama ialah hak dasar doktrin hak asasi manusia modern. Kebebasan beragama dijelaskan sebagai, "kemenangan kebebasan yang paling berharga," "kebebasan pertama, pembentuk, fons et origo atas seluruh hak dan

---

[42] Leonard Swindler, "Freedom of Religion and Dialogue," dalam Lindholm, et.all., ed., *Facilitating Freedom of Religion or Belief*: A Deskbook, h. 761.

[43] Norman Berry, *An Introduction to Modern Political Theory* (New York: St. Martin's Press, 1981), h. 157-163. Dikutip dari Masykuri Abdillah, "Kebebasan Berekspresi dalam Konteks Masyarakat Indonesia," dalam Abdul Hakim dan Yudi Latif, ed., *Bayang-bayang Fanatisisme*; *Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid* (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2007), h. 189.

[44] 1 Andrew *Heywood, Political Theory; An Introduction* (New York: St. Martin's Press, 1994), h. 258 dan 270. Dikutip dari Abdillah, "Kebebasan Berekspresi dalam Konteks Masyarakat Indonesia," h. 189.

[45] Franklin H. Littell, "The Ecumenical Commitment to Human Rights", *Journal of Ecumenical Studies* 29 (1992), h. 388.

kebebasan lainnya." Littell menyatakan, "di antara hak-hak dasar lainnya, kebebasan beragama adalah yang paling diprioritaskan".[46]

Ada banyak alasan beragam atas keutamaan ini, tetapi kebanyakan komentator cenderung sepakat bahwa kebebasan beragama merupakan dasar masyararakat demokratis dan bebas. Mereka memahami bahwa kebebasan politik tidak terpisahkan dari kebebasan beragama. Kebebasan politik berakar pada kebebasan beragama dan tidak bisa diperkokoh ataupun dikembangkan terkecuali melaluinya. Semua partai yang berusaha memberi dasar lain atas kebebasan politik telah gagal dalam usahanya dan hancur dalam rezim tirani.[47]

Berbagai pengakuan atas urgensi kebebasan beragama tersebut memposisikan kebebasan tersebut sebagai sebuah instrumen hak asasi manusia terpenting dalam sejarah manusia. Pengakuan tersebut diabadikan dalam instrumen-insturmen hak asasi manusia internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) tahun 1966.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan, dalam sejarahnya, merupakan instrumen pelaksanaan hak asasi manusia Secara normatif, telah jelas sejak awal masa hak asasi manusia modern bahwa kebebasan beragama adalah hak yang sangat mendasar. Timbul dari sisa-sisa Perang Dunia ke-2, hak kebebasan beragama diartikulasikan paling otoritatif dalam pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Individu – semua manusia di seluruh dunia – merupakan pemilik utama dan pihak yang diuntungkan dari kebebasan ini, negara – yang idealnya di bawah kritikan tajam yang terus menerus disampaikan oleh warga negara yang terdidik – menjadi alat utama dan juga pemilik utama kewajiban-kewajiban terkait hak tersebut. Melampaui ketentuan kebebasan beragama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan KIHSP, kunci dan spesifikasi yang memperinci hak asasi kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi kita disajikan oleh Deklarasi 1981. Komentar Umum No. 22 (48) Komite Hak Asasi Manusia PBB menyajikan substansi normatif atas pasal 18 KIHSP.[48]

---

[46] Peter L. Berger, "The First Freedom", *Commentary* 86 (1988), h. 64

[47] Abbé Hugues-Félicité Robert de Lamennais dalam C. B. Hastings, "Hughes-Félicité Robert de Lamennais: A Catholic Pioneer of Religious Liberty", *Journal of Church and State* 30 (1988), h. 321.

[48] Lindholm, et.all., ed., *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, pp. xxxvii-xxxviii.

DUHAM tahun 1948, artikel 18 menyebutkan: "...Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi..."

Dalam redaksi lain, KIHSP tahun 1966, artikel 18 (1) menyatakan bahwa: "...Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran..."

Kebebasan beragama memiliki dua dimensi. *Pertama*, kebebasan internal (*forum internum*), artinya "bebas untuk meyakini dan memeluk satu agama tertentu," termasuk pindah dari satu agama ke agama yang lain. Meski demikian, kebebasan internal ini tidak secara otomatis melahirkan hak untuk memanifestasikan dan menyiarkan agama di ranah publik. Hal ini dikarenakan adanya dimensi kedua dari kebebasan beragama.[49]

Dimensi kedua ialah kebebasan eksternal (*forum externum*), yakni hak kondisional yang bisa menjadi subjek pembatasan karena bersinggungan dengan hak-hak asasi orang lain. Kebebasan eksternal ini dengan jelas terutama dapat disaksikan dalam dokumen KIHSP tahun 1966, yang sekaligus membedakannya dari DUHAM 1948. KIHSP tahun 1966, artikel 18 (3) berbunyi: "...Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang

[49] Komite HAM PBB menyatakan bahwa "kebebasan" menganut atau menetapkan agama atau keyakinan perlu mencakup kebebasan memilih agama atau keyakinan, termasuk, antara lain, hak untuk menggantikan agama atau kepercayaan yang sedang dianut dengan yang lain atau untuk tidak beragama, dan juga hak untuk mempertahankan agama atau keprcayaannya sendiri (Komentar Umum 22, Pasal 5)

diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak mendasar dan kebebasan orang lain...”

Kedua dimensi kebebasan beragama ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Akibatnya, kebebasan beragama bukanlah kebebasan tanpa batasan. Penegakan kebebasan beragama tetap harus mempertimbangkan keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, yang dirangkai dalam suatu ketentuan hukum. Kebebasan beragama seseorang juga dibatasi oleh pengakuan atas hak dasar dan kebebasan orang lain.[50]

Di antara penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan normatinya, yaitu, *pertama*, kebebasan internal. Bahwa setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan, beragama. Prinsip ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, termasuk untuk berpindah agama atau keyakinannya. *Kedua*, kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan baik secara individu atau kelompok, secara publik atau kelompok, untuk mengekspresikan agamanya dalam beribadah atau pengajaran. *Ketiga*, tidak ada pemaksaan. Tidak boleh ada seorang pun yang mengintervensi atau mengurangi kebebasan orang lain atas agama/keyakinan yang sudah dipilih. *Keempat*, tidak diskriminatif. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan semua individu di wilayah kekuasaan tanpa melihat perbedaan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, aagama, pilihan politik, asli atau pendatang, dan lain sebagainya. *Kelima*, hak untuk orang tua. Bahwa, negara berkewajiban menghormati kebebasan orang tua/wali, untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai keyakinannya masing-masing. *Keenam*, kebebasan lembaga dan status legal. Dalam beragama, dan ketika seseorang mengikuti komunitas tertentu, maka ia berhak dan bebas dalam beragama dan berkeyakinan. *Ketujuh*, pembatasan kebebasan berdasar pada hukum dan atau

[50] Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (ICCPR), Pasal 18 (1), Pasal 9 (1)

keselamatan masyarakat. Dan *kedelapan*, negara tidak boleh memaksa warganya dalam kondisi apapun[51]

Sementara itu Abdurrahman Al-Husoin menjelaskan bahwa prinsip-prinsip di dalam kebebasan beragama pada dasarnya adalah prinsip-prinsip yang sudah sangat jelas di dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah; kebebasan individu, kebebasan kelompok baik dalam kehidupan individu atau di ruang publik ketika mengekspresikan agama dan akidahnya, baik dengan pengajaran, pelatihan-pelatihan, dan perayaan-perayaan keagamaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip yang diafirmasi oleh ayat Al-Qur‟an, yaitu QS. Al-Kahfi 18/: 29, QS. Al-Baqarah 2/: 139 , QS. As-Syura 42/: 15, dan QS. Saba 34/: 25.

Surat Al-Kahfi ayat 29:

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗفَمَنْ شَاۤءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاۤءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ

بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗوَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاۤءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ۗبِئْسَ الشَّرَابُ ۗوَسَاۤءَتْ

مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ ﴾

Terjemahan: *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur." Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.* (QS. Al-Kahfi 18/: 29)

Surat Al-Baqarah ayat 139:

[51] Zainuddin, "Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama/Kepercayaan Perspektif HAM", dalam GEMA: *Media Informasi dan Kebijakan Kampus UIN Malang*, 2013. Diakses pada www.uin-malang.ac.id, pada 26 Desember 2023, pukul. 20.14 WIB.

﴿ قُلْ اَتُحَاۤجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۙ ﴿١٣٩﴾ ﴾

Terjemahan: *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Apakah kamu (Yahudi dan Nasrani) hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal, Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri.* (QS. Al-Baqarah 2/: 139)

Surat As-Syura ayat 15

﴿ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۙ ﴿١٥﴾ ﴾

Terjemahan: *Dia (Allah) berfirman, "Tidak (mereka tidak akan dapat membunuhmu). Maka, pergilah berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat). Sesungguhnya Kami menyertaimu mendengarkan (apa yang mereka katakan).* (QS. As-Syura 42/: 15)

Surat Saba ayat 25:

﴿ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ ﴾

Terjemahan: *Katakanlah, "Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kami kerjakan dan kami tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu kerjakan."*(QS. As-Syura 42/: 15)

Bagi Al-Husoin, kebebasan bergama pada dasarnya sudah terprinsip dengan rapih di dalam ajaran agama Islam itu sendiri, yang seharusnya menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menajalnkan kehidupan beragama di tengah keberagaman agama.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui keputusan perlindungan hak-hak kemanusiaan memberikan tiga prinsip di dalam kebebasan beragama, yaitu sebagai berikut; *pertama*, menghargai setiap hak individu di dalam beragama maupun

berkeyakinan. Prinsip ini menurutnya adalah prisnip yang alamiah di mana setipa orang memang seharusnya mendapatkan keebebasan dalam memilih setiap sesuatu. Setiap orang memiliki cara pandang dan cara berfikir yang berbeda satu sama lain yang mengharuskannya diberi kewenangan dalam memilih agama/keyakinan. *Kedua*, memberikan keprcayaan pada setiap orang untuk membangunkeyakinan umum. Bahwa, tidak boleh hanya karena berbeda kelompok atau keyakinan, seseorang terhalang untuk membangun keyakinan. Karena pada dasarnya yang harus menjadi pertimbangan adalah kualitas diri, bukan karena perbedaan yang melatarbelakangi seseorang. Dan *ketiga*, memberi kepercayaan bahwa setiap orang bisa berinteraksi dan bernegosiasi dengan publik.[52] Ketiga prinsip tersebut di atas menjadi pedoman bagi umat Islam khususnya, dan umumnya untuk semua manusia, untuk menjalankan ketentuan kebebasan dalam beragama.

Pandangan yang lain menegaskan bahwa prinsip-prinsip kebebasan dalam beragama relevan dengan konteks keseimbangan Pancasila, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan (bermoral religius)
2. Setiap orang harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan (humanistik)
3. Setiap orang harus berorientasi pada nilai-nilai kemasyarakatan.[53]

Selain itu juga setiap orang harus menggunakan paradigma penggunaan/penerapan Pancasila jika ingin menerapkan prinsip-prinsip kebebasan beragama dalam kontes masyarakat yang beragam sebagaimana Indonesia, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sebagai berikut:

1. Paradigma ketuhanan, bahwa masyarakat Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tidak menjadikan satu agama tertentu yang dianut oleh negara sebagai agama yang wajib diikuti oleh seluruh rakyatnya.

---

[52] Lihat: Dokumen Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-25 dengan judul "Penegasan Secara Khusu Terhadap Kebebasan Beragama Atau Akidah", 26 Desember 2013, h. 24-26.

[53] Barda Nawawi Arief, Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Padang: Pascasarjana UBH, 2009, h. 11

2. Paradigma kemanusiaan yang mengakui dan memberlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
3. Paradigma kebangsaan atau kepentingan umum, paradigma kerakyatan atau demokrasi yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, di mana setiap orang Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, dalam hal ini juga tidak boleh ada seorang pun yang memaksakan orang lain untu mengikuti apa yang diyakini atau diikuti dalam keagamannya.Paradigma keadilan sosial, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan menghormati hak asasi orang lain, atau setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dalam menjalankan ibadah dan kegiatan agamanya masing-masing.[54]

Walaupun kebebasan beragama berlaku untuk individu, kebebasan beragama juga mencakup perlindungan aktifitas masyarakat dan hubungan antar generasi. Komunitas keagamaan mengambil keuntungan dari perlindungan yang diberikan atas aktifitas masyarakat. Negara dibebani dengan kewajiban-kewajiban terkait untuk menjamin hak institusional kelompok-kelompok agama.[55]

Dalam uraian yang sedikit berbeda, Siti Musdah Mulia menyebutkan beberapa prinsip kebebasan beragama, yang antara lain:

> "Kebebasan beragama berarti kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.
> Kebebasan beragama berarti kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi atau berdakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun paksaan secara langsung ataupun tidak langsung. Termasuk tidak mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan masyarakat atau bersifat merendahkan martabat manusia sehingga tidak dibenarkan melakukan pemberian bantuan apa pun dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu.

[54] Triana Ohoiwutun, *Menalar Kebebasan Beragama Versi Pancasila, dalam Prosiding Kongres Pancasila* Universitas Gadja Mada Yogyakarta, 2012, hal. 7.

[55] Lindholm, et.all., ed., *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, h. ix.

> Kebebasan beragama mencakup kebebasan untuk berpindah agama, artinya berpindah pilihan agama tertentu ke agama lain. Setiap warga negara berhak untuk memilih agama dan kepercayaan apapun yang diyakininya dapat membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat.
> Kebebasan beragama mencakup kebebasan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama atau berbeda sekte atau berbeda faham keagamaan sepanjang perkawinan itu tidak mengandung unsur pemaksaan dan eksploitasi, seperti perdagangan perempuan dan anak perempuan (*trafficking in women and children*), asalkan perkawinan tersebut dicatat di lembaga catatan sipil.
> Kebebasan beragama mencakup kebebasan mempelajari ajaran agama manapun di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk di lembaga pendidikan milik pemerintah. Setiap siswa atau mahasiswa berhak memilih atau menentukan agama manapun yang akan dipelajarinya, dan tidak dibatasi hanya pada agama yang dianut peserta didik. Demikian juga, kebebasan untuk tidak mengikuti pelajaran agama tertentu.
> Kebebasan beragama memberi ruang pada kemunculan aliran keagamaan tertentu, bahkan kemunculan agama baru sepanjang tidak mengganggu ketentraman umum dan tidak pula melakukan praktit-praktik yang melanggar hukum. Kebebasan itu berlaku pula untuk mereka yang mendirikan perkumpulan untuk maksud kesehatan atau kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran agama tertentu sesuai dengan pilihan anggota atau peserta, selama tidak mengharuskan keimanan terhadap suatu agama atau kepercayaan sebagai syarat.
> Kebebasan beragama mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama dan kepercayaan yang hidup di suatu negara. Negara tidak boleh bersikap dan berbuat diskriminatif terhadap mereka. Tidak ada istilah mayoritas-minoritas, penganut agama samawi dan nonsamawi, agama asli dan agama pendatang, serta agama resmi dan tidak resmi."[56]

Dari ulasan diatas maka kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang penting dalam era modern, diakui sebagai elemen esensial dalam tata internasional yang baik. Kebebasan ini dianggap sebagai hak dasar dalam doktrin hak asasi manusia modern, yang ditegaskan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dalam konteks ini, terdapat prinsip-prinsip penting yang harus diimplementasikan, termasuk kebebasan internal dan eksternal, larangan pemaksaan dan diskriminasi, serta pengakuan terhadap hak orang tua dan lembaga keagamaan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam ajaran agama seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Husoin dan Siti Musdah Mulia, yang menyatakan

[56] Siti Musdah Mulia, "Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia," dalam Hakim, ed., *Bayang-bayang Fanatisisme; Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish,* h. 228-231.

bahwa kebebasan beragama sudah terprinsip dalam Islam dan mencakup hak individu untuk memilih agama serta kebebasan menyebarkan agama tanpa menggunakan cara kekerasan. Prinsip-prinsip ini juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agamanya tanpa diskriminasi dan dengan menghormati hak asasi manusia.

C. Kebangsaan Perspektif Tokoh-Tokoh Islam Indonesia

Ada empat tokoh Islam yang akan diutarakan dalam pembahasan ini. Tokoh Islam yang dimaksud adalah tokoh-tokoh yang beragama Islam, meski dengan cara pandang yang berbeda. Mereka semua ada tokoh-tokoh Islam yang dianggap mewakili pemikiran dalam sidang BPUPKI. *Pertama*, Soekarno, sebagai wakil dari tokoh Islam yang juga pemikirannya merupakan perpaduan antara nasionalis, agama dan komunis, atau dikenal dengan NASAKOM.[57] *Kedua*, Mohammad Hatta, dikenal dengan tokoh Islam yang juga sangat sosialis. *Ketiga*, Ki Bagus Hadikusumo, merupakan tokoh Islam yang banyak berkiprah di Muhammadiyah. *Keempat*, A. Wahid Hasyim, merupakan tokoh Islam banyak berkiprah di Nahdlatul Ulama.

1. Kebangsaan dalam Perspektif Soekarno

   Soekarno memiliki nama kecil Kusno. Karena ia sering sakit -dalam kepercayaan sebagian masyarakat bisa disebabkan karena ketidak cocokan nama- maka digantilah namanya menjadi Soekarno. Beliau dilahir pada tanggal 6 juni 1901 di Lawang Seketeng Surabaya. Soekarno adalah anak kedua dari pasangan Raden Soekemi Sosrodiharjo dan Idayu Nyoman Ray. Kakak beliau bernama Soekarmini, sementara kakek beliau bernama Radjen Hardjodikromo, seseorang yang dipandang memiliki ilmu hikmah dan mendalami kebatinan .

[57] NASAKOM adalah singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Konsep ini memainkan peran penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia selama periode Demokrasi Terpimpin dari tahun 1959 hingga 1965. Ir. Sukarno, proklamator Republik Indonesia, mencetuskan NASAKOM. Meskipun konsep ini lebih dikenal menjelang akhir dekade 1950-an, Sukarno telah memikirkan konsep ini sejak lama sebelum menjabat sebagai Presiden RI pertama pada 17 Agustus 1945. Konsep NASAKOM mencerminkan upaya Sukarno untuk menggabungkan tiga kekuatan ini dalam rangka mencapai stabilitas dan persatuan di Indonesia.

Soekarno bukan sosok yang kaya sejak lahir, ia bahkan hidup dalam kekurangan. Beliau menceritakan:

Kami sangat melarat, sehingga hampir tidak bisa makan satu kali dalam sehari. Yang terbanyak kami makan ialah ubi kayu, jagung tumbuk dan makanan lain. Bahkan ibu tidak mampu membeli beras termurah yang biasa dibeli oleh para petani. Ia hanya bisa membeli padi. Setiap pagi ibu mengambil lesung dan menumbuk, tak henti-hentinya menumbuk butiran-butiran berkulit itu sampai menjadi beras seperti yang dijual orang di pasar… . Aku menjadikan sungai sebagai kawanku, karena ia menjadi tempat di mana anak-anak yang tidak punya dapat bermain dengan cuma-cuma. Dan ia pun menjadi sumber makanan. Aku senantiasa berusaha keras menggembirakan hati ibu dengan beberapa ekor kecil untuk dimasak…[58]

Ini merupakan kondisi hidup yang mendekati kemiskinan. Kehidupan layaknya orang-orang kampong waktu itu. Artinya Soekarno adalah sosok pemimpin yang lahir dari kondisi yang sangat merakyat, bisa merasakan apa yang dirasakan rakyat. Kedekatan dan rasa kerakyatan ini, mungkin yang membuat pidato-pidato nya berhasil membuat hati rakyat tersentuh, karena dari hati akan sampai ke hati lagi.

Keluarga Soekarno memang bukan keluarga kaya, namun kedua orang tuanya sangat menyadari pentingnya pendidikan bagi anaknya. Soekarno pertama kali mengenyam pendidikan di Tulungagung. Karena keluarganya pindah ke Mojokerto, Soekarno kemudian menimba ilmu di Inlandse School, sebuah pendidikan yang berkualitas di masa nya.

Pada bulan juni 1911, orangtuanya kembali memindahkan sekolahnya ke Europeesche Lagere School (ELS). Hal tersebut merupakan cara agar kelak beliau diterima di Hoogere Burger School (HBS). Pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan studinya ke HBS Surabaya, di sinilah beliau bertemu dengan sosok yang sangat mempengaruhi pemikirannya, yaitu H.O.S. Tjokroaminoto.

H.O.S. Tjokroaminoto sangat mengagumi kecerdasan dan keseriusan Soekarno dalam belajarnya. Di antara bakat yang sangat dikagumi oleh

[58] Syamsul Kurniawan, *Gagasan Pendidikan Kebangsaan Soekarno; Ide Progresif atas Pendidikan Islam Indonesia*, Malang: Madani, 2017, h. 11-14

H.O.S. Tjokroaminoto adalah bakat menulis Soekarno. Tulisan itu dimuat di halaman depan majalah Utusan Hindia dengan judul "Nasibia SI". Sebuah tulisan yang mampu membuat H.O.S Tjokroaminoto dan anggota SI (Sarekat Islam) lainnya tercengang.[59]

Ternyata begitupun dengan Soekarno, beliau sangat mengagumi H.O.S Tjokroaminoto, terlebih setelah beliau menikahi Utari (putri H.O.S Tjokroaminoto), beliau selalu mengikuti kemanapun H.O.S Tjokroaminoto pergi, dan benar benar mendalami, menghayati bahkan menirukan pidato-pidato gurnya tersebut. Soekarno menganggap bahwa gurunya itu lah yang mempengaruhi bahkan mengubah seluruh hidupnya. Soekarno mengatakan:

"Cerminku adalah Tjokroaminoto. Aku memperhatikannya, mengumandangkan suaranya. Aku melihat gerak tangannya dan kuperlihatkan penglihatanku ini pada pidato ku sendiri… aku menghirup udara lebih banyak lagi persoalan politik di rumah pak Tjokro, dapur daripada Nasionalisme"[60]

Pada tahun 1920, setelah tamat dari HBS, beliau melanjutkan pendidikannya di THS (Technisce Hoogeschool) yang kini berubah menjadi ITB. Pada tanggal 26 mei 1926, Soekarno meraih gelar insinyur (Ir) dengan sangat mengagumkan Selain sebagai pelajar, Soekarno juga seorang aktifis. Soekarno sosok yang sangat antusias dengan buku, terutama bukubuku pemikiran tokoh-tokoh besar, sehingga besar kecilnya pemikiran mereka menjadi bagian dari pemikirannya. Pergerakan nasional sepertinya sudah mengalir dalam darahnya sejak muda. Ketika beliau di Surabaya, beliau sempat mendirikan sebuah perkumpulan politik bernama Trikoro Darmo, yang berarti tiga tujuan suci. Sebuah organisasi yang diikuti oleh anak sebayanya, dengan visi kebangsaan. Di dalamnya beliau dan teman-temnnya mengadakan kegiatan seperti pengembangan kebudayaan, mengumpulkan dana sekolah dan membantu korban bencana alam.

---

[59] Andi Setiadi, *Hidup dan Perjuangan Soekarno Sang Bapak Bangsa; Sebuah Biografi Politik dan Intelektual Lengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2017, h. 39-41

[60] Syamsul Kurniawan, *Gagasan Pendidikan Kebangsaan Soekarno; Ide Progresif atas Pendidikan Islam Indonesia*, …, h. 18

Pada tahun 1923-1924, ia mengubah *Jong Java* menjadi *Jong Indonesia*, sebuah pemikiran yang cerdas, sebagian dari mulanya langkah dalam rangka menghilangkan kesukuan dan mengikat persatuan bangsa Indonesia. Ketika di Bandung, beliau juga pernah mengikuti organisasi kepanduan. Pada tahun 1927 Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Beliau tampil sebagai pelopor PNI. Melalui PNI beliau bersama Soekiman (perwakilan SI) menggagas PPPKI (Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Hadirlah dalam rapat tersebut perwakilan dari SI, PNI, Budi Utomo, Pasundan, Sumateranen Bond, Kaum Betawi, dan kelompok Studi Indonesia.

Pada 1929, Soekarno dipenjara, lalu dibebaskan pada tahun 1931. Pada 1932 beliau bergabung ke Partindo (pecahan dari PNI) dan menjadi pimpinan redaksi Fikiran Ra'jat. Beliau ditangkap kembali pada tahun 1933, kembali diasingkan di Ende Flores. Pada 1938-1942 ia diasingkan di Bengkulu, pada masa penjajahan Jepang barulah beliau dibebaskan.[61]

Soekarno merupakan tokoh besar yang menganut 3 ideologi besar, yaitu nasionalisme, agama dan komunis. Beliau pernah juga menulis tentang Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme di Indonesia Moeda (IM) yang diterbitkan oleh Comite Persatuan Indonesia (CPI). Nasionalisme dalam pandangan Soekarno, bukanlah berarti cinta terhadap tanah air kemudian merendahkan bangsa lain. Ini pemahaman yang eksklusif yang tidak sejalan dengan pemahaman beliau. Soekarno mengusung semangat kebangsaan yang bermartabat dan tidak merendahkan bangsa lain. Demikian juga dengan konsep Islam dan marxisme versi Soekarno.[62] Soekarno pernah menyatakan langsung nasionalisme yang dipahaminya:[63]

---

[61] Syamsul Kurniawan, *Gagasan Pendidikan Kebangsaan Soekarno; Ide Progresif atas Pendidikan Islam Indonesia*, …, hal. 19-20

[62] Soekarno menyandingkan keduanya sebagai bentuk penentang terhadap kapitalisme. Bagi Soekarno spirit sosialisme adalah spirit Islamisme, sementara kapitalisme merupakan ideologi yang sangat berbahaya, karena akan berakibat pada penindasan terhadap rakyat kecil. Dengan demikian, sebetulnya pemahaman Soekarno tentang nasionalisme, sekaligus

"Saudara-saudara. Tetapi… tetapi… memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinism, sehingga berpaham "Indonesia Ubber Alles". Inilah bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil daripada dunia. Ingatlah akan hal itu! Ghandi berkata, "saya seorang nasionalis, tapi kebangasaan saya adalah perikemanusiaan. My Nationalism Is Humanity. Kebangsaan yang kita anjurkan, bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinism, sebagaimana dikobar-kobarkan oleh orang-orang Eropa, yang mengatakan "Deutschland uber alles." Tidak ada yang setinggi Germania, yang katanya bangsa minulya, berambut jagung dan bermata biru. "Bangsa Arya" dianggapnya bangsa tertinggi di atas dunia. Sedangkan bangsa-bangsa lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas asas demikian. Tuan-tuan jangan berkata bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia"

Keterlibatannya dalam BPUPKI, merupakan langkah puncak penawarannya untuk bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Potongan usulan beliau tentang Pancasila, sebagai berikut:

"Saudara-saudara! Dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini, dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas, dasar.

---

pembuka jalan kebuntuan. Sebagian muslim selalu mempertentangkan antara nasionalisme dan Islam, karena menganggap bahwa nasionalisme tidak universal, sementara Islam bersifat universal. Padahal nasionalisme tidak bermaksud mendiskreditkan bangsa lain, sejatinya nasionalisme memperkuat bangsa sendiri untuk kemudian ikut berperan bagi kedamaian dan kemaslahatan dunia.

[63] Syamsul Kurniawan, *Gagasan Pendidikan Kebangsaan Soekarno; Ide Progresif atas Pendidikan Islam Indonesia*,, …, h. 72

Dan di atas ke lima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal abadi."

Dalam kesempatan lain, pembicaraan beliau tentang Pancasila semakin menarik. Beliau semakin menegaskan tentang eksistensi pacasila sebagai dasar negara.[64]

> *"… Pancasila adalah salah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakinyakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat pemersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit-penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri…*[65]

Ia sangat kental dengan Pancasila yang ditawarkannya. Pancasila yang dijadikan menjadi wadah bersama kemajemukan bangsa Indonesia. Beliau sangat yakin, bahwa hanya Pancasila lah yang dapat menyatukan kemajemukan bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke. Sebuah pernyataan yang bisa dimaklumi, karena Pancasila telah melewati perdebatan panjang yang mewakili kemajemukan itu.

2. Kebangsaan dalam Perspektif Mohammad Hatta

Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi pada 12 agustus 1902.46 Dari sisi keluarga Mohammad Hatta merupakan hasil dari perpaduan keluarga kyai dan pedagang. Ayah beliau -H. Muhammad Djamil- adalah anak dari Syeikh Abd al-rahman, seorang pemilik surau dan pengasuh tarikat Naqsabandiyah Batu Hampar.

Sementara Ibu nya –Siti Saleha- merupakan putri dari Bagindo Marah, seorang pedagang yang memiliki usaha dagang yang luas. Dari perpaduan ini,

---

[64] Soekarno, *Pancasila Dasar Negara; Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, h. 30

[65] Agustinus W. Dewantara, *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong; Indonesia dalam Kacamata Soekarno*, Depok: Kanisius, 2017, h. 12

sangat bisa dipahami, kenapa Mohammad Hatta menjadi sosok ekonom yang religious. Mohammad Hatta kecil adalah sosok yang penyendiri, hal ini terutama dikarenakan sikap nenek beliau yang sangat protektif, yang melarang beliau untuk bermain bersama teman sebayanya. Hal ini juga mungkin yang menyebabkan Mohammad Hatta terbiasa merenung dalam kesendirian. Mohammad Hatta mengenyam pendidikan formal, mulai dari ELS di Bukittinggi dan Padang, MULO di Padang, hingga perguruan tinggi di negeri Belanda. Pengalaman beliau di masingmasing tempat belajarnya, tentu saja sangat berpengaruh pada karakter dan prinsip hidupnya.[66]

Ketika di Belanda, ia bergabung dengan *Indische Vereniging* atas ajakan Datuk Pamuncak. Beliau mulai berkiprah pada organisasi tersebut, bahkan bertindak sebagai ketua. Indische merupakan sebuah pergerakan yang didirikan pada tahun 1908 di Belanda, yang terinspirasi dari pergerakan Budi Utomo. Organisasi ini tidak hendak membuat *jong jong* seperti *jong java* dan sebagainya, tetapi hendak menyatukan para mahasiswa Indonesia yang merantau di Eropa. Organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).[67]

Maka ia pula yang ikut memperkenalkan keberadaan Indonesia kepada dunia internasional. Karena kegigihan Mohammad Hatta dalam menggaungkan Indonesia Merdeka, membuat Belanda semakin gerah, apalagi beliau sedang belajar di negeri yang beliau tersebut. Mohammad Hatta dilaporkan, namun dalam persidangan beliau tidak bisa dinyatakan bersalah. Bahkan di negeri yang menjajah negeri nya tersebut, beliau berani mengungkapkan kesalahan-kesalahan Belanda pada Indonesia, bahkan dengan

---

[66] Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia; Pemikiran Politik Bung Hatta, Palmerah: Kompas Media Nusantara*, 2010, h. 56-65

[67] PI di bawah kepemimpinan Mohammad Hatta menjadi organisasi yang terkenal di dalam dan luar negeri. Semboyan yang sering mereka gaungkan adalah Indonesia merdeka. Demi tujuan ini, beliau banyak belajar pada dunia internasional, sering menghadiri berbagai pertemuan internasional, bertemu dengan tokoh-tokoh dari berbagai negara yang terjajah, mereka sama-sama sedang memperjuangkan kemerdekaan negaranya.

tegas beliau katakana: ”kekuasaan Belanda akan berakhir. Soalnya bukan ya atau tidak, tapi cepat atau lambat. Janganlah Nederland memukau diri, bahwa kekuasaan kolonialnya akan kokoh kuat sampai akhir zaman.”[68]

Adanya gejolak di tubuh PI, membuat PI dikuasai oleh komunis, beliau dan Sjahrir pun dikeluarkan dari PI. Namun ternyata beliau pun tidak menolak, bahkan menyatakan diri keluar dari PI karena memang tidak sepakat dengan komunis. Meskipun demikian, beliau masih terus memberikan dorongan pada kawan-kawan seperjuangannya di tanah air. Beliau curahkan perhatian pada golongan merdeka, beliau mendorong mereka untuk mendirikan sebuah partai, maka lahirlah PNI baru. Melalui partai ini, Mohammad Hatta sering menuangkan pikiran-pikirannya dalam majalah *Daulat Ra'jat*. Daulat Ra'jat adalah majalah yang sengaja dibentuk atas saran beliau, guna melakukan perkaderan pada anggota-anggota baru.

Pergerakan Mohammad Hatta semakin meresahkan Belanda, sehingga pada 25 januari 1934, ia ditangkap oleh Belanda, ketika sedang berada di Jakarta. Pada 16 november 1934 ia diasingkan. Dalam pengasingan, tersebut ia dibujuk Belanda untuk menjadi pegawai pemerintah, namun Hatta dengan tegas menolak. Mohammad Hatta akhirnya dibebaskan, karena Belanda sudah tidak berkuasa lagi, ia kemudian dijemput oleh tentara Jepang. Hatta ditanya tentang kesediaannya bekerjasama dengan Jepang, namun beliau justeru bertanya balik: “apakah Jepang akan menjajah Indonesia?”[69]

Pasca kemerdekaan, Mohammad Hatta juga adalah orang yang menggagas “Politik Luar Negeri Bebas Aktif”. Adapun politik luar negeri sebuah negara, menurut Coplin, tergantung pada 4 faktor, yaitu: tingkah laku pengambilan keputusan, politik domestik, faktor ekonomimiliter dan lingkungan internasional. Adapun politik luar negeri bebasaktif dipahami

[68] Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam;Menangkap Makna Maqasid al-Syar'iyah, Jakarta: Kompas Media Nusantara*, 2010, h. 42-51

[69] Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam;Menangkap Makna Maqasid al-Syar'iyah,* …, h. 53-66

sebagai sikap politik Indonesia untuk tidak menerima menjadi bagian dari salah satu negara super power waktu itu (Amerika dan Unisofiet). Artinya Indonesia menolak pembangunan pangkalan militer oleh salah satu dari kedua negara tersebut, juga menolak terlibat dalam pakta pertahanan kedua negara tersebut, tetapi Indonesia tetap berusaha agar bisa aktif dalam usaha perdamaian dunia.

Mohammad Hatta, sosok cerdas yang sangat mencintai negerinya. Kecintaannya terhadap Indonesia membuat dirinya dipenuhi dengan konsep tentang Indonesia yang ideal di masa depan (waktu itu). Konsep negara misalnya, Mohammad Hatta mengidamkan negara Indonesia merdeka, yaitu negara federal atau negara kesatuan demokratis. Menurut Mohammad Hatta:

> "Indonesia merdeka haruslah suatu Republik, yang bersendi kepada pemerintahan rakyat, yang dilakukan dengan perintah wakil-wakil atau badanbadan perwakilan. Dari wakil-wakil atau dari badan-badan perwakilan itu terpilih anggota-anggota pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara. Dan pemerintah ini senantiasa takluk kepada kemauan rakyat, yang dinyatakan atau oleh badan-badan perwakilan rakyat atau negara referendum, keputusan rakyat dengan suara yang dikumpulkan." [70]

Kaitannya dengan kebangsaan, Mohammad Hatta memaknainya bahwa membangun semangat kebangsan berarti membangun kemanusiaan. Kemanusiaan yang beliau maksud adalah membangkitkan kegembiraan dan keberanian menentang maut, siap menderita demi bangsa. Bagi beliau, sebodoh apapun rakyat, yang penting dia rela berkorban membela tanah airnya. Mohammad Hatta tidak main-main dalam ucapannya. Apa yang beliau ucapkan sudah beliau lakukan. Perjuangannya menentang Belanda langsung di negeri nya, adalah tindakan yang sangat berani, belum lagi ketika baliau diasingkan dan berani menolak tawaran menggiurkan dari Belanda, merupakan bukti nyata dari patriotism seorang Mohammad Hatta.[71]

---

[70] Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia; Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: Kompas, 2010, hal. 201

[71] Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam;Menangkap Makna Maqasid al-Syar'iyah,* …, h. 54.

Sangat panjang lika-liku perjuangan Mohammad Hatta, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Keterlibatan beliau dalam BPUPKI merupakan wasilah berkomprominya, antara tokoh sosialis, nasionalis dan Islam. Perdebatan yang menegangkan, yang dipicu dengan usulan ditetapkan atau dihapuskannya 7 kata juga pasal-pasal yang secara langsung mengistimewakan umat Islam dalam negeri yang multikutlural ini. Melalui beliaulah, perdebatan sengit itu kemudian bisa dihentikan, dan para tokoh terwakili untuk menetapkan bahwa Pancasila adalah dasar negara.[72]

Ia mampu menghantarkan para tokoh yang hadir dalam kesepakatan, terutama pendirian umat Islam yang sangat kuat untuk mempertahankan Piagam Jakarta. Mohammad memiliki pertimbangan obyektif dan subyektif dalam hal ini. Pertimbangan obyektif Hatta adalah karena adanya laporan dari intelejen Jepang yang mengatakan bahwa Indonesia Timur tidak akan ikut bergabung dalam NKRI, apabila 7 kata tidak dihapus dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945. Sementara pertimbangan subyektifnya adalah mendalamnya penghayatan Hatta tentang makna demokrasi selama tinggal di Eropa. Selain itu bahwa pencantuman kalimat "syariat Islam" sebetulnya merupakan bentuk diskriminatif terhadap ajaran atau agama lain.[73]

Secara subjektif, apa yang Mohammad Hatta lakukan menemukan kesesuaiannya dengan prinsip hidup beliau yang sangat sosialis. Beliau pernah berkata:

"…,bahwa kedaulatan ada pada rakyat,Segala Hukum (Recht, peraturanperaturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralaskan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi

---

[72] Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam;Menangkap Makna Maqasid al-Syar'iyah,* …, h. 54.

[73] Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konsultan*, Jakarta: Buku Kompas, 2010, h. 33-34

sendi pengakuan oleh segala jenis manusia yang beradab, bahwa tiap-tiap bangsa punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri."[74]

Kalimat-kalimat secara langsung mengantarkan pada kepribadian Mohammad Hatta yang sangat dekat dengan rakyat. Besar rasa pedulinya, sehingga meskipun beliau muslim, dan muslim adalah mayoritas di Indonesia, beliau tetap tidak egois hanya untuk muslim saja, tapi mempertimbangkan kebahagiaan rakyat Indonesia, walaupun mereka minoritas.

Mohammad Hatta memang terkenal dengan sosok yang sangat konsisten mempertahankan persatuan bangsa. Selain memberikan dorongan kuat agar Indonesia bagian timur tetap berada dalam wadah NKRI, banyak hal lain yang mengisyaratkan bahwa beliau memang sosok yang selalu mengalah demi persatuan. Anhar Gonggong dalam kajian Satu Abad Bung Hatta, menyebutkan beberapa contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa Mohammad Hatta mengalah demi persatuan. Misalnya ketika Mohammad Hatta mengidamkan negara federasi, namun beliau tidak bersikukuh mempertahankannya, karena tidak mau bangsanya terpecah. Astrid S. Susanto Sunario menambahkan bahwa beliau bisa memahami alasan Mohammad Hatta mengundurkan diri saat pembubaran konstituante 1945, karena beliau tidak mau berkelahi. Beliau tidak mau memecah bangsa ini. Beliau walaupun terkadang berbeda pendapat dengan Ir. Soekarno, tetapi selalu berusaha untuk menyatukan pendapat.[75]

Hari ini, bangsa yang berbeda-beda itu sudah disatukan dalam satu wadah, yang bernama Pancasila. Sangat wajar sekali jika Mohammad Hatta membenarkan bahwa Pancasila harus "disakralkan" dan "tidaklah kena" bila Pancasila dengan seenaknya dijadikan predikat bagi hal-hal yang tidak sesuai. Karena beliau memahami dan merasakan langsung betapa sulitnya menemukan kesepahaman langsung bangsa ini. Maka jika hari ini ada yang merubah atau mengganti Pancasila ke arah manapun, jelas mereka tidak

[74] Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia; Pemikiran Politik Bung Hatta* , …, h. 198

[75]Litbang Kompas, *Mohammad Hatta, Tekad Mempersatukan Bangsa,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019, h. 4

meresapi sejarah, dan mereka tidak memiliki niat yang baik, karena mereka akan kembali membawa perpecahan bangsa yang sudah disatukan oleh keringat para pendirinya.

3. Kebangsaan dalam Perspektif Ki Bagus Hadiekusuma

Ki Bagus Hadikusumo memiliki nama kecil R. Hidayat. Beliau lahir pada tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1038 H/1890 M. Beliau bukan orang yang memiliki latar pendidikan tinggi, hanya lulusan dari SR jaman Belanda. Namun kegigihannya dalam mempelajari al-Qur'an dan kitabkitab penting dalam agama Islam, membuat beliau pantas untuk melangsungkan pembelajarannya di Makkah. Ki Bagus Hadikusumo sudah meniti karir sejak masa Belanda, beliau pernah menjadi penyusun Mahkamah Tinggi Islam di Hindia Belanda. Pada tahun 1942M-1953M menggantikan K.H. Mas Mansur sebagai ketua umum PP Muhammadiyah dan pada tahun 1945 M, beliau diangkat menjadi anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau PPKI. Di sinilah bisa dilihat betapa kental keislaman Ki Bagus Hadikusumo.

Ki Bagus Hadikusumo menjadi ketua tabligh pada masa kepempinan KH Ahmad Dahlan. Beliau juga diberikan mandat menjadi ketua Majelis Tarjih pada masa kepemimpinan KH. Ibrahim (1923- 1932). Pada tahun 1926, beliau juga ditugasi sebagai anggota Tim MPM Hoofdbestoor Muhammadiyah yang bertugas untuk melengkapi keputusan kongres Muhammadiyah ke 15 dalam bidang pendidikan. Karir puncak Ki Bagus Hadikusumo di Muhammadiyah adalah ketika beliau menjadi ketua umum Muhammadiyah yang ke 5 yaitu pada tahun 1942-1953. Beliau menggantikan KH Mas Mansur yang waktu itu harus pindah ke Jakarta karena harus menjadi pimpinan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat).

Selain itu, ki Bagus juga ikut andil dalam panitia perbaikan kementerian agama yang carut marut pada masa Belanda. Beliau menjadi bagian dari komite perbaikan tersebut, menggantikan posisi KH. Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Perbaikan itu memang atas usul seorang

orientasil bernama Snouck Hugronje. Namun Ki Bagus Hadikusumo dan kalangan muslim lainnya berpikir bahwa hal tersebut merupakan sebuah kesempatan untuk memperkuat supremassi hukum Islam.[76] Ketika beliau memimpin Muhammadiyah, banyak hal yang beliau lakukan, di antanya beliau telah membuat mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang isinya adalah pokok-pokok pemikiran KH. Ahmad Dahlan. Mukadimah Angaran Dasar ini yang menjadi pijakan Muhammadiyah dalam melaksanakan perjuangan dan amal usaha.

Pada masa Jepang, beliau lah yang keras menentang perintah Jepang agar umat Islam melakukan upacara sekkrei. Upacara ini jelas bertentangan dengan akidah umat Islam, karena berisi ritual harian yang mengajarkan manusia agar membungkukkan badannya setiap pagi kea rah matahari terbit sebagai symbol penyembahan pada dewa matahari, yang menurut Jepang, telah menitis pada tubuh kaisar mereka yaitu Tenno Haika.[77] *Sekkrei* mendapatkan tentangan keras dari Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawannya di Muhammadiyah, terutama dari kalangan ulamanya. Bahkan ulama Muhammadiyah menggariskan bahwa sekkrei dihukumi haram.[78] Sementara di Sumatera, sekrei mendapat tantangan keras dari Syeikh Abdul Karim (ayah buya Hamka). Setelah mengadakan perundingan dengan tokoh Muhammadiyah lain, Ki Bagus Hadikusumo akhrinya membuat pengumuman bahwa *sekrei* haram untuk umat Islam.

Akibat pengumuman ini, Ki Bagus Hadikusumo dipanggil oleh Gunseikan atau Gubernur Militer di Yogyakarta. Ki Bagus Hadikusumo dan anggota Muhammadiyah lainnya menjadi cemas dengan surat panggilan tersebut, namun setelah Ki Bagus Hadikusumo melaksanakan shalat

---

[76] Lukman Hakiem (editor), *Dari Muhammadiyah untuk Indonesia; Pemikiran dan Kiprah Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, dan KH. Abdul Kahar Mudzakkir*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2013, h. 42-62

[77] Floriberta Aning S, *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia; Biografi Singkat Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia Abad 20*, Yogyakarta: NARASI, 2007, h. 105-107

[78] Nashruddin Anshori, *Rekam Jejak KH Ahmad Dahlan,* Yogyakarta: Bangkit Publissher, 2007, h. 128

semalaman dan memasrahkan diri pada Allah SWT dan shalat dua rokaat di siang hari –setibanya di alun-alun, beliau resah lalu kembali ke rumah dan shalat dua rakaat-, beliau memantapkan diri, ia datang seorang diri untuk menjelaskan pada *Gunseikan*.

Gunseikan menanyakan perihal pengumuman yang disiarkan Ki Bagus Hadikusumo kepada umat Islam. Ki Bagus Hadikusumo dengan tegas dan logis memberikan penjelasan tentang adanya larangan bagi umat Islam melakukan *sekkrei. Gunseikan* dapat memahami penjelasan tersebut. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, tidak dilakukan lagi sekkrei bahkan Muhammadiyah mendapatkan perhatian tersendiri dari Jepang. *Muhammadiyah* pusat diberikan nomor telp untuk bisa berkomunikasi langsung dengan tentara Jepang, jika suatu saat dibutuhkan.

Selain itu, banyak juga dari putera Muhammadiyah yang diangkat mejadi PETA (Pembela Tanah Air). Di antaranya adalah, Muhammad Yunus, Kasman Singodimerjo, Sutalaksana, Iskandar Idris, Sudirman, Moh. Saleh, Onjo Martojemuno, Mulyadi Joyomartono, Kyai Idris dan Abdul Mukti. Banyak pula pemuda Muhammadiyah yang dilatih menjadi *Cu Dan Co atau Co Dan Cu.* Pengalaman-pengalaman pemuda Muhammadiyah dalam bidang militer ini tentu saja sangat bermanfaat di suatu hari bagi bangsa dan negara. Semua itu tidak terlepas dari sosok Ki Bagus Hadikusumo yang berani membela keyakinannya sendiri, sesuatu yang tentu saja membuat kagum orang-orang Jepang.[79] Apa yang dilakukan Ki Bagus Hadikusumo, beliau sendiri menyadari bahwa hal tersebut sangat membahayakan. Namun beliau tidak mau membawa orang lain terlibat dalam urusan yang berbahaya itu, oleh sebab itu, ketika menghadap Jepang, beliau tidak mau ditemani oleh siapapun, agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka biarlah itu akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Sebuah tindakan patriotis, ksatria yang patut dicontoh oleh generasi muda bangsa ini. Bahwa bekerjasama dengan siapapun boleh

[79] Syarifuddin Jurdi (ed.), *1 Abad Muhammadiyah; Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan*, Jakarta: Kompas, 2010, h. 113-115

saja, namun bukan berarti harus mengiyakan semua hal. Segalanya harus tetap berdasarkan pertimbangan.

Dari sepintas perjalanan hidup Ki Bagus Hadikusumo, sepertinya sudah bisa diambil gambaran arah pemikiran beliau. Dari mulai latar belakang pendidikan, sampai beliau mencoba untuk mengokohkan supremasi hukum Islam di peradilan agama pada masa Belanda, juga bagaimana anti nya beliau terhadap perintah jepang untuk mengikuti adat jepang (*sekkrei*), dan posisi beliau yang juga pernah membuat Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Semua pemikiran tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat kental dengan keislamannya.

Kentalnya pemikiran Ki Bagus Hadikusumo dalam keislaman, terutama dalam pemberlakuan syari'ah Islam sudah dimulai sejak tahun 1920an, bahkan mungkin lebih awal lagi, bukan dimulai sejak keterlibatannya dalam BPUPKI. Perjuangan nya dalam menegakkan syari'ah Islam dalam masalah waris pada masa Belanda, adalah bukti bahwa ia sudah berpikir tentang penegakan syari'ah lebih awal, meskipun kemudian hal tersebut ditolak oleh pemerintahan Belanda, sehingga yang berlaku kemudian adalah hukum adat Keikutsertaan Ki Bagus Hadikusumo dalam pembentukkan Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1939, memperkuat citra nya sebagai sosok yang menginginkan terealisasinya syari'at Islam dalam formalitas negara secara menyeluruh.[80]

Puncaknya, adalah ketika Ki Bagus Hadikusumo terpilih sebagai anggota BPUPKI dalam melakukan perumusan dasar negara. Bagi Ki Bagus Hadikusumo, al-Qur'an memberikan sinyal yang kuat bahwa tata kehidupan harus mendapatkan perhatian serius. Dari 6236 ayat al-Qur'an, hanya 600 ayat saja yang membicarakan tentang ibadat dan akhirat, sementara sisanya mengenai tata negara. Maka pemikiran sekuler, bagi beliau sama sekali tidak ada landasannya atau bertentangan dengan ajaran Islam.

[80] Syarifuddin Jurdi (ed.), *1 Abad Muhammadiyah; Gagasan Pembaharuan* ..., h. 113

Menurut Ki Bagus Hadikusumo, terdapat lima firman Allah SWT yang bisa dijadikan sebagai dasar atau sumber inspirasi mengenai negara, yaitu:

1. Perintah Allah SWT agar bersifat adil dan berbuat baik (Qur'an Surat al-Nahl ayat 90.[81]

﴿ ۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾ ﴾

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S. al-Nahl: 90)

2. Perintah Allah SWT agar menghukumi perkara manusia dengan adil Qur'an Surat al-Nisa ayat 5.[82]

﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٥﴾ ﴾

Terjemahan: *Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*

3. Perintah Allah SWT agar rakyat bermusyawarah dalam urusan mereka Qur'an Surat ali Imran ayat 157.[83]

﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

[81] (Q.S. al-Nahl: 90)
[82] (Q.S. al-Nisa: 5)
[83] (Q.S. ali Imran: 157)

Terjemahan: *Sungguh, jika kamu gugur di jalan Allah atau mati,133) pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) daripada apa (harta rampasan) yang mereka kumpulkan.* (Q.S. ali-Imran: 15)

Maksudnya adalah meninggal di jalan Allah Swt. bukan karena peperangan.

4. Perintah Allah SWT agar rakyat memusyawarahkan perkara mereka oleh mereka sendiri Qur'an Surat Al-syuara: 38.[84]

﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍۙ ﴿٣٨﴾ ﴾

Terjemahan: *Maka, dikumpulkanlah para penyihir pada waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan.* (Q.S. Al-syuara: 38)

5. Khabar Allah SWT tentang tidak adanya pemaksaan dalam beragama, karena sudah jelas antara haq dan batil Qur'an Surat al-Baqarah: 256.[85]

﴿ لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ

بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾ ﴾

Terjemahan: *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Q.S. al-Baqarah: 256).

Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut.

Pada saat perdebatan kosntitusi, arah pandangan Ki Bagus Hadikusumo semakin jelas, beliau mengajukan Islam sebagai dasar negara dengan alasan sebagai berikut:

---

[84] (Q.S. Al-syuara: 38)
[85] (Q.S. al-Baqarah: 256)

1. Alasan normatif. Ki Bagus Hadikusumo menegaskan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan li al-'âlamîn,* maka Islam akan memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat dan negara. Ki Bagus Hadikusumo memperkuat argumentnya dengan menunjukkan ayat-ayat yang berhubungan dengan ekonomi (Q.S. al-Nahl: 14), pertahanan (Q.S. al-Anfal: 60), dan sebagainya.
2. Alasan Histori. Ki Bagus Hadikusumo mengungkapkan tentang kesuksesan Rasulullah SAW dalam menegakkan negara berdasarkan hukum Islam. Selain itu beliau memperkuat dengan realita pahlawan bangsa Indonesia masa lampau, yang mayoritas merupakan muslim, mereka rela bergerak dan berjuang karena didasari oleh iman.
3. Alasan Sosiologis. Ki Bagus Hadikusumo menjelaskan bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia itu mayoritas muslim. Oleh sebab itu, jangan sampai jiwa yang 90 % dari rakyat itu, diabaikan tidak dipedulikan.
4. Alasan Psikologis. Ki Bagus Hadikusumo menghawatirkan kekecewaan umat Islam, jika aspirasi umat Islam tidak didengarkan. Dengan kekecewaan tersebut, umat Islam bisa saja pasif atau dingin tidak bersemangat.[86]

Ki Bagus Hadikusumo, sangat kuat dalam mempertahankan syari'at Islam sebagai dasar negara. Ketika panitia 62 bertemu dalam sidang pleno pada tanggal 14 juli, beliau bahkan mengusulkan agar syari'at Islam dilaksanakan oleh seluruh warga Indonesia, bukan hanya umat Islam saja. Pada tanggal 15 juli terjadi perdebatan yang sangat menarik, bahkan KH. Kahar Muzakkir dan Ki Bagus Hadikusumo dengan nada keras mengusulkan, bahwa jika seandainya saja Piagam Jakarta tidak disetujui, maka lebih baik semua acuan pada agama Islam dihapuskan saja sekalian. Keteganganpun terus meningkat, bahkan sampai Presiden Soekarno dikisahkan tidak bisa tidur menghadapi situasi yang menegangkan itu. Ki Bagus Hadikusumo, termasuk dari empat orang yang diajak bicara oleh Hatta, sehubungan dengan kabar yang tidak baik dari Indonesia

[86] 2Lukman Hakiem (ed.), *Dari Muhammadiyah untuk Indonesia; Pemikiran dan Kiprah Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, dan KH. Abdul Kahar Mudzakkir,* …, h. 63-70

bagian timur, bahwa mereka tidak akan bergabung dengan NKRI, jika masih ada point-point yang mengistimewakan umat Islam, karena berarti mendiskreditkan umat lain.[87]

Kondisi ini mungkin membuat Ki Bagus Hadikusumo luluh hatinya, ditambah lagi pendekatan yang dilakukan oleh kawan sesama muslim (seperti Kasman dan Wahid Hasyim), bahwa keadaan sangat genting, lebih baik menyepakati saja usulan dari kaum minoritas tadi. Hal yang lebih menarik lagi, dalam sebuah referensi dikatakan bahwa yang mengusulkan redaksi "Ketuhanan Yang Maha Esa", menggantikan 7 kata yang dihapus, adalah Ki Bagus Hadikusumo sendiri.[88] Sebuah pemikiran cerdas, yang mampu mengakomodir gejolak pertentangan kaum nasionalis, sosialis dan Islam pada waktu itu. Penerimaan tokoh cerdas yang sangat keras mempertahankan Piagam Jakarta seperti oleh Ki Bagus Hadikusumo, seharusnya menjadi pembelajaran tersendiri, terutama bagi masyarakat Islam fundamentalis, bahwa:

1. Apa yang mereka perjuangkan hari ini, sesungguhnya sudah diperjuangkan oleh orang yang mungkin sekali lebih mapan dan cerdas cara berpikirnya. Namun hal tersebut menemui kebuntuan, karena dihadapkan dengan sebuah realita, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang majemuk.
2. Persatuan dan kesatuan bangsa haruslah diutamakan, dibandingkan dengan kepentingan kelompok manapun.
3. Penerimaan tokoh cerdas yang sangat kuat mempertahankan Piagam Jakarta (Ki Bagus Hadikusumo), sebetulnya menjadi sinyal bahwa penegakan khilafah, Darul Islam Indonesia, Negara Islam Indonesia, NKRI bersyari'ah dan sebagainya, bukanlah hal yang tidak bisa ditawar, apalagi mendesak. Artinya, penerimaan ulama memberikan gambaran bahwa masih ada model

[87] Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara, Yogyakarta: BASABASI, 2017, h. 33.

[88] Floriberta Aning S, *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia; Biografi Singkat Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia Abad 20, …*, hal.107. Namun dalam referensi lain, dijelaskan bahwa yang mengusulkan keTuhanan Yang Maha Esa adalah Wahid Hasyim. Lihat Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, …*, h. 3

lain yang lebih fleksibel, dalam kasus Indonesia adalah ditegakkannya Pancasila sebagai dasar negara.

4. Kebangsaan dalam Perspektif A. Wahid Hasyim

A. Wahid Hasyim merupakan anak laki-laki pertama dari 10 berseudara. Beliau merupakan putera dari Hadrotu al-Syeikh Hasyim Asy'ari dengan Nyai Nafiqah binti Kyai Ilyas. Beliau dilahirkan pada jum'at legi, 5 Rabi'ul awal 1333 H, atau 1 juni 1914 M. Jika dilihat dari silslah ayahandanya beliau masih bertaut dengan Joko Tingkir, sementara jika dilihat dari jalur ibundanya, beliau masih bertaut dengan Jaka Tarub I. Silsilah ayah dan bundanya bertemu pada satu titik yaitu sultan Brawijaya VI.

A. Wahid Hasyim kecil, dikenal sebagai sosok yang cerdas, pendiam tapi ramah, mudah bergaul tapi gampang tersinggung. Beliau sudah menghatamkan al-Qur'an di usia 7 tahun. Lalu kemudian mempelajari kitab *fathul qarib, Minhaj al-Qawîm* dan *Muthmainnah*, ia juga membantu ayahandanya mengajar adik dan anak-anak seusianya. Setelah dewasa, sikap mudah tersinggungnya perlahan hilang. Menurut penuturan beliau sendiri, sikap mudah tersinggungnya hilang sesudah ia membiasakan puasa sunnah selama bertahun-tahun.

A. Wahid Hasyim tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Bahkan dalam pendidikan pondok pesantren pun, beliau bisa dikatakan belajar sangat singkat di beberapa pesantren, hingga akhirnya kembali ke Tebu Ireng, berada dalam bimbingan ayahnya. Selain belajar di Madrasah, beliau juga lebih sengang belajar secara otodidak. Beliau sangat menyenangi kesusasteraan bahasa Arab. Beliau juga mempelajari bahsa Inggris dan Belanda secara otodidak melalui majalah-majalah yang dibacanya. Ada banyak majalah yang menjadi langganannya, di antaranya: *Daulat Rakyat*, *Panji Pustaka, Shaut al-Hijâz, Lathaif al-Musyawarah* dan *Majalah Tiga Bahasa.* Dalam satu hari beliau bisa menghabiskan waktu sekitar lima jam

untuk membaca, dan bacaan yang paling menyentuh hatinya, membuatnya menangis adalah al-Qur'an.[89]

Perjalanan intelektual A. Wahid Hasyim, menghantarkan beliau untuk menunaikan ibadah Haji -pada usia 18 tahun- sambil belajar selama 2 tahun di Makkah. Beliau bersama dengan sepupunya bernama Muhammad Ilyas (yang kelak menjadi menteri agama). Muhammad Ilyas dikenal sebagai orang yang ahli dalam bahasa Arab, maka A Wahid Hasyim banyak belajar dari beliau, sehingga A. Wahid Hasyim Lebih mudah belajar di Makkah dengan bahasa yang dikuasainya. Beliau memang tidak menyandang sedikitpun gelar akademis, namun beliau telah membawa banyak ilmu dalam dadanya.[90]

Setelah pengembaraan intelektualnya, A. Wahid Hasyim melakukan gebrakan di Tebu Ireng. Beliau memasukkan mata pelajaran umum dengan cara membentuk madrasah baru bernama madrasah Nidzhamiyah. Madrasah Nidzhamiyah terus mengalami perkembangan, selain muridnya mulai bertambah pesat, madrasah ini juga terbuka untuk menerima guru dari luar madrasah.

Seiring berjalannya waktu, Hadrotu al-Syeikh sepertinya tidak ingin ada dualisme madrasah di pesantrennya, yaitu Nidzamiyah dan Salafyah (madrasah yang lebih dahulu hadir di Tebu Ireng). Setelah dileburnya madrasah tersebut, A. Wahid Hasyim sudah tidak lagi mengajar di Tebu Ireng, ia lebih banyak sibuk bolak-balik Jombang Surabaya untuk mengurusi organisasi NU. Meskipun demikian, bukan berarti Madrasah Nidzhamiyah hilang begitu saja, karena esensi dari visi nya, sekarang berpindah ke madrasah salafiyah, sehingga madrasah salafiyah bukan hanya menjadi tempat transfer ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum.[91]

---

[89] Miftahuddin, *KH. A Wahid Hasyim Peletak Dasar Islam Nusantara*, Ujung Berung: Marja, 2017, h. 24- 31

[90] Miftahuddin, *KH. A Wahid Hasyim Peletak Dasar Islam* ..., h. 31

[91] Ehwan Kurniawan dkk, *Seri Buku Tempo Wahid Hasyim*,Jakarta: Gramedia, 2011, h. 64-69

Dalam perjalanan karirnya, A. Wahid Hasyim memang memiliki garis karir yang mulus dan cepat. Selain karena keberkahan doa sang ayah, juga memang watak A. Wahid Hasyim yang tangguh. Beliau adalah seorang anak yang berani melakukan terobosan di pesantren ayahnya, dan beliau juga seorang anak yang harus berpikir dahulu sebelum bergabung dengan NU, padahal NU organisasi yang dibentuk oleh ayahnya sendiri. Artinya beliau memiliki karakter yang kuat dan tidak mau didikte. Dengan karakter dan doa yang kuat ini, beliau telah banyak memberikan kontribusi untuk agama dan negara.

Pada tahun 1942, ketika Jepang mendarat di bumi pertiwi dan mendesak Belanda, rakyat Indonesia juga tekan oleh Jepang untuk membantu dalam mengusir Belanda. Dalam kondisi yang membingungkan ini, A. Wahid Hasyim memberikan pandangannya, bahwa Indonesia membantu Jepang sebetulnya dalam rangka melepaskan diri dari penjajahan Belanda, namun sikap Indonesia terhadap Jepang, setelah terlepas dari Belanda, tentu hal yang berbeda yang bisa ditentukan di lain waktu.[92]

Kedekatan A. Wahid Hasyim dengan Jepang bukan karena materi apalagi menjilat Jepang, tapi karena kepentingan bangsa Indonesia, stratergi politik harus dimainkan dalam menghadapi lawanlawan yang kuat secara fisik dan komplit dalam peralatan perang. Buktinya, A. Wahid Hasyim pada pertengahan 1942 memanggil muridnya (Saifuddin Zuhri), untuk membahas perjuangan melawan Jepang. A Wahid Hasyim mengatakan, “mereka memang membebaskan kita dari Belanda, tapi apakah setelah dijajah Belanda, kita merdeka atau dijajah oleh Jepang?” Kepercayaan yang diberikan Jepang untuk mengatur urusan Agama, akan diterima, bahkan meminta Jepang untuk membuat lebih banyak kantor urusan agama di daerahdaerah, sehingga ulama nanti bisa menduduki kantor tersebut yang tujuan akhirnya adalah

[92] Berkat politiknya ini, ia memiliki kedekatan dengan beberapa orang penting Jepang, bahkan ketika Hadrotu al-Syeikh ditangkap, beliau mampu membantu dengan relasinya tersebut. Lebih dari itu, Jepang kemudian paham siapa sebenarnya Hadrotu al-Syeikh Hasyim Asy’ari, sehingga justeru kemudian Hadrotu al-Syeikh diangkat menjadi Shumubucho (kepala jawatan agama pusat).

membangun basis kekuatan pribumi, melalui kantor urusan agama. Kata beliau, kalau sepak bola, mungkin kita kebobolan, tapi kalau kita mampu menendang, kita bisa membalas bahkan bisa memenangkan pertandingan. Musuh menipu kita, dan kita memakai akal, sehingga siapa menipu siapa.[93]

Pada tahun 1945, A. Wahid Hasyim menjadi bagian anggota BPUPKI. Beliau ikut andil dalam pembentukan NKRI. Keikut sertaan beliau ini yang kelak menjadi perdebatan, apakah beliau termasuk fundamentalis atau nasionalis? Pada tahun 1939, A. Wahid Hasyim ikut memprakarsai terbentuknya MIAI, MIAI memiliki pengaruh besar dan memiliki power dalam pemerintahan Jepang. Jepang bahkan memfasilitasi gedung mewah untuk MIAI, seperti teori kancil yang dikemukakan pada muridnya (Saifuddin Zuhri) sebetulnya MIAI juga bertujuan mengikat Islam dalam satu kesatuan. Sebetulnya beliau hanya satu tahun aktif di MIAI, namun setelah MIAI berubah menjadi MASYUMI, beliau ikut andil kembali bahkan mejadi tokoh penting dalam organisasi tersebut. Selain MIAI dan MASYUMI, beliau juga memprakarsai lahirnya GPII.[94]

Pada tahun 1938, A Wahid Hasyim menyatakan diri masuk dalam tubuh Nahdlatul Ulam. Beliau memang putera pendiri NU, tapi bagi beliau masuk NU pun bukan karena keturunan, tapi karena kesadaran. Oleh karena itu, kehadirannya di NU benar-benar memberikan kontribusi besar terhadap organisasi Islam yang sangat moderat ini. Ketika berlangsungnya muktamar NU ke-12, pada tanggal 1937 di Malang, beliau lah yang berusaha menengahi konflik internal antara Ansor dan PBNU. Pada muktamar NU ke 15 di Surabaya, beliau memegang jabatan sebagai ketua tanfidz, salah satu kontribusi beliau dalam moment ini adalah gagasan menambahkan jumlah madrasah di Indonesia, peningkatan kualitas guru dan materi pelajaran, dan rancangan peraturan rumah tangga perguruan tinggi. Sebetulnya, rancangan ini lah yang menjadi cikal bakal pendirian universitas dan institute agama

[93] Miftahuddin, *KH. A Wahid Hasyim Peletak Dasar Islam* ..., h. 30
[94] Miftahuddin, *KH. A Wahid Hasyim Peletak Dasar Islam* ..., h. 31

Islam di Indonesia. Selain itu, beliau juga mendirikan majalah suluh NU pada 1941, yaitu majalah yang berisi pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia.[95]

Pada tahun 1952, A. Wahid Hasyim juga membidani Liga Muslim Indonesia (LMI). Beliau juga terpilih sebagai ketua dari LMI. LMI menggagas misi persahabatan Indonesia dengan negara Islam di Timur Tengah. Tujuannya adalah mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara Islam dan memberikan pemahaman yang luas tentang kedudukan ulama dalam masyarakat Islam di Indonesia. Ketika LMI menjalankan misi persahabatannya, A. Wahid Hasyim dipanggil ke hadirat Allah SWT. A. Wahid Hasyim, juga pernah menduduki jabatan menteri dalam beberapa kabinet. Dalam kabinet Presidensial menjabat sebagai Menteri Negara, dalam kabinet Syahrir III juga sebagai Menteri Negara, dan pada masa kabinet RIS beliau menjadi Menteri Agama.[96]

Terkait pemikiran A. Wahid Hasyim tentang kebangsaan, ada hal yang sangat menarik. Dua orang putera beliau, yaitu Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan Gus Solah (Solahuddin Wahid) memiliki pandangan yang berbeda. Bagi Gus Dur, A. Wahid Hasyim adalah sosok yang memberikan supremasi Pancasila sebagai dasar negara atas hukum Islam. Gus Dur berpandangan demikian, di antaranya karena melihat sepak terjang sang Ayah, ketika menjadi menteri Agama. Beliau (A. Wahid Hasyim) menerima perempuan sebagai calon hakim agama, bahkan memfasilitasi sekolah mereka. Sementara menurut Gus Solah, ayah beliau merupakan potret yang mengikuti pandangan bahwa syari'at Islam yang menjadi hukum negara, bukan Pancasila, bahkan hukum Islam memiliki kedudukan yang setara dengan hukum yang dibuat parelemen.[97]

---

[95] Miftahuddin, *KH. A Wahid Hasyim Peletak Dasar Islam Nusantara,* …, h. 60-124

[96] Muchotob Hamzah dkk, *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah*, Yogyakarta, LKiS, 2017, h. 149

[97] Miftahuddin, *KH. A Wahid Hasyim Peletak Dasar Islam Nusantara*, …, h. 9.

Perbedaan pandangan ini sangat wajar, ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sesuatu sangat lah mungkin terjadi. Mungkin Gus Solah lebih melihat sepak terjang ayahnya yang mengajukan aturan agar Presiden dan wakil Presiden beragama Islam, juga Islam sebagai agama negara, sementara Gus Dur lebih melihat pada penerimaan ayahnya terhadap hasil musyawarah setelah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan sepak terjang beliau ketika menjadi menteri agama.

Ada redaksi yang jelas, yang mungkin bisa dijadikan pijakan arah pemikiran A. Wahid Hasyim, sebuah kutipan langsung dalam membicarakan keragaman beragama di negara multi kultural ini. Beliau berkata:[98]

> *"Saya melihat bahwa apa yang kita alami sekarang ini, dinamakan orang "krisis politik", sebetulnya dalam pandangan saya itu "krisis kebatinan", "krisis jiwa.". Jadi oleh karena itu, mari kita kembali kepada jiwa kita masingmasing, menggunakan logika kita dengan suatu pengertian yang pasti, bahwa kita semua ini sebagai suatu bangsa, walaupun agama apa juga, kita tetap sebagai suatu bangsa, walaupun ada perbedaan anggapan atau kepercayaan serta paham atau cara pandang hidup, tetapi sebagai bangsa kita hendaknya tidak boleh dipisah-pisahkan oleh macam-macam perbedaan paham, perbedaan cara memandang dan perbedaan kepercayaan".*

Benar, beliau memperjuangkan ruh keislaman dalam pembentukan negara Indonesia. Beliau merupakan tokoh kunci dalam penambahan 7 kata " dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemelukpemeluknya". Beliau juga mengusulkan agar pasal 4 ayat 2 ditambahkan sehingga berbunyi, "yang dapat menjadi Presiden dan wakil Presiden hanya orang Indonesia asli yang beragama Islam". Beliau juga mengusulkan pasal 29 mengenai agama diubah sehingga berbunyi "agama negara adalah Islam". Ajuan-ajuan ini berguguran, demi persatuan. Hal tersebut, berdasarkan pertimbangan atas Informasi dari mantan perwira Jepang yang mengatakan bahwa jika segala hal peraturan yang sifatnya mendiskreditkan agama lain masih ada dalam rumusan negara, maka rakyat Indonesia bagian Timur akan melepaskan diri

[98] Shofiullah (ed.), Revitalisasi Humanisme Religius dan Kebangsaan KH. A. Wahid Hasyim, Jombang: Pesantren Tebu Ireng, t.th. h.6.

dari kedaulatan Indonesia.[99] Penerimaan K.H. A Wahid Hasyim terhadap hasil akhir dari apa yang diperjuangkannya, menunjukkan bahwa bagi beliau hal tersebut bukanlah sesuatu yang final, namun persatuan dan kesatuan adalah hal yang mendesak dan wajib diperjuangkan.

Memang terjadi silang pendapat dalam memahami pemikiran A. Wahid Hasyim, bahkan kedua putranya sendiri (Gus Dur dan Gus Solah) berbeda pendapat (sebagaimana telah dijelaskan). Lebih menarik lagi, dalam buku Miftahuddin dikatakan bahwa yang meminta dihapus 7 kata ("…*dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*") adalah Hadji Ahmad Sanusi dan Ki Bagus Hadikoesoemo, sementara dalam buku Deliar Noer, dituliskan bahwa A. Wahid Hasyim lah yang meyakinkan Ki Bagus Hadikoesoemo untuk menerima perubahan (perubahan Piagam Jakarta, dengan mencoret 7 kata menjadi "ketuhanan Yang Maha Esa") itu.[100] Perselisihan itu tidak akan terjawab, jika hanya memperhatikan pemikiran beliau saat sidang BPUPKI. Karena A. Wahid Hasyim putra bangsa yang pemikirannya tentang kebangsaan, bertebaran mengisi ruang-ruang publik pada masanya.

Menurut A. Wahid Hasyim, nasionalisme dimanapun bersifat tidak bercorak. Pada negeri-negeri yang sifatnya masyarkat demokratis maka nasionalisme bersifat demokratis, namun pada negara feodalis, maka nasiomalise bercorak feoal. Sementara itu di Indonesia, di mana banyak kaum terpelajarnya yang opprtunisten, maka demokrasipun akan bersifat opportunis.

Nasionalisme memang dapat diadopsi oleh negara apapun, namun di Indonesia, menurut Wahid Hasyim harusnya tetap ditopang oleh sendi-sendi agama. Islam, menurut beliau memiliki ruh yang dapat memantik patrotisme bangsa. Selain Islam, beliau juga menyatakan bahwa perastuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa, merupakan yang sangat mutlak dibutuhkan untuk

[99] Miftahuddin, *KH. A Wahid Hasyim Peletak Dasar Islam Nusantara*, …, h.71-83 .
[100] Miftahuddin, *KH. A Wahid Hasyim Peletak Dasar Islam Nusantara,* …, h. 77.

menopang nasionalisme. Maka dapat dipahami bahwa beliau menolak rasa kesukuan dan primordialisme, karena akan meghambat nasionalisme.

Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa bentuk konkrit dari nasionalisme adalah semangat dari sebuah kesadaran yang sebenarbenarnya, yang timbul dari kaum terjajah seperti Indonesia, agar mampu bangkit dan berusaha untuk melepaskan diri dari tindak penjajahan. Menurut beliau, dalam konteks ke Indonesiaan, bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah didapatkan jika hanya mengemis pada kemurahan bangsa lain, kemerdekaan itu terwujud karena perjuangan.

Dalam buku yang berjudul *"Pendidikan Ketuhanan"*, A. Wahid Hasyim pernah menyinggung nasionalisme. Beliau mengatakan bahwa nasionalisme merupakan sebuah kunci perjuangan bagi negeri terjajah, di mana rasa mendahulukan sesuatu yang sifatnya bertalian dengan bangsanya.[101]

Penerimaan A. Wahid Hasyim terhadap Pancasila semakin jelas, ketika beliau menjelaskan alasannya menerima Pancasila kepada muridnya (Saifuddin Zuhri). Beliau berkata:[102]

> *"Pertama situasi politik dan keamanan dalam permulaan Revolusi memang memerlukan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, sebagai golongan minoritas mereka memang dapat melakukan politik ofensif bahkan disertai tekanan politik (chantage) seolah-olah ditindas oleh golongan mayoritas. Sebagai golongan yang paling berkepentingan tergalangnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi Belanda yang masih mempunyai kaki tangan di mana-mana, para pemimpin Islam dan nasionalis memenuhi tuntutan mereka. Dengan pengertian bahwa kewajiban menjalankan syari'at Islam akan ditampung dalam melaksanakan pasal 29 ayat 2 UUD 45 secara jujur yaitu ayat yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu"*

Dari pemikiran-pemikiran beliau, dapat dipahami beberapa hal, yaitu:

---

[101] Shofiullah (ed.), *Revitalisasi Humanisme Religiud dan Kebangsaan KH. A. Wahid Hasyim*, Jombang: Pesantren Tebu Ireng, 2011, h. 133-135

[102] *Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara*, …, hal. 36

1. A. Wahid Hasyim adalah orang yang sangat mencintai agama, bangsa dan negaranya
2. A. Wahid Hasyim termasuk orang yang sangat keinginannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.
3. A. Wahid Hasyim termasuk orang yang mendahulukan kepentingan bersama (bangsa) di atas kepentingan golongan.
4. Pengajuannya beliau terkait Piagam Jakarta, dan pasal yang menekankan agar Presiden dan wakil Presiden beragama Islam, juga pasal yang menekankan agar agama negara adalah agama Islam, menunjukkan bahwa secara pribadi sebetulnya beliau sendiri menginginkan agar Islam mendominasi sistem negara
5. A. Wahid Hasyim sudah meyakini bahwa Pancasila sebagai solusi final bagi kombinasi keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

Point-point yang A. Wahid Hasyim ajukan, memang tidak terkabulkan, namun Allah SWT menggantinya dengan hal-hal lain yang seirama dengan eksistensi Umat Islam di Indonesia. Hal-hal tersebut di antaranya: tetap adanya kasultanan-kasultanan Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya hak Istimewa bagi Aceh sebagai serambi Makkah, dan yang paling penting, adanya kementrian Agama di Indonesia, yang mampu menjawab banyak kebutuhan umat Islam dalam masalah Syara'. Bahkan dalam perjalanan sejarah NKRI, bahwa meskipun tidak ada aturan yang mewajibkan Presiden dan wakil Presiden beragama Islam, tetapi pada kenyataannya, yang menjadi Presiden dan wakil Presiden tetaplah dari kalangan Muslim.[103]

Dari semua pemikiran tokoh-tokoh Islam bisa dipahami bahwa merupakan hal yang wajar, jika setiap golongan mencoba memberikan warna golongannya dalam sebuah musyawarah mufakat, seperti perumusan dasar

[103] Shofiullah (ed.), *Revitalisasi Humanisme Religiud dan Kebangsaan KH. A. Wahid Hasyim*, Jombang: Pesantren Tebu Ireng, 2011, h. 134.

negara di Indonesia. Namun hal yang tidak wajar, jika terjadi penghianatan pada sesuatu yang sudah dianggap final. Pancasila sudah final, apalagi ketika ditetapkannya asa tunggal organisasi, maka wajib bagi organisasi manapun di Indonesia, berdasarkan Pancasila.[104]

Ternyata, masih ada sebagian kecil muslim yang menolak Pancasila, baik sebagai dasar negara ataupun sebagai asas tunggal organisasi. Pemberontakan DI TII, NII merupakan potret dari adanya sebagian muslim yang tidak taat dengan kesepakatan hasil musyawarah, , padahal untuk mewujudkan Pancasila, butuh perdebatan panjang, silang pendapat dari berbagai kalangan. Bahkan aspirasikan kelompok ini, sebetulnya sudah disuarakan terlebih dahulu oleh KH. A. Wahid Hasyim dan kawan-kawannya. Namun karena terbentur dengan kemajemukan, hal tersebut tidak bisa dipaksakan, dan memang A. Wahid Hasyim dan kawan-kawan nya juga tidak memaksakan. Jadi jika hari ini masih memperjuangkan Negara Islam di Indonesia atau sejenisnya, seperti NKRI bersyari'ah misalnya, hal tersebut tentu akan ditentang keras oleh orang-orang non muslim. Artinya mereka hanya mengulang sejarah, tidak menambah perbaikan untuk bangsa dan negara.[105]

Selain pemberontakan DI/TII, masih ada pemberontakan lain yang mencerminkan ketidak sepakatan terhadap Pancasila, seperti pemberontakan yang dilakukan oleh G 30 SPKI. PKI juga musuh Pancasila, mereka berebut posisi dengan Islam radikal di Indonesia, sementara NU dan Muhammadiyah, mencoba terus menjadi gawang, menghadapi pemberontakan dua kelompok ekstrim kanan dan eketrem kiri tersebut, sampai sekarang. Bahkan ketika asas tunggal ini didengungkan, maka NU lah yang pertama kali merespon, disusul kemudian oleh Muhammadiyah. Maka wajarlah jika sebagian orang

[104] Shofiullah (ed.), *Revitalisasi Humanisme Religiud dan Kebangsaan*...., h. 134
[105] Shofiullah (ed.), *Revitalisasi Humanisme Religiud dan Kebangsaan*...., h. 134

mengatakan bahwa NU dan Muhammadiyah merupakan gawang Negara kesatuan Republik Indonesia.[106]

Banyaknya negara-negara Timur Tengah, yang di dalam nya terdapat mayoritas muslim, memiliki ulama yang mumpuni, tetapi mereka tidak menggaungkan khilafah, jelas memberikan sebuah kenyataan bahwa khilafah adalah hal yang masih bisa dipertimbangkan. Di antara ulama yang memberikan kelonggaran tentang khilafah, adalah Syeikh Ali Abd Rozak, seorang ulama al-Azhar. Beliau bahkan menegaskan bahwa Agama Islam berlepas diri dari khilafah. Khilafah bukan bagian dari Islam, tetapi bagian dari perpolitikan, tidak ada urusan agama di dalamnya. Tidak ada perintah dalam Islam untuk mendirikan khilafah dan tidak ada larangan mendirikannya. Islam membiarkannya agar kita kembali pada hukum-hukum akal, percobaan umat dan kaidahkaidah perpolitikan. [107]

Dalam konteks keindonesiaan, salah satu organisasi yang sangat kental dengan nilai ke bangsaan adalah Nahdlatul ‘ulama (NU). Melihat wacana khilafah yang semakin intens, yang justeru akan menimbulkan perpecahan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam Musyawarah Nasional Alim ulama di Jakarta, yaitu pada tanggal 1-2 november 2012, memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pada point ke 3, NU menegaskan bahwa Islam tidak menentukan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi pemeluknya. Umat diberikan kebebasan sesuai dengan konteks zamannya, yang terpenting adalah adanya perlindungan dan jaminan negara bagi masyarakat dalam mengamalkan ajaran agamanya, serta menjadi tempat yang konsdusif bagi kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan. Pada point ke 4, NU menegaskan bahwa khilafah, merupakan fakta

[106] Ketidak sepakatan sebagian dari organisasi Islam terhadap Pancasila, tentu dilandasi dengan keyakinan, bahwa khilafah merupakan sebuah kewajiban. Sementara organisasi Islam yang memahami Khilafah bukan sebuah kewajiban, atau memiliki pandangan yang berbeda tentang khilafah, mereka tentu bisa mudah menerima Pancasila sebagai dasar Negara.

[107] ‘Alî ‘Abdu al-Râzaq, *al-Islâm wa Ushul al-Hikam*, cet. 3, 1925, h. 103

sejarah, yang memiliki model yang sesuai dengan eranya, yaitu masa di mana masyarakat dunia, belum berada dalam naungan Negara negara bangsa (*nation state*). Maka dengan kondisi sekarang, khilafah sudah tidak menemukan relevansinya, bahkan membangkitkannya adalah sebuah utopia belaka. Pada point ke 5, NU juga menegaskan bahwa NKRI merupakan has ail perjanjian luhur kebangsaan. NKRI dibentuk sebagai wadah kemajemukan, oleh karena itu wajib mempertahankan keutuhan NKRI, dan setiap upaya yang akan mengancam keutuhannya wajib pula ditangkal, karena akan menimbulkan *kemafsadatan*.[108]

Memperhatikan pemikiran para tokoh, dan sejarah pembentukan negara Indonesia, semestinya bagi kaum muslimin, lebih dari cukup untuk mengedepankan kepentingan bersama bangsa Indonesia. Kutipan langsung Pidato Soekarno pada Isra' mi'raj 13 april 1953 di Istana negara, semoga menambah arti penting persatuan sebuah bangsa:[109]

> *"Sudara-saudara tahulah. Pancasila ini sudah satu kompromis yang laksana kita meminta kita punya darah dan air mata. Siapa yang membuka sejarah terutama sekali pada bulan juli 1945, satu bulan sebelum proklamasi Indonesia berkumandang di angkasa. Siapa yang membukanya kita punya musyawaratmusyawarat, kita punya perdebatan-perdebatan, kita punya pertikaian satu sama lain, bahkan kita punya pada waktu itu, hampir menjadi kita punya penuh kebencian satu sama lain, akan mengerti bahwa Pancasila sudah satu kompromis. Pada waktu itu dalam sidang badan yang dinamakan dokuritsu Zumbi cosakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemardekaan Indonesia, pada waktu itu pemimpin-pemimpin Islam duduk denan pemimpin-pemimpin nasional dengan pemimpin-pemimpin sosialis. Pada waktu itu mula-mula bicara tenang-tenang, pada waktu itu makin berkobar-kobar, pada waktu itu hampir pecah persatuan nasional kita. Pada waktu itu, kalau pecah tidak mungkin proklamasi 17 agustus 1945. Pada waktu itu aku ada, Kyai Maskur ada, Ki Bagus Hadikusumo ada, pemimpin-pemimpin Islam lain ada. Saudara Abdul Kahar Muzakir ada, saudara Khaerul Saleh ada, Muhammad Yamin ada. Pemimpin-pemimpin dari seluruh Indonesia*

[108] Ulil Hadrawi, "Khilafah dalam pandangan NU", dalam *https://bit.ly/2L7Wsxv*, diakses pada 8 Januari 2024

[109] PSP UGM, Prosiding Kongres Pancasila IV; *Strategi Pelembagaan NilaiNilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta: PSP UGM, 2012, h. 45

> *berkumpul membicarakan akan dasar-dasar negara yang diproklamirkan. Alangkah berbahayanya situasi pada waktu itu, tetapi Allah SWT, saudarasaudara, memberi ilham memberi Taufiq Hidayat akan persatuan kita, memberi, menjelma satu dasar yang bisa disetujuinya, yaitu dasar Pancasila, yang sampai di dalam tiga Undang-Undang Dasar RI tidak akan pernah terangkat. UndangUndang Dasar RI Yogyakarta, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar sementara RI sekarang ini. Pancasila tetap terpegang teguh, ialah karena Pancasila adalah sudah satu kompromis yang dapat mempersatukan golongangolongan ini. Maka oleh karena itu, saudara-saudara insyaf dan sadarilah keadaan yang berbahaya di dalam bulan juli 1945 itu. Jangan kita, saudarasaudara mengalami lagi keadaan yang demikian itu. Jangan pecah persatuan kita. Dan jikalau pecah persatuan kita. Dan jikalau kukata "pecah persatuan kita" kalau aku berkata demikian, itu berarti pecah, gugur, meledak, musnah negara kita yang telah kita perjuangkan selam ini dengan penderitaan, dengan segenap penderitaan dan segenap korbanan-korbanan yang hebat-hebat. Kembalilah kepada persatuan. Aku sama sekali –sebagaimana tadi kuulangulang- tidak pernah melarang sesuatu orang mempropagandakan ideologinya. Tapi ingat persatuan mutlak, persatuan mutlak, persatuan mutlak, jangan dirungcing-runcingkan".*

Apa yang disampaikan Soekarno, merupakan pelajaran yang mendalam, bagi siapapun yang ingin mengubah Pancasila. Ingat, bahwa di sana -ketika persiapan kemerdekaan- berkumpul tokoh-tokoh bangsa dari golongan Islam, nasionalis juga sosialis. Mereka tokoh-tokoh handal, mendalam, memiliki keyakinan yang teguh atas ideologinya, oleh sebab itu mereka hampir pecah untuk mempertahankan ideologi masing-maing. Tetapi atas berkat rahmat Allah SWT, jalan tengah pun ditemukan, sehingga mereka kembali bersatu untuk Negara Kesatuan Indonesia. Maka siapapun yang ingin mengubah Pancasila, ke arah manapun, artinya mereka ingin mengulang sejarah yang nyaris menimbulkan perpecahan bangsa, namun tentu dengan rasa persatuan yang lebih rendah pula, karena tidak merasakan langsung pahitnya menjadi negeri jajahan, sehingga perpecahan bahkan peperangan sangat lebih mungkin terjadi di antara anak bangsa, dibandingkan dengan perpecahan saat perumusan Pancasila dulu.

D. Kajian Terdahulu

Dalam penyusunan Tesis ini yang digunakan adalah dokumen-dokumen tertulis yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Langkah ini dimaksud agar dalam proses penulisannya dilakukan kepada kepustakaan yang sudah ada sehingga dapat dijadikan acuan dalam upaya melengkapi penulisan tesis ini. Seperti penelitian Tesis yang dilakukan oleh *Ridho Putra* (2019) tentang 'Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif'. Dijelaskan Ahmad Syafii memberikan tafsir ulang teks agama (Islam) supaya agama disikapi dan dipahami oleh penganutnya, esensi dan substansi agama itu sendiri. Tentunya bermuara pada: semakin sehatnya sikap toleransi di tengah-tengah umat beragama. Supaya sikap toleransi umat beragama tetap terjaga, menurut Syafii, masyarakat yang hendak dibangun haruslah: terbuka, demokratik, toleran, dan damai. Empat ciri utama ini menurut hemat Buya haruslah dijadikan acuan bagi semua gerakan pembaharuan moral dan pembaharuan masyarakat Islam di muka bumi ini. Islam amat mendambakan terwujudnya sebuah bangunan masyarakat yang berwajah ramah dan anggun.

Tesis *Endah Ayuningtyas A.* (2014) berjudul "Pendidikan Islam dalam Pemikiran Ahmad Syafii Maarif". Membahas tentang konstruksi pemikiran pendidikan Islam Ahmad Syafii Maarif (ASM) mengenai pendidikan Islam yaitu pertama, hakikat manusia yaitu makluk yang seimbang dan otonom; berakal; wajib beramal shaleh (berkarya dan berprestasi); makhluk yang beragama; dan memiliki ketinggian moral/etika. Kedua Pandangannya tentang hakikat pendidikan Islam menuntut implementasi integrasi ilmu dan integrasi pendidikan. Ketiga, tujuan pendidikan Islam menurut ASM adalah mewujudkan manusia beriman yang memiliki keunggulan intektual melalui penyatuan kebudayaan dzikr dan fikr (refleksi dan penalaran), kaya dalam amal (karya dan prestasi) serta anggun dalam moral dan kebajikan (hikmah). Keempat, seorang pendidik seharusnya memiliki intelektualitas yang unggul. Dengan demikian kelima, kurikulum pendidikan Islam haruslah dirancang dengan memperhatikan potensi-potensi kemanusian, hakikat pendidikan serta tujuan pendidikan Islam itu sendiri.

Keenam, sedangkan metode pembelajaran dalam kegiatan pendidikan Islam yang ditawarkan adalah metode kritis-reflektif.

Tesis *Junaidi* (2016) berjudul Teologi Islam (Studi Pemikiran Ahmad Syafii Maarif). Teologi Islam dari seoarang Maarif ditatap dengan tiga pemetaan yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang ditempatkan secara hierarki. Adapun basis ontologinya: pertama, keberadaan realitas metafisik di balik yang fisik merupakan basis ontologis yang fundamental terutama ketika Maarif mengkritik corak materialisme dan sekulerisme yang melanda masyarakat. Kedua, pembacaan terhadap realitas sejarah sosial peradaban umat Islam. Pembacaan ini merupakan aspek ontologis yang berperan mengkondisikan langkah ke mana dan bagaimana seharusnya umat Islam hari ini bergerak, khususnya umat Islam Indonesia. Ketiga, yaitu suasana keindonesiaan yang men-psikologis pada diri Maarif, baik secara langsung maupun tidak, baik disadari Maarif maupun sebaliknya.

Skripsi *Indri Yani* (2023) berjudul "Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Politik Islam di Indonesia". Menjelaskan bahwa agama Islam memiliki hubungan dengan politik, beliau tidak memisahkan antara ajaran Islam dan politik. Politik menurutnya adalah bagian dari ibadah. Seharusnya negara menjadi instrumentbagi seorang muslim untuk dapat berkiprah kepada masyarakat sebagai bentukibadah. Dan menjadikan prinsip-prinsip dasar Islam sebagai acuan dalam membuat kebijakan politik untuk kepentingan seluruh bangsa, tanpa melihat perbedaan agama dan keyakinan hidup. hubungan Islam dengan kekuasaan haruslah ditempatkkan dalam parameter kualitatif-substansial, bukan parameter kuantitatif–nominal-superfisil, yang dapat sering menyesatkan. Ahmad Syafii Maarif disini dijelaskan juga bahwa Islam sebagai ajaran, tidak diragukan lagi akan mampu memberi arah moral kepada kekuatan-kekuatan sejarah kemanusiaan. Namun, masih diperlukan sekitar dua sampai tiga dekade lagi sampai bumi Islam melahirkan pemeluk-pemeluk yang punya kapasitas moral intelektual yang menyakinkan. Bila ingin melihat Indonesia maju, demokratis,

dan bermartabat di masa depan, maka kita harus berunding dengan Islam yang belum terkontaminasi oleh dosa-dosa sejarah yaitu, Islam Qur'ani dan Islam yang dipraktikkan pada masa dini yang pada saat sistem dinastik belum menghancurkan embrio demokrasi Islam.

Dengan melihat ke empat penelitian sebelumnya, jelas bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan mereka, dimana fokus utamanya adalah memilih sosok Syafii Maarif sebagai objek penelitian. Kesamaan ini tentu akan membantu peneliti dalam menetapkan arah penelitian yang dilakukan, terutama dalam hal tema yang diangkat, yakni relevansi pemikiran kebebasan beragama Ahmad Syafii Maarif terhadap kebangsaan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini berdasarkan pada suatu penelitian literer (literature review) dan studi kepustakaan (library study). Maka sistematika metode yang dipakai adalah:

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu peneliti yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku catatan maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.78 Lebih khususnya penelitian kepustakaan ini adalah penelitian historis faktual mengenai naskah atau buku yang diselidiki dan dianalisis maksud konsep yang ditampilkan dalam buku tersebut.

B. Sumber Penelitian

Guna memperoleh data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan cara memahami literatur yang ada, dan penulis dalam hal ini membagi dua sumber data yaitu:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data langsung dari tulisan Seyyed Hossein Nasr tentang masalah (obyek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Secara sederhana data ini disebut data asli. Data asli (original resources) dalam hal ini adalah buku "*Mencari Autentitas dalam kegalauan* diterbitkan oleh PSAP, Jakarta tahun 2004, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* diterbitkan oleh Mizan, Bandung tahun 2009, *Islam dan Politik Membingkai Peradaban* 1999, *Islam dan Politik; Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin* diterbitkan oleh Gema Insani Press, Jakarta tahun 1996, *Islam dan*

Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante diterbitkan oleh LP3ES, Jakarta thun 1985.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis buku-buku atau jurnal. Karena penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) bukan metode observasi lapangan (field studies). Metode library research adalah tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data infomasi dengan bantuan berbagai macam materi (buku) berkaitan dengan judul thesis ini yang terdapat di Perpustakaan.[110]

Dengan redaksi yang berbeda metode ini tidak hanya sekedar pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi peneliti mencoba menelusuri, menganalisis dan menginterpretasi sesuai data-data yang ditentukan tentang jejak-jejak pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif.

D. Metode Analisis Data

Dari sumber data yang diperoleh peneliti, maka metode yang digunakan untuk menyusun dan menganalisis adalah sebagai berikut:

a. Metode Diskripsi (*Deskriptive Method*)

Metode ini bermaksud untuk menguraikan (mendiskripsikan) masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi dan ide pemikiran tokoh yang bersangkutan.[111] Yang dimaksudkan oleh metode ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ide pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif.

b. Metode Analisis Isi (*Content Analysis Method*)

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis terhadap makna dan substansi ide yang terkandung

---

[110] Hadari Nawawi, "*Metodologi Penelitian Bidang Sosial*", (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995). h. 80.

[111] Anton Bakker, "*Metodologi Penelitian Filsafat*", (Yogyakarta: Kanisius, 1990). h. 65

dalam gagasan pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif secara khusus. Penjelasan lebih detail disampaikan oleh Lindzey dan Aronson yang dikutip Albert Widjaya dalam disertasinya mengatakan content analysis menampilkan tiga syarat yaitu: *Pertama*, obyektifitas, artinya analisis yang dipakai harus obyektif, tidak subyektif yang berlandaskan aturan main (*role of the game*). *Kedua*, sistematis, yakni masing-masing unsur saling berkaitan (*contiusitas*) satu sama lain dalam suatu keseluruhan, maknanya harus memakai kriteria tertentu.[112] Ketiga, general, maksudnya hasil temuan harus mempunyai sumbangan (aksiologi) teoritis, dan mengarah pada realitas hidup dan kehidupan umat manusia secara keseluruhan.Termasuk pada analisis isi ini, akan dipresentasikan bagaimana gagasan itu muncul, hal-hal apa saja yang melatarbelakanginya. Sehingga dengan analisis ini seorang peneliti dapat menghitung frekuensi munculnya konsep (gagasan) secara tepat. Dengan demikian diharapkan analisis dalam penelitian ini.

[112] Sudarto, "*Metodologi Penelitian Filsafat*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 29.

BAB IV
PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas relevansi pandangan Ahmad Syafii Maarif terhadap kebebasan beragama dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

A. Biografi Ahmad Syafi'i Ma'arif

1. Kelahiran

Ahmad Syafii Maarif sering di panggil dengan istilah "Buya" oleh orang yang dekat dengannya. Istilah Buya di ucapkan kepada Syafii Maarif karena ia pantas menyandang panggilan Buya yang memang sudah menjadi ulama yang benar-benar alim, dan juga dikenal sebagai pendidik, sekaligus ilmuwan atau cendekiawan yang mempunyai reputasi intelektual yang sangat tinggi. Namun Ahmad Syafii Maarif sendiri mengatakan "tidak usahlah disebut dengan Buya, cukup dengan nama saja, sebutan Buya masih dipermasalahkan". Kadang Ahmad Syafii Maarif suka memelesetkan dengan kata "Buaya", seolah-olah mencoba menetralisasi atau ingin membersihkan kandungan "karismatik" atau feodalistik" yang dari sebutan khas untuk tokoh Minang itu. Lagi-lagi sikap humanis yang egaliter. Di hadapannya apapun yang berbau "keangkeran diri" diubah menjadi hal wajar, biasa dan bahkan lugu dan polos.[113]

Ahmad Syafii Maarif lahir dari pasangan Ma'rifah Rauf dan Fathiyah pada hari Sabtu, 31 Mei 1935 di bumi Calau Sumpur Kudus "Makkah Darat", Sumatera Barat. Sumpur Kudus "Makkah Darat" (*Makkah Darek dalam bahasa Minang*) adalah ungkapan yang sering diulang-ulang tidak saja oleh kaum elit negeri Minang, rakyat jelata pun tak lupa pula menyebutnya.[114] Secara kultural melambangkan sebuah gerak perlawanan terhadap apa yang bernama kultur hitam Jahiliyah yang dikuasai Parewa (preman) sangar daerah pedalaman.

---

[113] Abd. Rohim Ghazali dan Saleh Partaonan Daulay (editor), *Refleksi 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif Cermin untuk Semua* (Jakarta: Maarif Institute, 2005), h. 37

[114] Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar di Perjalanan Ku* (Yogyakarta: Ombak, 2006), h. 3.

Sewaktu kecil Syafii Maarif tidak ada cita-cita tinggi yang ingin diraih, tidak ada angan-angan untuk jadi apa atau siapa, karena memang lingkungan nagari yang sempit dan sederhana itu tidak mendorong orang untuk menjadi sosok melebihi orang kampungnya. Semasa kecil Syafii Maarif, pengaruh kota belum menjalar di kampungnya, karena televisi saat itu belum lagi ada. Wawasan Syafii Maarif pun hanyalah sebatas nagari Sumpur Kudus. Dalam kehidupan sehari-hari, Syafii Maarif bergaul dengan teman-teman sekampungnya, mengadu sapi, mengadu ayam, mengail, menjala, menembak burung dengan senapang angin milik abangnya dan mengembala sapi.[115]

Ayah Syafii Maarif lahir pada tahun 1900, Ia adalah seorang terpandang di kampung, saudagar gambir, jauh sebelum dia diangkat menjadi kepala nagari tahun 1936. Keluarga Ahmad Syafii Maarif merupakan keluarga terhormat, ayahnya sebagai kepala suku Melayu dengan menyandang gelar Datuk Rajo Malayu yang jabatannya sampai wafat. Secara ekonomi, ayahnya termasuk dalam kategori elit di kampung, tempat masyarakat mengadu tentang berbagai masalah, tidak saja menyangkut masalah ekonomi, juga masalah adat dan lembaga tingkat nagari. Pengetahuan agama ayahnya diperolehnya dengan membaca. Bahkan ayahnya cerdas, semua orang kampung mengakui. Maarif sendiri sering menyaksikan betapa rasa hormat masyarakat kepada ayahnya, pasti datang dengan sikap sopan sebagai pertanda bahwa yang ditemui itu memang layak untuk itu.

Ayah Ahmad Syafii Maarif bersaudara seayah-seibu (Abd. Rauf dan Bailam) berjumlah tujuh; Ma'rifah, Karimah, Siti Dariyah, Saidina Hasan, Bainah, Attudin Rauf, dan Ahmad. Karimah dan Ahmad wafat sewaktu masih kecil, sementara Saidina Hasan wafat pada 1949 di rumah sakit Sawahlunto dalam usia sekitar 32 tahun. Ayah Ahmad Syafii Maarif wafat pada tanggal 5 Oktober 1955, dimakamkan di Tapi Selo, tanah persukuan orang Melayu. Semula ayahnya sakit di Tanjung Ampalu, di tempat ibu tirinya bernama Mak Maran, kemudian etek Lamsiah, ibu tiri

[115] Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar di Perjalanan Ku*, h. 82

Maarif yang lain, memboyongnya ke Tapi Selo sampai ayahnya wafat di sana. Waktu itu ayahnya berusia 55 tahun.[116]

Sementara ibu Maarif bernama Fathiyah lahir di Tepi Balai pada tahun 1905 dan meninggal dunia sewaktu Maarif berusia 18 bulan. Ahmad Syafii Maarif tidak bisa membayangkan seperti apa perawakan ibunya, seperti apa senyumannya, dan seperti apa pula ketika dia menggendong anak-anaknya. Ahmad Syafii Maarif tidak pernah melihat foto ibunya, hal ini menjadi sulit baginya untuk membayangkan sosok ibunya. Ibunya wafat pada tahun 1937 dalam usia sekitar 32 tahun, sempat dua tahun menyusuinya. Maarif tidak sempat merasakan betapa manis atau pahitnya hidupbersama ibunya, orang mengatakan bahwa ibunya cukup cantik, tetapi Syafii Maarif tidak pernah mengenal wajah ibunya.

2. Pendidikan

Dunia awal masa kecil Ahmad syafii Maarif dilewati di kampung halamannya. Pendidikan dasar diperoleh di Sekolah Rakyat (SR) Sumpur Kudus. Selanjutnya Ahmad Syafii Maarif melanjutkan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sumpur Kudus hingga selesai pada tahun 1947. Setelah lulus dari Madrasah Ibtidaiyah, Ahmad Syafii Maarif melanjutkan pendidikan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Balai Tengah, Lintau dan selesai pada tahun 1953. Pendidikan menengah tidak seluruhnya dihabiskan di Lintau, tetapi sebagian dilanjutkan di Yogjakarta dan meneruskan pendidikannya di Madrasah Mu'alimin Yogyakarta. Ternyata datang ke Jawa meneruskan pendidikan tidak semudah yang dibayangkan. Karena ada beberapa alasan dari pihak sekolah untuk menolak Ahmad Syafii Maarif masuk ke kelas empat, yaitu; pertama, kelas empat sudah penuh, kedua, dari seorang guru, Syafii Maarif mendengar bahwa kualitas pelajaran di Yogya lebih tinggi dibandingkan dengan Mu'alimin daerah lain. Jadi Ahmad Syafii Maarif akan mengalami kesulitan bila masuk ke kelas empat. Awalnya Ahmad Syafii Maarif merasa syok, namum Ahmad Syafii Maarif tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudian menganggur, jika tidak mau mengulang kelas tiga. Semua itu dihadapinya dengan

[116] Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar di Perjalanan Ku*, h. 66

tabah, dan mengulang kuartal terakhir kelas tiga Mu'alimin,[117] sehingga akhirnya dapat tamat pada 12 Juli 1956.31 Ahmad Syafii Maarif "mendinamisasikan" dirinya, berkat M. Sanusi Latief, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.[118]

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 1956, Ahmad Syafii Maarif melanjutkan pendidikannya di Surakarta, tepatnya di Universitas Cokroaminoto Surakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) atas bantuan saudaranya.

Namun baru satu tahun kuliah bantuan itu sempat terhenti karena hubungan pulau Jawa dan Sumatera terputus akibat pemberontakan PRRI/Permesta,[119] akhirnya Ahmad Syafii Maarif memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah, kemudian Ahmad Syafii Maarif menjadi guru di desa Baturetno, Wonogiri, Jawa Tengah. Sambil mengajar, Ahmad Syafii Maarif kembali melanjutkan kuliah, karena sering tidak masuk kuliah -karna sering mengajar- akibatnya Ahmad Syafii Maarif hanya tamat Sarjana Muda (BA) pada tahun 1964. Putus sambung kuliah sudah pernah dirasakannya, namun karena motivasi belajar yang cukup tinggi, akhirnya ia berhasil menyelesaikan kuliah, walau harus ditempuh sambil bekerja. Gelar Sarjana (Drs) diperolehnya di Yogyakarta dari FKIS IKIP Yogyakarta pada Agustus 1968 ,[120] dengan skripsi berjudul "Gerakan Komunis di Vietnam (1930-1954)", dibawah bimbingan Dharmono Hardjowidjono, dosen sejarah Asia Tenggara. Untuk temanteman seangkatannya, Ahmad Syafii Maarif adalah lulusan pertama.

---

[117] Titik-Titik Kisar di Perjalanan Ku, h. 106

[118] Suara Karya, Ketua Umum; Muhammadiyah Tetap sebagai Organisasi Sosial (Jakarta: 10 Juli 2000

[119] PPRI adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia,suatu pemerintahan tandingan dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara(dari masyumi)sebagai Perdana Menteri, PPRI di proklamirkan di Padang, tanggal 15 Februari 1958. Pemberontakan ini menuntut otonomi regional, perbaikkan Duumvirate Soekarno dan Hatta, Pembentukan Senat, Penggantian Kepala Staf ABRI Jendral Nasution dan Stafnya, dan pembatasan aktivitas PKI. Permesta adalah Perjuangan Semesta Alam, yang bergabung dengan PPRI yang dipimpin oleh H. N. V.Sumual, Permesta diproklamirkan pada tanggal 2Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara:Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, h. 97-98

[120] Ahmad Syafii Maarif, *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*, h. 172-173

Dalam pengembangan akademika, Ahmad Syafii Maarif berangkat ke Amerika, ia belajar sejarah pada Nothern Illinois University (1973) dan Ohio State University (1980) hingga dapat gelar MA. Di Athens ia tinggal bersama temantemannya dari Malaysia yang juga aktivis MSA (*Muslim Students' Association*) yang masih serba belia, sementara usia Syafii Maarif sendiri sudah di atas 30 tahun. Selama perkembangan pemikiran keislamaan Syafii Maarif di Atheans belum ada perkembangan yang berarti, Syafii Maarif masih terpasung dalam status quo. Masih berkutat pada ajaran maududi, Maryam Jameelah, tokoh-tokoh Ikhwan, Masyumi, dan gagasan tentang negara Islam. Iqbal, pemikir dan penyair dari pakistan pun telah Syafii Maarif ikuti, tetapi ruh ijtidanya belum singgah secara mantap di otak Syafii Maarif yang masih bercorak aktivis, belum reflektif dan kontemplatif. Apalagi Syafii Maarif aktif dalam MSA (*Muslim Students Association*), yang masih merindukan tegaknya sebuah negara Islam di suatu Negeri.[121]

Di lingkungan MSA, ia bergaul dengan teman-teman dari Saudi Arabia, Kuwait, Mesir, Iraq, Libia, Al-Jazair, di samping teman-teman dari Indonesia dan Malaysia. Dari segi moral pergaulan, MSA sungguh bagus, hati-hati, dan saling menjaga. Tidak ada di antara mereka yang larut dalam budaya serba bebas ala Barat. Di Athens ia adalah salah seorang khatib pada hari Jum'at yang diselenggarakan di sebuah ruangan luas di lingkungan kampus. Di Athens, lingkungan pergaulan Syafii Maarif berada di tengah-tengah orang-orang saleh, tetapi hampir sepi dari pemikiran yang memungkinkan kita keluar dari kebutuhan intelektual yang sudah beradab diderita dunia.Muslim. Teori-teori keIslaman yang bertolak dari sikap anti asing ternyata tidak mampu menawarkan solusi bagi masalah modernitas yang semakin sekuler kalau bukan ateistik. Sebuah paradoks berlaku di sini. Para pendukung Maududi, Qutb, yang mengkritik Barat *in toto*, umumnya tidak betah hidup di negerinya sendiri, karena berhadapan dengan penguasa yang korup, otoritarian, dan ulama konservatif. Justru mereka memilih hidup di barat yang dijadikan sasran kritik itu.[122]

---

[121] *Titik-titik Kisar di Perjalananku*, h.209

[122] *Titik-tititk Kisar di Perjalananku*, h.213

Menurut Syafii Maarif, di dunia ini kita tidak boleh memakai kaca mata hitam. Di antara mahasiswa muslim yang datang dari berbagai penjuru dunia, tidak sedikit yang menemukan Islam setelah mereka belajar di Barat. Bahkan sebagian mereka menjadi puritan. Di tanah airnya masing-masing belum tentu mereka mengenal shalat dan praktik-praktik Islam lainnya, di Barat justru muncul kesadara baru untuk mencapai Muslim yang baik. Oleh sebab itu akan lebih bijak bila orang bersikap lapang dada saja, jangan ekstrim anti sesuatu, sebab Barat-Timur itu milik Allah. Kearifan tidak bersifat Barat atau bersifat Timur. Orang bias saja menemukan kearifan itu di mana saja asal di cari dengan sungguh-sungguh melalui hati dan otak yang terbuka semata-mata karena rindu kepada kebenaran. Syafii Maarif pun berkata Islam haruslah senantiasa bersentuhan dengan realitas. Bukan saja bersentuhan,tetapi malah wajib berupaya mengubah realitas yang pengap menjadi sesuatu yang asri, adil, dan penuh rahmat yang dapat diukur dengan parameter apa pun.[123]

Pada tahun 1978 diusia 43 tahun Maarif meninggalkan Athens, Di Ohio inilah ia mendapat MA pada Departemen Sejarah dengan tesis "*Islamic Politics Under Guided Democracy in Indonesia*" (1959-1965) dibawah bimbingan Prof. William H. Frederick, Ph.D, seorang ahli Indonesia dan sejarah Jepang yang teramat baik terhadapnya.

Dari sinilah Ahmad Syafii Maarif mengikuti ke mana tapak kaki melangkah sampai mencapai puncak prestasi akademik, Ph.D (Doctor of Philosophy), dari negara yang mengklaim dirinya sebagai "bapak Demokrasi", Amerika Serikat, tepatnya di University of Chicago (Desember 1983) dalam usia 47 tahun. Tidak mudah bagi Maarif untuk meneruskan belajar ke Universitas Chicago, sekalipun ia sudah diterima untuk program Ph.D dalam Pemikiran Islam. Bantuan sahabatnya M. Amien Rais, sungguh menjadi penting bagi Maarif untuk bisa belajar Islam ke kampus "orientalis" itu. Professor Frederick turut membantunya untuk mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation dan USAID melalui perwakilannya di Jakarta. Akhirnya dengan bantuan banyak pihak, beasiswa itu bisa ia dapatkan. Pada saat-saat

[123] *Titik-titik Kisar di Perjalananku*, h.214

awal itu tidak terbayang dalam otakknya bahwa Chicago akan mengubah secara fundamental sikap intelektualnya tentang Islam dan kemanusiaan. Gelar Ph.D dalam bidang pemikiran Islam diselesaikan pada tahun 1983 dengan disertasi "*Islam as the Basic of State; A Study of the Islamic Political Ideal as Reflected in the Cinstituent Assembly Debates in Indonesia*" dibawah bimbingan Prof. Dr. Fazlur Rahman. Meskipun Syafii dibesarkan dalam tradisi akademik di negara superpower, namun kritiknya terhadap kebijakan politik luar negeri dari negara adikuasa, misalnya Amerika yang dianggap kurang fair dan cenderung "berat-sebelah" terhadap negaranegara Muslim, tak pernah luntur.

Sebelum mencapai "puncak-puncak" di atas, Ahmad Syafii Maarif melakukan perjalanan dan pengembaraan dari satu daerah ke daerah yang lain disertai berbagai interupsi dalam kehidupannya. Antara rantau dan alam, dalam sosok Ahmad Syafii Maarif, selalu terlibat dalam dialog secara terus-menerus disertai dengan sikap kritis "Alam terkembang jadi guru". Proses atau "struktur pengalaman" inilah yang membentuk sosoknya sebagai manusia bebas dan merdeka.

3. Kegiatan

Sebagai anak panah Muhammadiyah, tidak lama setelah tamat Mu'allimin, Syafii Maarif berangkat ke Lombok dalam usia 21 tahun. Syafii Maarif datang ke Lombok Timur pada 19 Agustus 1956 dan mengajar pada 21 Agustus 1956. Ia ditempatkan di kampung Batuyang, di rumah Subki, adik kandung H. Harist yang juga sebagai kepala desa. Ia mengajar pada PGA Muhammadiyah Pohgading yang terletak di pinggir sungai.

Pada tahun 60-an di samping mengajar di Baturetno, Maarif juga mengajar di kota Solo. Di Madrasah Mu'alimat NDM pimpinan pak Duhardi, SMA MIS (*Modern Islamic School*) pimpinan pak Abdul Manna Kadim. Mata pelajaran yang Maarif asuh umumnya sama dengan yang di Baturetno yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Cukup lama Maarif bolak-balik Solo-Baturetno dengan kereta api. Pada saat itu Maarif naik kereta api dari Pasar Pon terus melaju ke Baturetno dengan jarak 52 km. Kereta api Solo-Baturetno adalah kendaraan para pedagang kecil(bakul), anak

sekolah, dan rakyat umumnya. Syafii Maarif termasuk dalam katagori yang terakhir. Semua ini Syafii Maarif jalani tanpa perasaan gelisah yang mengganggu, karena cara inilah satu-satunya jalan bagi Maarif untuk meneruskan kuliah di Solo: Universitas Cokroaminoto.

Pada tanggal 1 Juni 1967 Ahmad Syafii Maarif diangkat menjadi pegawai negeri dengan jabatan asisten perguruan tinggi. Sebagai asisten, Ahmad Syafii Maarif diberi tugas mengajar sejarah Indonesia kuno pada FKIS IKIP Yogyakarta, di samping juga menjadi asisten sejarah Islam pada Fakultas Syariah dan Tarbiyah UII (Universitas Islam Indonesia) Pada tahun 1966 Ahmad Syafii Maarif diterima menjadi sebagai korektor majalah Suara Muhammadiyah (SM), pimpinan alm. H.A. Basuni, B.A dan alm Mohammad Diponegoro. Di samping sebagai korektor majalah, Ahmad Syafii Maarif juga dipercayakan mengurus iklan untuk majalah.[124]

Bakat menulis Ahmad Syafii Maarif banyak disalurkan melalui suara Muhammadiyah. Bermacam topik yang ia tulis, tetapi umumnya menyangkut masalah agama, sejarah, dan politik. Sewaktu bekerja pada Suara Muhammadiyah, ia pun pernah menjadi anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) cabang Yogyakarta. Setelah sekian lama menjadi korektor, posisi redaksi kemudian diberikan kepada Ahmad Syafii Maarif sampai ia berhenti bekerja di sana karena beliau mau berangkat ke Amerika Serikat pada Juli 1972.

Setelah pulang dari Chicago, Maarif kembali ke Indonesia dan mengajar pada jurusan sejarah FPIPS IKIP Yogyakarta (sekarang FIS Universitas Negeri Yogyakarta). Pada tahun 1984 IAIN membuka program Pasca Sarjana. Maarif diminta sebagai salah seorang tenaga pengajar. Tugas ini ia emban selama beberapa tahun. Tahun 1986 selama 100 hari Maarif diminta untuk mengajar studi keislaman di Universitas OIWA. Saat itu Ahmad Syafii Maarif dan Prof. Barnadib, mantan Rektor IKIP, sama-sama berangkat ke Universitas yang sama.

Aktivitas lain Ahmad Syafii Maarif adalah di Muhammadiyah. Sejak tahun 1985 atas dorongan M.A. Rais, Maarif diminta aktif sebagai anggota Majelis Tabligh

[124] Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar di Perjalanan Ku*, h. 173

PP Muhammadiyah yang dipimpinnya. Sebagai alumnus Madrasah Mu'allimin, tentu tidak sulit bagi Maarif untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tabligh ini. Sebelumnya sewaktu bekerja pada majalah SM, Maarif pun pernah menjadi anggota Majelis Pustaka PP Muhammadiyah pimpinan H.A. Basuni, BA. Dalam berkiprah pada Majelis Tabligh ini Maarif mulai berkunjung ke daerah-daerah. Majelis pimpinan M. A. Rais ini sangat aktif dalam menjalankan misi da'wahnya, tidak saja secara lisan, penerbitan pun digalakkan.

Di era Ahmad Syafii Maarif, posisi Muhammadiyah yang mengambil jarak dari semua partai politik dan tidak terlibat pada politik praktis juga kembali ditegaskan. Hal itu terumuskan lewat Tanwir Makassar pada Juni 2003 yang tidak mendukung partai dan calon presiden tertentu. Bahkan, di saat tokoh-tokoh bangsa dan ormas Islam lainnya larut dan tergoda pada perebutan "kue" kekuasaan, Syafii Maarif justru tidak bergeming dan tetap konsisten dengan perannya sebagai pemimpin umat dan guru bangsa. Hal ini tentu saja berangkat dari keyakinan beliau selama ini, bahwa Muhammadiyah pada dasarnya adalah gerakan pemikiran, sosial, dan da'wah. Jadi, Muhammadiyah bukan gerakan politik yang bisa dijadikan untuk dijadikan alat untuk merebut kekuasaan.[125]

Kesan yang diperoleh Ahmad Syafii Maarif dalam menjalankan tugas sebagai ketua PP Muhammadiyah dengan sebanyak mungkin kegiatannya adalah: 1) Muhammadiyah dengan segala kelemahannya masih berada di papan atas. Tapi bila parameter yang digunakan adalah cita-cita al-Qur'an untuk menciptakan sebuah masyarakat Indonesia yang bermoral, Muhammadiyah masih juga berada di awal jalan, suasana seperti ini memang memprihatinkan. Tentu untuk bergerak ke sana merupakan tanggung jawab semua kekuatan bangsa dengan pimpinan pemerintah yang juga harus bermoral. 2) Pada sisi lain Syafii Maarif menggambarkan bahwa isu-isu pembaharuan dikerjakan Muhammadiyah barulah sekedar menyentuh jenis ijtihad pinggiran, sementara jenis ijtihad di luar itu belum disentuh bayak oleh Muhammadiyah. Lebih jauh dikatakan bahwa secara intelektual Muhammadiyah

[125] Abd Rohim Ghazali dan Saleh Partaonan Daulay, *Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif*, h. 116-117

tidak tau betul apa yang harus dikerjakannya.[126] 3) Yang menjadi sorotan adalah karena Muhammadiyah menyebut dirinya sebagai gerakan Islam, gerakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar. Rumusan semacam ini mengisaratkan tanggung jawab yang besar sekali, sementara energi Muhammadiyah lebih banyak terkuras oleh kerja kerja sosial kemasyarakatan. 4) Dalam berbagai forum Syafii Maarif sering mengatakan bahwa di bidang pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah hanyalah sebagai pembantu pemerintah, tidak lebih dan tidak kurang. 5) Muhammadiyah belum mampu menawarkan sistem alternatif, baik untuk pendidikan, kesehatan maupun dalam bidang-bidang kemanusiaan lain yang selalu memerlukan perhatian khusus.

Selanjutnya, Ahmad Syafii Maarif adalah salah seorang yang mempunyai prakarsa untuk mendirikan *Maarif Institute for Culture and Humanity.* Lembaga ini didirikan di Jakarta pada tahun 2002 dan secara resmi berdiri pada tanggal 28 Februari 2003. Adapun salah satu misi *Maarif Institute* adalah memperjuangkan percepatan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi *civil society, legislative* dan eksekutif serta mendorong proses resolusi konflik, mediasi dan rekonsiliasi.[127]

Ahmad Syafii Maarif adalah tokoh yang menghindari politik praktis, Ia menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah lebih kurang tujuh tahun dan tidak pernah terjun ke politik praktis, baik itu menjabat jabatan publik, mencalonkan ataupun bergerak melalui partai politik.

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif merupakan khazanah intelektual yang sangat berharga, karena gagasan-gagasannya tidak dapat dilihat semata-mata sebagai renungan intelektual dari tokoh yang berada di atas menara gading, sebab mereka menulis dalam konteks sebuah pergerakan sosial, keagamaan dan politik di Indonesia dimana beliau terlibat secara intens dan serius sebagai pelaku utama yang bergerak di luar sistem praktis yang mencurahkan segenap perhatiannya sebagai pelaku yang

[126] M. Yunan Yunus, *Teologi Muhammadiyah Cita Tajdid dan Realitas Sosial* (Jakarta: Uhamka Press, 2005), h. 72

[127] Raja Juli Antono, *Laporan Tahunan* (Jakarta, Maarif Institute, 2000-2007), h. 4

menyerukan pergerakan moral dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

4. Proses Perrkembagan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif

1. Fase Pertama: Pembentukan Intelektual

   Pembentukan Intelektual terjadi pada waktu Syafii Maarif belajar Di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Balai Tangan, Lintau, selama menganggur selam tiga tahun pasca Syafii Maarif. Dengan modal pendidikan Mu'allimin, Syafii Maarif telah berani berpidato di depan publik kampong yang jumlahnya terbatas. Bahkan lebih dari itu, Syafii Maarif sudah berani pula memberi ceramah di tempattempat lain. Dengan bekal ilmu agama yang serba sedikit, sebagai pemula, Syafii Maarif telah berani berdebat di masjid menghadapi kaum elit Sumpur Kudus dengan semangat tinggi. Topik perdebatan tidak melebihi masalah-masalah khilafiah di tingkat kampung. Paham agama Muhammadiyah yang telah dipompakan ke dalam otak dan hatinya sejak masih belajar di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sumpur Kudus telah menjadi modal Syafii Maarif untuk berkayuh lebih jauh, sampai ke puncak karier akademiknya.[128]
2. Fase kedua: Pertumbuhan Intelektual

   Pertumbuhan Intelektual terjadi setelah meneruskan pelajaran ke Madrasah Mu'allimin Jogjakarta. Wawasan semakin luas, tetapi nalurinya sebagai seorang "Fundamentalis" belum berubah. Bahkan sampai Syafii Maarif belajar sejarah pada Universitas Ohio di Athens, Amerika Serikat, paham agamanya belum banyak mengalami perubahan. Cita-cita politik Syafii Maarif tetap saja ingin menaklukan Indonesia agar menjadi Negara Islam, padahal batang usianya ketika itu sudah di atas 40 tahun.

3. Fase Ketiga: Perkembangan Intelektual

   Perkembangan Intelektual Syafii Maarif terjadi di lingkungan Kampus Universitas Chicago. Syafii Maarif mengalami kebangkitan spiritual dan intelektual yang baru. Otak dan hatinya mendapatkan "virus" pencerahan. Menurut Syafii Maarif, ini adalah perkembangan pemikiran keislaman dan keindonesiaan. Peran Fazlur Rahman, dengan segala kritiknya kepada sang guru,

[128] Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku, h. x

sungguh sangat besar. Strategi dan pendekatan yang digunakannya agar Syafii Maarif menimbang seluruh kekayaan khazanah Islam klasik dan modern dengan al-Qur'an sebagai sumber pokoknya.[129]

4. Fase Keempat: Pematangan Intelektual

Pematangan Pemikiran Syafii Maarif terjadi setelah ia kembali dari Chicago, Islam bagi Syafii Maarif adalah sumber moral utama dan pertama. Al-Qur'an adalah Kitab suci dengan sebuah benang merah pandangan dunia yang jelas sebagai pedoman dan acuan tertinggi dalam semua hal, termasuk acuan dalam berpolitik. Pasca Chicago pemikiran keindonesiaan dan keagamaan Syafii Maarif telah lebur menjadi satu. Menurut Syafii Maarif Islam yang dianut mayoritas penduduk tidak boleh menang sendiri, saudara-saudara sebangsa dan setanah air tetapi berbeda iman haruslah dilindungi dan diperlakukan secara adil dan proporsional.[130]

5. Karya-karya

Ahmad Syafii Maarif adalah seorang penulis yang produktif, mulai belajar menulis semenjak masih sekolah di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogjakarta tahun 1950-an, diteruskan sampai sekarang setelah batang usianya di atas setengah abad.[131] Sebagian karangannya adalah mengenai Islam. Tulisan-tulisannya diterbitkan pada artikel-artikel yang bertebaran di media masa, seperti surat kabar (Mercu Suar, Abadi, Adil dan Kedaulatan Rakyat), majalah (Panji Masyarakat, Suara Muhammadiyah, Dermaha, Islah, Gatra dan Genta) dan jurnal (Informasi, Sigma Pi Gama dan Mizan).[132] Beberapa bukunya telah diterbitkan oleh penerbit terkenal. Sampai kini, Ahmad Syafii Maarif telah menghasilkan berbagai karya. Segudang "produk pemikirannya", dan jejak langkah yang telah digoreskan, merupakan hasil dari sebuah proses yang panjang, berliku, bahkan penuh onak duri. Kesulitan dan tantangan hidup telah dibacakan sebagai peluang untuk bergerak terus tanpa henti.

[129] Ahmad Syafii Maarif, *Titik-titik Kisar di Perjalananku*, h.xi
[130] Ahmad Syafii Maarif, *Titik-titik Kisar di Perjalanan ku*, h. 404
[131] Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektual Islam*, h. 5
[132] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara* (Jakarta: LP3ES, 2006), h. sampul akhir

Puluhan buku telah lahir dari tangan seorang anak udik yang semula tidak punya citacita besar dan muluk-muluk. Tugasnya sebagai ketua PP Muhammadiyah yang diembannya selama tujuh tahun (1998-2005) telah membawanya ke pusaran perkembangan politik, sosial, dan budaya secara nasional dan internasional. Periode ini adalah titik-titik krusial dalam transformasi republik ini, dan Ahmad Syafii Maarif di antara anak bangsa yang ikut mengambil peran. Di antara karya-karya Ahmad Syafii Maarif adalah:

1. Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan (Bandung: Mizan, 2009).
2. Menerobos Kemelut Refleksi Cendekiawan Muslim (2006). 3. Titik-Titik Kisar di Perjalanan Ku (Yogyakarta: Ombak, 2006).
3. Menggugah Nurani Bangsa (2005).
4. Mencari Autentitas dalam kegalauan (Jakarta: PSAP, 2004).
5. Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik (Jakarta: Cidesindo, 2000).
6. Islam dan Politik Membingkai Peradaban (1999).
7. Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat (1997).
8. Keterkaitan antara Sejarah, Filsafat, dan Agama (Yogjakarta: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, 1997).
9. Islam dan Politik; Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
10. Muhammadiyah dalam Konteks Intelektual Muslim (Bandung: Mizan, 1995). 12. Membumikan Islam (1995).
11. Percik-Percik Pemikiran Iqbal (Shalahuddin Press, 1994).
12. Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia (Jakarta: Mizan, 1994).
13. Islam dan Politik di Indonesia (1988).
14. Al-Qur’an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (Bandung: Pustaka, 1985).
15. Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985).
16. Dinamika Islam (Shalahuddin Press, 1984).

17. Islam, Mengapa Tidak? (Shalahuddin Press, 1984).
18. Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia dalam Aspirasi Umat Islam Indonesia (Jakarta: LEPPENAS, 1983).
19. Mengapa Vietnam Jatuh Seluruhnya ke Tangan Komunis (Yogyakarta: Yayasan FKIS IKIP Yogyakarta, 1975).

Tulisan-tulisan Ahmad Syafii Maarif sampai saat ini masih terus mengalir, terutama yang selalu diterbitkan pada kolom Resonasi Republika (bergantian dengan penulis lainnya). Dan tulisan-tulisannya sangat beragam, tidak hanya tentang keislaman, namun juga mencakup tentang keindonesiaan dan kemanusiaan. Ahmad Syafii Maarif adalah satu dari sedikit cendekiawan Muslim Indonesia yang secara serius memikirkan nasib bangsanya. Melalui tulisan-tulisannya, Ahmad Syafii Maarif ingin berbagi kegelisahan sekaligus mengajak untuk mengatasinya, kepada semua anak bangsa.

B. Kebebasan Beragama Menurut Ahmad Syafii Maarif

1. Pengertian Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan salah satu nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi dan kehidupan berbangsa. Dalam konteks Indonesia, Ahmad Syafii Maarif, seorang muadzin yang humanis, pluralis, dan moderat, adalah salah satu intelektual muslim Indonesia yang terus menyerukan toleransi, keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kebhinekaan. Ahmad Syafii Maarif adalah seorang intelektual dan cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal karena pandangan-pandangannya yang progresif dalam Islam.

Dalam pandangannya, kebebasan beragama melibatkan penghargaan terhadap pluralitas agama. Ia menekankan pentingnya masyarakat yang beragam agama untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan dalam keyakinan keagamaan mereka. Ahmad Syafii Maarif juga menekankan bahwa kebebasan beragama harus diiringi dengan tanggung jawab. Artinya, dalam menjalankan kebebasan beragama, setiap individu juga harus mempertimbangkan hak dan kebebasan orang lain serta menjaga perdamaian dan

harmoni dalam masyarakat. Definisi kebebasan beragama menurut Ahmad Syafii Maarif bisa dilihat dari beberapa karyanya dan pernyataannya yang menggambarkan pemikirannya tentang isu tersebut.

Semasa hidupnya, ia berkomitmen untuk menjaga Indonesia agar tetap harmonis dan damai. Syafii tanpa ragu mengkritik kelompok garis keras yang suka melakukan intoleransi terhadap minoritas keagamaan yang dianggap sesat di Indonesia.

Menurut Syafii Maarif, bumi yang telah dihamparkan Tuhan untuk kepentingan umat manusia berhak dihuni oleh siapa saja. Karena itu kaum teis harus menghormati kaum ateis begitu pula sebaliknya. Antara kaum teis dan ateis perlu diikat oleh sebuah konsensus kemanusiaan, agar masing-masing dapat merasakan hidup damai dan tenteram. Jika salah satu kelompok menganggap lebih unggul daripada yang lain, maka hal itu menurutnya akan merusak perdamaian dunia.[133]

Sikap Syafii Maarif dalam mempedomani Alquran mengindikasikan bahwa ia adalah sosok yang "radikal" secara referensial, tapi di sisi lain ia dapat disebut sebagai pribadi yang "liberal" dalam pemikiran dan gerakan. Sisi yang disebut terakhir menunjukkan keterbukaannya kepada berbagai bentuk pemikiran dan ia tidak merasakannya sebagai sebuah ancaman yang dapat mendangkalkan keimanannya.[134]

Defenisi kebebasan beragama Ahmad Syafii Maarif berarti kebebasan untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kebebasan yang disodorkan Syafii memang berangkat dari pemahaman agama yang ia anut, yaitu Islam.

"Jika saya menyatakan bahwa Islam adalah pilihan terbaik dan terakhir bagi saya, maka hak yang sama harus diberikan sepenuhnya kepada siapa pun yang memiliki

[133] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*...,h. 170

[134] Syafii Maarif mendukung sepenuhnya prinsip kebebasan beragama. Ia menghormati perbedaan tersebut meskipun secara teologis berbeda dengan keyakinannya. Di sini kelihatan jelas bahwa keimanan Syafii Maarif tidak cenderung ternoda apalagi goyah karena keimanan lain, melainkan ia membuka luas hak-hak individu termasuk dalam menentukan keyakinannya.

keyakinan lain. Saya melakukan ini berdasarkan pemahaman saya terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam Surat Al-Baqarah: 256."[135]

Menurut Syafii Maarif, dalam hal kebebasan beragama ternyata Alquran lebih toleran dibanding umat Islam itu sendiri. Ia mengkritik sikap umat Islam yang cenderung intoleran terhadap berbagai perbedaan agama, walau pun Alquran telah memberi tuntunan untuk itu.[136]

Menurut Syafii Maarif, kebebasan untuk menentukan sebuah agama mendapatkan jaminan dari Kitab Suci itu. Hal tersebut tersimpul dalam sebuah kalimat *la ikraha fi al-din* (tidak ada paksaan dalam sebuah agama).[137] Ayat ini diyakini oleh Syafii Maarif sebagai keputusan final dan tidak dapat ditawar lagi. Karena itu, seorang Muslim mesti memahami dan berpegang secara kokoh pada ayat ini dalam relasinya dengan penganut agama lain. Ia menjelaskan bahwa ayat tersebut setidaknya memberikan dua makna: Pertama, seseorang sekali-sekali tidak boleh dipaksa dalam menganut sebuah agama. Kedua, seseorang sekali-sekali tidak boleh dipaksa dalam urusan iman. Bagi Syafii Maarif sendiri, jika secara faktual agama dan iman dipaksakan ke dalam diri seseorang, maka itulah yang disebutnya sebagai "keangkuhan teologis". Apapun bentuk paksaan dalam agama tentu saja bertentangan dengan norma dan kaidah yang ada di dalam Alquran.[138] Bagi Syafii Maarif, siapapun berhak untuk hidup di dunia ini, ateis sekalipun. Asal saja konsensus bermasyarakat tetap dijunjung tinggi.[139]

Sedangkan, menurut Siti Musdah Mulia, kebebasan beragama berarti kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama yang

---

[135] Berdasarkan pendekatan keislaman, Syafii percaya bahwa Islam tidak melarang agama dan kepercayaan orang lain. Ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan "*la ikraha fi al-din*" (tidak ada paksaan dalam beragama) menjadi dasar pandangan ini. Dalam ayat tersebut terkandung dua hal: *pertama*, tidak boleh memaksa seseorang masuk ke dalam satu agama; *kedua*, tidak boleh memaksa seseorang dalam urusan iman.

[136] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*...., h. 167.

[137] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*...., h. 167.

[138] Ahmad Syafii Maarif, "*Alquran sebagai Fundamen Toleransi", kata pengantar untuk buku Zuhairi Misrawi, Alquran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007), xxvii-xxxiii

[139] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*...., h. 167.

dipeluk, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.[140] Definisi yang diberikan keduanya tampak senada. Untuk lebih memperjelas definisi kebebasan beragama, kita sebaiknya melihat ketentuan tentang kebebasan beragama dalam instrumen hak asasi manusia dan regulasi yang ada di Indonesia.

Sementara itu menurut Basyaʻib, kebebasan beragama adalah kebebasan seseorang dalam mengungkapkan keyakinan agamanya tanpa ditekan atau didiskreditkan atas pilihannya tersebut.[141] Dari teori ini maka jika saya memeluk agama Islam, saya bebas untuk mengungkapkan keyakinan saya di mana pun tanpa ada sikap penekanan dari siapapun atas dasar apapun. Agama yang saya anut merupakan agama pilihan sendiri yang tidak boleh seorang pun mendiskreditkannya.

Gamal Al-Banna mengaitkan kebebasan beragama dengan pluralisme. Karena pluralisme berarti membiarkan adanya eksistensi agama-agama di luar agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian ia mengaitkan pluralisme dengan prinsip tauhid, bahwa kebenaran hanyalah ada pada Allah, sedangkan yang lainnya yang beragam hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang ssemuanya merupakan manifestasi Allah. Dengan demikian siapa pun yang meyakini ke-Esa-an Allah maka harus mengakui keragaman eksistensi yang lain, tidak terkecuali keragaman agama.6 Artinya bahwa, kebebasan beragama meskinya menjadi pondasi seseorang dalam beragama. Sheingga tidak menganggap kemungkinan-keumngkinan selain Allah sebagai kebenaran mutlak. Selain itu agar meyakini bahwa hanya Allah-lah yang Esa, sedangkan yang lainnya sudah pasti beragam.

Menurutnya, umat tidak boleh menghabiskan energi hanya berdebat di ruang dari produk hasil ijtihad tersebut, umat diharapkan meluaskan cakrawala religius intelektualnya dan menyibukkan diri mempelajarai Al-Qur'an sebagai pedoman ajaranajaran moral dan etika dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil alamin*.

---

[140] Siti Musdah Mulia, "Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia," dalam Hakim, ed., *Bayang-bayang Fanatisisme; Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish,* h. 228.

[141] Hamid Basyaʻib, *Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal,* Ciputat: Alvabet, 2006, h. 281.

Pesan yang disampaikan Buya di saat ini dirasakan urgensinya, ditengah menguatnya gerakan Islamisme, Islam harus hadir dalam model kualitas daripada kuantitas.Setiap sudut aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi terisi dengan Nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an. Sebagai contoh, sebagai seorang Muslimyang yang soleh tentu harus selaras dengan keshalehan sosial yang tegak atas nilai keadilan, kebenaran, serta terbuka. Selain itu, perlu juga menghadirkan moral solidaritas lintas batas. Seorang Muslim bukan hanya bersaudara dengan Muslim yang lain, tetapi atas nama kemanusiaan dia bersaudara dengan sesama manusia tak perduli apa warna kulit, keyakinannya dan bangsanya.

Sementara itu menurut Arvind Sharma, kebebasan beragama memang sangat penting dijadikan pedoman bagi warga dan bangsa, apalagi dalam konteks negara demokras. Namun demikian yang sulit soal kebebasan beragama adalah bukan dalam hal meyakini dan mempraktikannya, akan tetapi karena adanya sekelompok orang yang justru menolak itu dan menginginkan konservatif dalam beragama.7 Artinya menurutnya, tantangan kebebasan beragama sebetulnya bukan dalam soal perdebatan di ruang diskusi atau ilmiah, akan tetapi ketika dihadapkan dengan masyarakat lain yang berbeda keyakinan atau agama.[142]

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, artikel 18 menyebutkan: "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.

Adapun Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 (e) ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa: 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,

[142] Dikutip dari makalah wawancara oleh portal nurcholishmadjid.org, *Membela Kebebasan Beragama*, tanpa tahun

serta berhak kembali, 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini masih diperkuat lagi oleh Pasal 29 yang berbunyi: 1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.[143]

Selain itu, Undang-undang (UU) RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), terutama Pasal 22, menyebutkan bahwa: 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[144]

Dengan demikian, penulis dapat menarik definisi kebebasan beragama, yang berarti kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk atas pilihan sendiri, dan kebebasan baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum ataupun tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaanya, dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran, yang mana kebebasan tersebut harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

2. Landasan Filosofis

Pancasila memberikan dasar filosofis dan moral bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Sila pertama Pancasila menegaskan prinsip ini. Meskipun seringkali ada interpretasi kontroversial terhadap Pancasila yang menyatakan "sila segala sila", terutama dalam dua hal. *Pertama,* sila pertama dianggap sebagai prinsip yang mencakup aspek spiritualitas di luar agama tertentu, tetapi juga sering dilihat sebagai pandangan formalistik terhadap keberagamaan, bahkan untuk mendukung dominasi hukum dan masyarakat dari agama mayoritas. *Kedua*, sila pertama diinterpretasikan sebagai dasar filosofis yang mengacu pada konsep tauhid, yang

[143] UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 (mkri.id)
[144] UU No. 39 Tahun 1999 (bpk.go.id)

kemudian direduksi hanya untuk mendukung satu agama tertentu di Indonesia, khususnya Islam, tanpa memperhatikan keragaman agama lainnya.[145]

Melewati tahap tersebut, sumber utama untuk memahami dan menafsirkan sila pertama Pancasila adalah pernyataan langsung yang dibuat oleh para tokoh pendiri bangsa dan negara dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Salah satu tokoh utamanya adalah Sukarno. Ketika membahas sila-sila Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 melalui pidatonya yang membangkitkan semangat, Sukarno menyampaikan bahwa:

> Bukan saja bangsa Indonesia harus ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. ..... Marilah semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme agama". Dan hendaknya negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan![146]

Berkenaan dengan penjabaran "Sila Ketuhanan" dalam Pancasila, UUD 1945 memuat beberapa ketentuan yang memberikan jaminan atas hak warga negara untuk beragama/berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap orang, baik warga negara maupun bukan, yaitu Pasal 28E dan Pasal 28I. Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan bagi siapapun untuk memeluk agama/keyakinan dan/atau kepercayaannya secara bebas. Ketentuan tersebut secara implisit mendeklarasikan jaminan konstitusional kebebasan bagi siapapun untuk beragama/berkeyakinan. Pada saat yang sama, setiap orang juga dijamin untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Adanya jaminan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemelukan suatu agama oleh seseorang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya

---

[145] Hafiz, Muhammad dan Hasani, Ismail, 2020, *Kebebasan Beragama dan Pengutamaan Stabilitas PolitiKeamanan di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2019,* Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, h. 3-8.

[146] Bahar, et.al [eds.], 1995, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI,* (Jakarta: Sekretariat Negara), halaman 80-81

sangat esensial.[147] Dalam bahasa yang lebih tegas dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi manusia. Di samping itu, hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.

Hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan yang dijamin oleh Konstitusi Negara sejalan dengan norma universal Hak Asasi Manusia yang menempatkan hak tersebut sebagai non derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sebagai hak yang terkategori non derogable rights, maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.[148]

Seperti diakui Syafii Maarif, bahwa gagasan awal Pancasila itu lahir dari ide Soekarno. Jasa Soekarno dalam merumuskan dasar negara ini tidak tertandingi, meskipun pada tataran praksis nilai-nilai Pancasila tidak ia laksanakan secara konsisten.54 Syafii Maarif terlihat objektif terhadap pemikiran Soekarno ini, di satu sisi ia tidak ingin menghilangkan jasa sejarah yang diberikan Soekarno namun pada sisi lain kritik Syafii Maarif amat tajam kepadanya. Salah satu rumusan Soekarno yang terbilang cerdas untuk Pancasila disampaikan dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 tentang "Internasionalisme atau Perikemanusiaan". Istilah "Ketuhanan yang Maha Esa" juga muncul dari idenya yang kemudian dijadikan sila pertama dalam Piagam Jakarta dengan tambahan anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya."[149]

---

[147] Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi),* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, h. 286.

[148] Selain memberikan jaminan dan kedudukan hak beragama/berkeyakinan sebagai non derogable rights, UUD 1945 juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut yaitu: Pasal 29 UUD 1945 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

[149] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 21.

Pembelaan Syafii Maarif terhadap pemikiran Soekarno dalam konteks ini demikian kuat. Ia menyatakan bahwa pencetus Pancasila pada 1 Juni 1945 bukan yang lain. Syafii Maarif menolak argumen yang menyatakan bahwa Muhammad Yamin merupakan perumus Pancasila itu. Dalam pandangan Syafii Maarif, tidak ditemukan bukti yang cukup kuat akan hal itu. Ia curiga, bahwa ada semacam pemutarbalikan sejarah untuk menghilangkan jejak jasa Soekarno dalam perumusan Pancasila. Hal ini menurutnya diwujudkan dalam gerakan yang ia sebut desukarnoisasi. Bagi Syafii Maarif, Soekarno selain mesti dilihat dari berbagai kelemahannya ketika memimpin Indonesia, ia juga harus dilihat sebagai sosok yang berjasa dalam membangun bangsa ini.[150]

Bagi Syafii Maarif, bangsa ini selalu melupakan jasa para pahlawan yang sudah memberikan pengorbanan begitu besar untuk membangun bangsa. Ia menegaskan, bahwa kepentingan politik destruktif telah dilakukan sekelompok orang untuk itu. Soekarno yang sudah jelas-jelas memberikan pemikirannya yang tidak ternilai harus dilupakan begitu saja. Di sinilah letak kekecewaan Syafii Maarif. Ia juga menambahkan, memang benar kata Pancasila itu bukan berasal dari pemikiran Soekarno, boleh jadi kata itu lahir dari pemikiran Muhammad Yamin. Tapi tidak demikian dengan sila-sila yang ada di Pancasila itu.[151]

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama itu kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Syafii Maarif menjelaskan bahwa perubahan itu melahirkan reaksi keras dari kalangan Islam. Sosok tertuduh sebagai aktor intelektual dibalik perubahan itu adalah Moehammad Hatta. Seperti diakuinya, dirinya juga mengkritik Hatta yang dinilainya tidak berpihak pada kepentingan Islam. Namun seiring dengan kematangan intelektual dan pencermatan secara jeli peta sosiologis dan antropologis bangsa Indonesia, akhirnya keputusan Hatta itu dapat diterimanya bahkan ia benarkan.[152] Syafii Maarif menilai, Hatta seorang negarawan yang cukup arif. Ia ingin tetap menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki berbagai latar

[150] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 137
[151] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 137
[152] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 23

belakang identitas seperti: bahasa, etnik maupun agama. Keragaman identitas tersebut tidak mungkin dipaksa berada di bawah dominasi agama tertentu, namun mesti diikat oleh sebuah konsensus sosial di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Menurut Syafii Maarif, pencoretan tujuh perkataan dalam Piagam Jakarta itu memiliki makna historis yang dalam. Ia mengutip pendapat Mohammad Roem untuk menjelaskan hal tersebut, selain memang Roem paham sekali dengan situasi pencoretan kata-kata itu. Bagi Roem, umat Islam memberikan pengorbanan yang cukup besar untuk bangsa Indonesia. Roem juga mengemukakan pandangan Alamsyah Ratu Perwira Negara yang menyebut Pancasila sebagai hadiah terbesar yang diberikan umat Islam kepada Republik Indonesia.[153] Karena itu, bangsa ini tidak boleh melupakan jasa besar yang sudah diberikan umat Islam terhadap pembentukan dasar negara. Ada dua hal yang dapat dicermati di sini: Pertama, Pancasila sesungguhnya merupakan spirit ajaran Islam yang dikontekstualisasikan menjadi dasar negara. Para tokoh Muslim nasional berhasil melakukan itu. Kedua, ajaran Islam tentang toleransi dan persatuan merupakan bagian yang turut menentukan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua hal inilah yang menurut Syafii Maarif memiliki nilai historis itu.

Dalam pemikiran Syafii Maarif, para pemimpin Islam telah menunjukkan toleransi beragama yang demikian tinggi sehingga berani menghapus kata-kata yang berkaitan dengan Islam demi keutuhan bangsa Indonesia. Bagi Syafii Maarif, toleransi seperti itu belum ada tandingannya dalam sejarah modern Indonesia. Ia juga menegaskan, bagaimana jika pada saat itu para pemimpin Islam memaksakan kehendak dan menggunakan kacamata eksklusif ketika merumuskan dasar negara? Hasilnya sudah dapat ditebak, negara merdeka yang baru lahir akan terpecah-pecah hanya karena persoalan kulit. Sekali pun hilangnya kata tersebut digugat kembali oleh sementara tokoh Islam pada 1950-an.[154]

---

[153] Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas*, 103
[154] Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas*, h. 42

Pada persoalan kebebasan beragama Syafii Maarif mendukung sepenuhnya prinsip kebebasan beragama. Ia menghormati perbedaan tersebut meskipun secara teologis berbeda dengan keyakinannya. Di sini kelihatan jelas bahwa keimanan Syafii Maarif tidak cenderung ternoda apalagi goyah karena keimanan lain, melainkan ia membuka luas hak-hak individu termasuk dalam menentukan keyakinannya. Dalam konteks bernegara seperti Indonesia ini, tentu saja pendirian Syafii Maarif mendapat penguatan secara konstitusional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat satu disebutkan bahwa negara memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya.[155] Dengan demikian, pada satu sisi Syafii Maarif mendapatkan dasar teologis dan pada sisi yang lain penghargaannya terhadap kebebasan beragama berdasarkan konstitusi yang berlaku. Maka dari itu, inilah yang menjadi dasar filosofis kebebasan beragama Syafii tersebut.

3. Prinsip-prinsip Kebebasan Beragama

1. Toleransi (Doktrin Setiap Agama)

Syafii Maarif percaya bahwa toleransi adalah bagian penting dari ajaran Islam. Baginya, masyarakat perlu saling menerima satu sama lain agar dapat hidup bersama dengan baik. Al-Quran mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan keragaman agar setiap orang bisa menerima perbedaan tersebut dengan hati terbuka. Menjadi toleran adalah cara untuk menghargai keragaman tersebut menurut pandangan Syafii Maarif.[156] Dalam bahasa Arab, toleransi biasa disebut "ikhtimal, tasamuh" yang artinya sikap membiarkan, lapang dada (samuha-yasmuhu-samhan, wasimaahan, wasamaahatan) artinya: murah hati, suka berdermai. Sedangkan kata *tasamuh* merupakan derivasi dari kata samh yang berarti jud wa karam wa tasahul (sikap pemurah, penderma, dan gampangan). kata samahah juga diartikan dengan *suhulah* (mempermudah). Pengertian ini juga diperkuat dengan perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengartikan kata al-samhah dengan kata *al-sahlah* (mudah), dalam

[155] Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas*, h. 32-39, dan h. 165-175.
[156] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h.177

memaknai sebuah riwayat yang berbunyi, *Ahabbu aldin ilallahi al-hanafiyyah al-samhah.*[157]

Sedangkan di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976)* dijelaskan bahwa toleransi adalah kelapangan dada (dalam arti suka kepada siapa pun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan lain). Hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat yang utama bagi setiap individu yang ingin kehidupan yang aman dan tenteram. Dengan begitu akan terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik dikalangan masyarakat beragama.[158]

Dari penelitian bahasa di atas, toleransi berarti kita mau menerima dan menghargai beragam perbedaan, seperti perbedaan suku, warna kulit, bahasa, budaya, dan agama. Semua ini adalah ciptaan dan kehendak Allah. Toleransi dalam beragama berarti kita menghormati agama-agama lain dengan segala cara ibadahnya dan memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk menjalankan keyakinan agamanya. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan meninggalkan sistem yang tradisional.[159] Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ketika Nabi Muhammad ditanya tentang agama yang paling dicintai oleh Allah, beliau menjawab: “Al-Hanifiyyah al-Samhah” (agama yang lurus dan penuh toleransi), yaitu agama Islam.

Menurut Syafii Maarif, toleransi berarti menerima perbedaan latar belakang setiap orang dengan lapang dada. Dia mengatakan bahwa sikap terbuka ini muncul dari rasa percaya diri yang kuat. Orang yang percaya diri tidak melihat perbedaan sebagai ancaman bagi status mereka, tapi sebagai sumber kekuatan. Dalam konteks hubungan antar agama, Syafii Maarif menyatakan bahwa toleransi menciptakan ruang

---

[157] *Fath al-Bari*

[158] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) , 1084

[159] Schuman, *Menghadapi Tantangan Memperjuangkan Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 42.

bagi semua orang untuk memilih keyakinan agama mereka sendiri.[160] Baginya, toleransi adalah hal penting untuk menciptakan masyarakat yang damai.

Meskipun begitu, dari penjelasan Syafii Maarif tentang toleransi, tidak disebutkan bahwa toleransi juga berlaku dalam hal keyakinan. Ini berarti bahwa menurut Syafii Maarif, toleransi hanya berlaku dalam hubungan sosial manusiawi, bukan dalam hal keyakinan. Dengan kata lain, menurut Syafii Maarif, toleransi tidak berlaku dalam hal keyakinan. Namun, ia juga mengatakan bahwa toleransi harus ada dalam masyarakat yang beragam.

Masalah toleransi antar agama seringkali menjadi perhatian yang besar dalam hubungan antar pemeluk agama. Seperti yang dijelaskan oleh Syafii Maarif dan Schuman, toleransi sebenarnya merupakan hal yang melekat pada manusia itu sendiri. Toleransi antar agama menjadi topik yang cukup sensitif untuk dibahas, karena kadang-kadang masalah kecil bisa memicu masalah besar akibat politisasi isu ini. Konflik dalam hal ini seringkali muncul karena kurangnya pemahaman setiap orang akan ajaran agama yang berbeda. Di beberapa kasus, konflik juga terjadi karena seorang pemeluk agama tidak mampu menjalankan perannya sebagai pemeluk agama dan warga negara yang baik secara bersamaan.[161]

Menurut Syafii Maarif, orang yang belum matang secara emosional sering menganggap perbedaan sebagai musuh. Ini mengurangi pentingnya toleransi. Baginya, peradaban besar muncul karena pandangan yang berbeda, tetapi dengan sikap toleran. Menurutnya, jika perbedaan pendapat dibicarakan dengan baik, itu bisa menghasilkan pandangan yang lebih kuat dan komprehensif. Oleh karena itu, tidaklah etis untuk mengklaim kebenaran sebelum pendapat itu dibicarakan secara sehat dengan sikap toleransi dan keterbukaan.[162]

---

[160] Toleransi dalam pencermatan Syafii Maarif terdiri dari dua syarat: Pertama, adanya pengertian (understanding). Kedua, adanya penghargaan (*appreciation*). Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 177.

[161] Elza Peldi Taher, ed., Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 tahun Djohan Effendi (Jakarta: ICRP, 2009). Lihat juga https://interaktif.kompas.id/baca/jejak-perjuangan-buya-syafii-maarif-merawat-toleransi/

[162] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai,* h. 178

Seperti yang terlihat, Syafii Maarif mengatakan bahwa jika kita memiliki budaya toleransi, kita bisa menciptakan masyarakat yang hidup damai seiring berjalannya waktu. Dia juga yakin bahwa dengan adanya toleransi, masyarakat bisa saling belajar satu sama lain. Menurutnya, ini akan membuat kemajuan intelektual masyarakat semakin meningkat. Syafii Maarif ingin agar toleransi dikelola dengan bijak dan cerdas.

Oleh karena itu, Syafii Maarif mendorong pesan agar semua orang dari berbagai kepercayaan dan tidak beragama dapat hidup berdampingan dengan damai di dunia dengan cara, "Menjadi saudara meskipun berbeda dan menghormati perbedaan itu." Pesan ini tidak bertujuan untuk melemahkan keyakinan seseorang, malah akan memperkuatnya. Sementara itu, hubungan antara pemeluk agama satu dengan yang lain dapat dibangun dengan kuat dan penuh martabat. Menurut Syafii Maarif, pandangan Islam tentang menghargai orang dari berbagai agama berkaitan erat dengan cara Islam memandang hubungan antar sesama manusia dan dengan agama lain. Meskipun ia sebagai seorang Muslim memilih Islam sebagai kepercayaannya yang benar, ia menyarankan agar kita menghormati orang-orang yang memilih keyakinan yang berbeda. Pandangan ini tentu saja didasarkan pada ajaran Alquran. Sikapnya adalah menghormati keberadaan agama lain, bukan menyatakan bahwa ajaran agama lain benar.[163]

Menurut Syafii Maarif, semua orang berhak hidup dan menggunakan sumber daya bumi dengan adil dan toleran, tidak hanya mereka yang beragama Islam. Tidak ada yang boleh mengklaim kepemilikan eksklusif atas bumi ini. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya mempromosikan toleransi dengan cara aktif, dengan syarat bahwa pihak lain juga melakukan hal yang sama. Menurut pandangan Syafii Maarif, jika ada gerakan agama atau politik yang mencoba mengusir orang lain dari bumi, mereka harus ditentang secara bersama-sama karena mereka merusak peradaban dan martabat kemanusiaan.[164]

---

[163] Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar*, h. 233.
[164] Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar*, h. 233.

Dapat dilihat, menurut Syafii Maarif, perbedaan agama bukanlah halangan untuk menjalin hubungan persaudaraan antara orang-orang dengan keyakinan yang berbeda. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, beliau diutus oleh Tuhan ke dunia bukan hanya untuk satu kelompok saja, tetapi untuk semua orang dari berbagai suku dan agama. Bahkan toleransi yang ditunjukkan Islam demikian kuat sehingga umat Islam dilarang memaki tuhan-tuhan yang disembah para oarang Musrik.

Menurut Syafii Maarif, Alquran adalah buku suci yang mengajarkan tentang pentingnya saling menghormati. Dia bahkan mengatakan bahwa Alquran lebih mendorong toleransi daripada sikap yang ditunjukkan oleh sebagian umat Islam. Ini sebenarnya merupakan kritik terhadap umat Islam. Meskipun Alquran mengajarkan nilai-nilai toleransi, tidak semua umat Islam menerapkannya dengan baik. Bagi Syafii Maarif, pentingnya hak untuk memilih agama sangatlah besar. Ini berkaitan dengan hak asasi manusia untuk memilih apakah mereka ingin beriman atau tidak, yang sangat penting dalam kehidupan. Karena memilih agama adalah bagian dari keyakinan seseorang, ini akan memengaruhi cara hidup mereka dan juga pertanggungjawaban mereka di akhirat.[165]

Bagi Syafii Maarif, menghormati keyakinan orang lain dan memberikan kebebasan beragama adalah penting bagi semua orang, termasuk umat Islam. Ini adalah bagian penting dari ajaran Islam dan menunjukkan kesempurnaan ke-Islaman. Sikap ini juga mencegah munculnya budaya Islam yang kuno dan tidak toleran. Budaya tersebut tidak hanya membuat orang non-Muslim merasa khawatir, tetapi juga merugikan umat Islam sendiri.[166]

Syafii Maarif berpikir bahwa pentingnya toleransi dalam Islam harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika toleransi telah menjadi budaya, umat Islam akan lebih mudah hidup berdampingan dengan berbagai macam identitas. Syafii

[165] Ditegaskan pada surat Al-Baqarah ayat 56 yaitu: "*la ikrah fi aldin*" (tidak paksaan untuk memeluk suatu agama). Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 179

[166] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 180

Maarif ingin menekankan bahwa ketidakharmonisan antara umat beragama disebabkan oleh kurangnya budaya toleransi.[167]

Oleh karena itu, Syafii Maarif merasa penting untuk mempromosikan budaya toleransi. Ini disebabkan oleh dua faktor utama: Pertama, Alquran sebagai panduan moral dari nilai-nilai agama. Kedua, keadaan Indonesia yang beragam secara kultural dan sosial. Alquran menjadi dasar moral yang berasal dari keyakinan agama, sementara keberagaman Indonesia menjadi dasar sosial dan budaya yang berasal dari kondisi nyata masyarakat Indonesia.

Syafii Maarif menjelaskan bahwa keunikan ajaran Islam tentang toleransi adalah bahwa dalam Islam, toleransi tidak hanya diam atau pasif, tetapi aktif dan positif. Ini tidak hanya tentang hidup damai bersama, tetapi lebih dari itu, yaitu melakukan kebaikan dan bersikap adil terhadap keyakinan orang lain. Salah satu aspek dari budaya toleransi ini adalah kesediaan untuk belajar dan menerima kebenaran dari mana pun sumbernya.[168]

2. Keadilan

Dalam sebuah catatan pendeknya, Syafi‘i mempertegas suara hidupnya sebagai bapak bangsa: Aku mencintai bangsa ini secara tulus dan dalam sekali. Bagiku, membela bangsa adalah dalam rangka membela Islam. Usaha dan perjuangan Syafi‘i tak berhenti tatkala meletakkan kepemimpinan Muhyammadiyah pada gernerasi di bawahnya. Ia kemudian mendirikan Maarif Institute sebagai wahana melanjutkan ikhtiar dalam rangka mengawal dan menggapai kebangkitan intelektual di kalangan generasi muida Islam. Kini, di bawah layar Maarif Institut, Syafi‘i pun kian

[167] Menurut Syafii Maarif, banyak orang non-Muslim merasa takut terhadap Islam karena pemahaman yang sempit dan intoleran dari beberapa kelompok terhadap agama ini. Menurutnya, ketakutan itu tidak hanya dirasakan oleh non-Muslim, tetapi juga oleh umat Islam secara umum. Terutama di Indonesia, di mana masyarakatnya beragam dan menghargai perdamaian, sikap intoleransi tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama Islam, tetapi juga tidak sesuai dengan keadaan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 180

[168] Dalam Islam, toleransi bukan hanya tentang keadaan, tetapi juga tentang cara berpikir; bukan hanya mengakui perbedaan, tetapi juga menguatkan perbedaan sebagai kekuatan. Selain itu, Islam juga memberikan perlindungan kepada mereka yang menghadapi ancaman penindasan. Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar*, h. 199.

menancapkokohkan jejaknya sebagai tokoh pluralis yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemajukan dakam bingkai keislamam, keindonesiaan dan kemanusiaan.[169]

Kehadiran Syafi‘i di pentas nasional juga bisa dikatakan memberi penyejukan di tengah-tengah kegelisahan rakyat. Ia tidak hanya menjadi motor penggerak kampanye moral antikorupsi, tetapi juga berdiri di baris terdepan dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Syafi‘i juga kerap menjadi simbol atas berbagai usahanya merajut kasih dengan berbagai pimpin an lintas agama Syafi‘i amat prihatin dengan moralitas kepemimpinan nasional serta politisi Indonesia dewasa ini.[170]

Kata-kata dan perbuatan mereka masih dalam taraf perorangan dan pendidikan bangsa ini belum menghasilkan “pemandu” melainkan koruptor dan penganggur serta menghasilkan kepemimpinan yang “rabun ayam”, tunavisi ke depan. Para pemimpin sebagian besar termotivasi sekadar haus kekuasaan dan kesempatan untuk mem perkaya diri dan diperparah dengan lembaga yang membantu pelestarian kekuasaannya. Akibatnya, bukannya keteladanan seorang pemimpin dalam melaksanakan kebijakan dan menghindarkan kejahatan, tapi para pemimpin justru memberi contoh buruk bagaimana mengabaikan kebajikan.[171]

Ahmad Syafii Maarif adalah seorang Intelektual Muslim yang menggunakan semangat moral Islam, dalam hal ini kalimat tersebut merupakan sebuah kesimpulan umum mengenai semua pemikiran Islam dari Ahmad Syafii Maarif. Dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif Islam dapat dijadikan petunjuk moral bagi semua masyarakat Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Penjelasan ini merupakan sebuah hasil dari pergumulan Ahmad Syafii Maarif dengan sejarah, yang menjadi study-nya dan telah membuatnya dapat melakukan mobilitas yang sangat radikal dalam pemikiran Islam. Penempatan diri dari Syafii dapat terus berubah-ubah sebagai sebuah hasil dari perkembangan pengetahuan hasil

---

[169] Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif (Ketua 1998 - 2005) | Muhammadiyah diakses hari Jum’at pukul 15.00, 12 Januari 2024

[170] Refleksi Sejarah Buya Syafii Islam dalam Bingkai Keindonesiaan, Kemanusiaan (2) (youtube.com) diakses hari Jum’at pukul 17.00, 12 Januari 2024

[171] AbdRohimGhazali danSaleh PartaonanDaulay (2005), "SebnahBuku, Sebuah Cermin," AbdRohim (AR) Ghazali dan Saleh Partaonan (SP) Daulay (Eds.), *Cermin untuk Semua* Refleksi 70 TahunAhmadSyafii Maarif, Jakarta: MaarifInstitute, p.xii.

berdialog dengan sejarah, hal ini dapat kita lihat dari berubahnya seorang Ahmad Syafii Maarif dari seorang yang fundamentalis menjadi seorang Islam yang terbuka, atau dalam bahasa Syafii sebagai Muslim yang inklusif dan pluralis.

Selain itu dapat juga kita lihat bagaimana cita-cita yang awalnya menginginkan untuk terselenggaranya negara Islam nan megah menjadi seorang pembela demokrasi dan Pancasila sebagai sebuah ajaran moral bagi manusia Indonesia. Dalam bahasa singkatnya Ahmad Syafii Maarif dalam hal pemikiran negara dan agama mengalami transformasi pemikiran yang sangat kontras, dari syariat oriented pemikiran Moh. Natsir menjadi seorang sosial-demokrat yang menjadi orientasi dari Muhammad Hatta.[172]

2. Pelembagaan Pemikiran: Maarif Institut

Keberadaan MAARIF Institute secara tak terpisahkan terkait dengan gerakan Pembaruan Pemikiran Islam yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Gerakan ini merupakan refleksi yang diperlukan dan sejalan dengan tuntutan sejarah. Dalam konteks kompleksitas masalah kemanusiaan modern dan isu-isu kontemporer yang meliputinya, seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, gender, terorisme, dialog antaragama, peradaban, dan sejumlah isu lainnya, terdapat kebutuhan akan penafsiran baru terhadap ajaran Islam.[173]

Oleh karena itu, MAARIF Institute muncul sebagai gerakan kolektif yang bertujuan untuk memperluas pengaruh budaya dan intelektual serta sebagai wadah untuk mewujudkan visi sosial Syafii Maarif. Dalam esensinya, MAARIF Institute berperan sebagai agen perubahan yang dikelola oleh generasi muda yang didasarkan pada semangat intelektual dan sebagai sarana untuk mewujudkan aspirasi sosial Syafii Maarif.

Organisasi ini, bertujuan untuk menyebarkan gagasan-gagasan besar yang diusung oleh Syafii Maarif dan menjadi jembatan untuk mengaplikasikan ide-ide

---

[172] Ahmad Solikin, *Pemikiran Politik Negara Dan Agama "Ahmad Syafii Maarif"*. Jurnal Politik Muda, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012, h. 202.

[173] MAARIF Institute, Rumah Besar Gerakan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif | MAARIF (jurnal-maarifinstitute.org) diakses hari Minggu 04 Februari 2024, pukul 22.50.

beliau dalam ranah praktis, taktis, dan operasional. Oleh karena itu, MAARIF Institute dapat dianggap sebagai ekstensi konkret dari pemikiran Syafii Maarif. Hal ini tidak berlebihan, mengingat organisasi ini memiliki beberapa program unggulan, antara lain Jambore Pelajar Teladan Bangsa, Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafii Maarif (SKK-ASM), MAARIF Fellowship, Penerbitan Jurnal MAARIF, MAARIF Award, Tular Nalar, dan yang terbaru adalah program Syafii Maarif Memorial Lecture (SMML).[174]

Melalui program-program itu, MAARIF Institute bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih baik, dengan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan pemikiran yang diwariskan oleh Syafii Maarif. Organisasi ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemikiran kritis, dialog, dan pertukaran ide di antara generasi muda serta melibatkan mereka dalam berbagai inisiatif yang mengarah pada perubahan positif. Dengan demikian, MAARIF Institute menjadi salah satu kekuatan yang membantu membentuk wacana publik yang berlandaskan pada pemikiran ilmiah, kearifan lokal, dan nilai-nilai universal.

Selanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa ide dan gagasan yang dikembangkan oleh MAARIF Institute sangat terkait dengan peran Syafii Maarif sebagai kader dan pimpinan Muhammadiyah. Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam di Indonesia, telah dikenal sebagai gerakan modernis moderat yang aktif dalam mempromosikan pemikiran-pemikiran Islam yang inklusif, berdakwah, dan melakukan berbagai aksi sosial untuk kemajuan umat. MAARIF Institute, sebagai bagian dari Muhammadiyah, memiliki perhatian utama dalam memperjuangkan arus pembaruan pemikiran Islam dalam konteks gerakan Muhammadiyah. Institusi ini berkomitmen untuk mengembangkan pemikiran Islam yang moderat, terbuka, dan inklusif, yang sejalan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Dalam hal ini,

[174] Maarif, A. S. (2018). *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam.* Bunyan: Yogyakarta, h. 75.

MAARIF Institute berupaya untuk mengintegrasikan pemikiran Islam dengan nilai-nilai budaya lokal dan konteks sosial yang ada di Indonesia.[175]

Dalam perspektif antropologi, MAARIF Institute melihat pentingnya memahami dan menghargai keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat. MAARIF Institute mempromosikan dialog antaragama dan menggalang kerja sama dengan berbagai komunitas agama dan budaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman tersebut. Melalui pemahaman ini, MAARIF Institute berupaya untuk membangun kerukunan dan harmoni antarumat beragama dalam masyarakat Indonesia.

Lebih dari itu, MAARIF Institute juga aktif dalam melakukan penelitian dan publikasi terkait pemikiran Islam, baik dalam skala nasional maupun internasional. Institusi ini berperan dalam menghasilkan karya-karya akademis dan intelektual yang memberikan kontribusi dalam pembaruan pemikiran Islam yang inklusif dan relevan dengan tantangan zaman.[176]

MAARIF Institute juga memahami pentingnya membangun pemahaman tentang agama dan budaya dalam perspektif lokal. Misal dalam progam andalannya yang beberapa kali penulis terlibat, MAARIF Award, MAARIF Award mengumandangkan tokoh-tokoh lokal yang progresif, yang bekerja demi kemanusiaan universal untuk peningkatan kualitas masyarakat lokalnya masing-masing menjadi lebih baik. Program ini juga bertujuan untuk menghormati dan memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai bagian dari upaya memahami dan memperkuat keberagaman agama dan budaya di Indonesia. MAARIF Institute juga memainkan peran penting dalam mempromosikan pemikiran Islam yang moderat dan membawa pembaruan dalam pemahaman dan praktik agama. Melalui kerja keras dan dedikasinya, MAARIF Institute berkontribusi dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan saling menghormati, serta menciptakan ruang bagi dialog dan pemahaman yang lebih baik antara agama-agama dan budaya-budaya yang berbeda.

3. Kesetaraan (*Egual Treatment*)

[175] MAARIF (jurnal-maarifinstitute.org) diakses hari Minggu 04 Februari 2024, pukul 23.00
[176] MAARIF (jurnal-maarifinstitute.org) diakses hari Minggu 04 Februari 2024, pukul 23.04.

Belajar dari realitas sejarah politik Indonesia yang lebih banyak merugikan umat Islam, memaksa kita melakukan reorientasi politik dengan berpijak pada sirah nabawiyah (sejarah Nabi) bahwa Dustur Madinah (Piagam Madinah) secara substansial dinilai mempunyai persamaan dengan Pancasila. Keduanya sama-sama merupakan jawaban konstitusional terhadap realitas sosio-politik masyarakat yang tengah dihadapi. Piagam Madinah maupun Pancasila merupakan jawaban terhadap realitas pluralisme keagamaan dalam masyarakat masing-masing (Madinah maupun Indonesia).

Pemahaman ini hendaknya bisa melahirkan kesadaran baru bagi umat Islam Indonesia, bahwa Islam perlu dimasyarakatkan tanpa harus mengganti Pancasila atau bahkan dalam bentuk formalisme lainnya, termasuk partai. Yang penting adalah mengembangkan substansi Islam. Islam lebih berperan sebagai patokan utama, sebagai sumber moral bagi pelaksanaan bernegara, bahkan termasuk sumber moral bagi pelaksanaan Pancasila.

Islam yang ingin dikembangkan di Indonesia adalah sebuah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara. Sebuah Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur, sub-kultur, dan agama kita yang beragam, sebuah Islam yang memberi keadilan, kenyamanan, keamanan, dan perlindungan kepada semua orang yang berdiam di Nusantara ini, tanpa diskriminasi, apapun agama yang diikutinya atau bahkan tidak diikutinya. Sebuah Islam yang sepenuhnya berpihak kepada rakyat miskin, sekalipun ajarannya sangat anti-kemiskinan, sampai kemiskinan itu berhasil dihalau sampai ke batas-batas yang jauh di negeri kepulauan ini.

Kegigihan dan keinginan sekelompok masyarakat Muslim untuk mendirikan negara Islam Indonesia, dapat menimbulkan citra buruk bagi umat Islam. Apalagi keinginan tersebut kerapkali diiringi dengan tindakan-tindakan anarkis dan cenderung represif, kondisi ini dapat menimbulkan kecurigaan, bahkan kebencian di kalangan kelompok-kelompok lainnya. Bahkan yang lebih buruk lagi, tudingan Barat terhadap Islam sebagai sumber teroris dunia seakan-akan mendekati kebenaran. Bila hal ini dikenal sebagai agama pembawa rahmat akan menjadi cacat.

Sudah saatnya umat Islam Indonesia memiliki kesadaran bahwa berjuang untuk Islam tidak hanya dapat dilakukan dengan usaha mendirikan negara Islam. Tetapi lebih jauh dari itu, dapat pula dilakukan dengan berjuang melalui berbagai sektor kehidupan lainnya. Sektor pendidikan, ekonomi, dan stabilitas nasional merupakan beberapa bidang yang cukup mendesak untuk ditangani. Keterpurukan perekonomian Indonesia saat ini lebih disebabkan lemahnya ketiga sektor di atas.

Jika Islam ditampilkan dengan wajah garang oleh segelintir orang -egoistik, penuh retorika murahan- ibarat monster, pasti akan menakutkan dan dibenci oleh banyak pihak yang berfikir jernih, siapa pun mereka, apa pun agamanya. Sebuah monster yang sering berbicara atas nama Tuhan, jelas terlepas dari kawalan syariah dalam maknanya yang benar.

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif yang secara tegas menolak formalisasi syariat, sepertinya mesti kita pertimbangkan secara adil. Baginya tuntutan seperti itu bukan saja ahistoris, tidak realistis, dan tidak dilandasi dengan pondasi intelektual yang kuat. Ahmad Syafii Maarif yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw tidak pernah menyatakan diri sebagai seorang penguasa. Fakta ini memberikan sebuah interpretasi bagi kita semua bahwa politik hakikatnya hanyalah sarana, sebagai alat bagi agama, dan bahkan sebagai sebuah perwujudan (suatu eksistensi) dari agama itu sendiri.

Dengan demikian bisa kita terima tawaran intelektual Ahmad Syafii Maarif, tentang sebutan negara Islam itu tidak diperlukan lagi. Tetapi bahwa moral Islam harus menyinari masyarakat luas (Indonesia) adalah sebuah keniscayaan, jika memang Indonesia ingin menjadi sebuah negara yang adil dan makmur. Untuk kondisi Indonesia saat ini, semestinya umat Islam sudah lebih mau terbuka bahwa perangkat hukum-hukum Islam dapat dikawinkan dengan sistem hukum nasional melalui proses demokratisasi.

4. Pikira-pikiran Pokok Kebebasan Beragama

1. Toleransi Antaragama

Syafii Maarif menyatakan bahwa kebebasan beragama merupakan fakta yang terbentang di depan mata. Syafii Maarif menjelaskan bahwa Islam khususnya di Indonesia masih mempunyai banyak kelebihan, misalnya dalam persoalan toleransi umat beragama. Walau menang dari segi kuantitas, umat Islam Indonesia tetap memberikan kebebasan maksimal bagi kaum minoritas untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Hal inilah yang menurut Syafii Maarif tetap sejalan dengan konstitusi yang berlaku. Kebebasan beragama dan menentukan keyakinannya, tentu saja sesuai dengan bangunan demokrasi yang dianut sistem pemerintahan Indonesia. Dalam pandangan Syafii Maarif, konsep keesaan Tuhan dan menjaga perdamaian seluruh bangsa sepertinya menjadi bagian penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan bangsa Indonesia dan umat Islam khususnya.[177]

Keadaan ideal seperti inilah yang menjadi cita-cita sosial Syafii Maarif. Islam yang diwujudkan umatnya menapak secara kokoh di bumi dan memberikan perubahan substansial dalam kehidupan masyarakat terutama dalam bingkai humanitas. Siapa pun harus merasakan manfaat dari eksistensi Islam, bahkan orang yang mengaku ateis sekali pun.[178] Sebagaimana yang dikemukakan R. William Liddle, Syafii Maarif mencita-citakan sebuah Indonesia yang egaliter secara sosial, ekonomi dan politik, serta betul-betul demokratis. Dalam pandangan Liddle, model keislaman yang dipahami dan dipraktikkan Syafii Maarif dapat disebut sebagai Islam yang *rahmatan li al-'alamin,* seperti misi keislaman yang selalu ia perjuangkan.[179]

Islam yang *rahmatan li al-'alamin* dalam pandangan Syafii Maarif bukanlah barang jadi. Misi itu harus senantiasa diperjuangkan melalui berbagai pemikiran

[177] Ahmad Syafii Maarif, *Tuhan Menyapa Kita,* 31-32

[178] Lihat Ahmad Syafii Maarif, Alquran, Realitas Sosial, v-ix; *Islam dalam Bingkai*, h.172.

[179] R. William Liddle, "Syafii Maarif dan Indonesia". Sebuah Kata Pengantar untuk buku "Mencari Autentisitas". Lihat Syafii Maarif, M*encari Autentisitas*, xvi.

maupun tindakan-tindakan konkret. Ia mengistilahkan bahwa doktrin itu harus senantiasa disegarkan.[180]

Gerakan seorang intelektual, tidak hanya sebatas pada wilayah keilmuan yang ditekuni.Dari filsafat, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, atau setiap bidang akitifitas manusia merangkul sebuah jejak yang tidak terhapuskan dari peran campur tangan seorang intelektual yang tercerahkan. Gramsci mendefenisikan intelektual sebagai individu yang mempunyai fungsi organisator yang terlibat langsung dalam masyarakat, bukan hanya ditandai dengan aktifitas sebagai pemikir dan penulis.Oleh karena itu, Gramsci mengatakan,"Setiap orang adalah intelektual, namun tidak semua orang memiliki fungsi intelektual."[181] Dengan kata lain, seorang intelektual berperan sebagai suluh yang mencerahkan hati dan gerak masyarakat.

Syafii semaasa hidupnya begitu kontras dengan kesibukan, tak ada habisnya. Syafii terus menjaga kegelisahannya seraya berjuang mewujudkan agenda utamanya yakni urung tangan berbuat sesuatu untuk negeri, sebagai pemikir sekaligus pemikir. ia gelisah melihat Indonesia sebagai bangsa yang besar terancam terkoyak-koyak oleh kepentingan politik sesaat. Anak bangsa tidak boleh tercerai berai hanya dikarenakan satu anak bangsa memaksakan kehendak terhadap yang lain. Artinya, bangsa ini harus satu berdasarkan semangat kebersamaan dalam perbedaan. Karena itu menurutnya, keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan harus menyatu dalam nafas, jiwa, pikiran, dan tindakan.Sebuah warna Islam yang lebih menonjolkan substansi dibandingkan sekedar bungkusnya saja.

Kecintaan Syafii Maarif terhadap bangsa ini begitu tulus, setiap sumbangsih tak pernah diharapkan kembali kepada Buya dalam bentuk materi.Bagi Buya, bangsa

---

[180] Syafii Maarif memiliki dua alasan yang mendasari pemikirannya mengenai hal tersebut. Pertama, interpretasi terhadap ajaran transendental (wahyu) tidak pernah mutlak sebagaimana ajarannya itu sendiri. Ini berarti otoritas seseorang dalam memahami Islam selalu dapat disesuaikan kembali untuk mencapai pemahaman yang lebih segar dan sesuai dengan konteks. Kedua, Islam bertujuan untuk membentuk tatanan sosio-politik yang elegan berdasarkan etika yang kuat untuk mewujudkan prinsip rahmat bagi alam semesta dalam konteks ruang dan waktu. Ini berarti bahwa Islam akan selalu menunjukkan ragam budaya yang berbeda-beda di berbagai tempat. Di Indonesia, Islam yang diinginkan oleh Syafii Maarif, tentu saja, harus sesuai dengan konteks keindonesiaan secara historis.

[181] Roger Simon, *Gagasan-gagasan politk Gramsci,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h 141

ini telah memberikan banyak hal dan tidak mungkin terbayarkan. Sudah selayaknyalah anak yang dIlahirkan dalam rahim ibu pertiwi membalas jasa tersebut. Apalagi ditengah menguatnya pragmatisme politik kekinian, ancaman kehilangan masa depan demokrasi Indonesia begitu besar. Berkali-kali Buya menegaskan bahwa bangsa ini harus terus menjaga dan merawat akal sehat agar tidak tergilas roda zaman dan tercabik-cabik seperti nasib banyak negara Muslim lainnya.Buya berkata:

> "Di sini "kita" dan "mereka" harus dilihat dalam perspektif kemanusiaan yang bulat dan utuh, bukan kemanusiaan palsu. Realitas di depan kita adalah bahwa kesenjangan antara negara-negara kaya dalam belahan bumi yang miskin masing menganga. Dunia Islam yang menguasai sekitar 70% cadangan energy minyak belum cukup siuman untuk memainkan peran sejarah globalnya, karena rendahnya kualitas kepemimpinan yang bertengger di puncak piramida kekuasaan. Situasi ini sangat memprihatinkan, dan orang yang berpikir jujur dan cerdas pasti menyadarinya, tetapi belum sanggup berbuat banyak, karena beratnya tantangannya yang ada di depan mata."[182]

Syafii merupakan seorang intelektual Muslim yang berani mengambil sikap dan pandangan yang berbeda dengan arus utama, walaupun konsekuensinya ia akan dibenci dan dimusuhitermasuk di dalamorganisasi Muhammadiyah yang telah membesarkan namanya. Buya Syafii selalu terdepan dalam memperjuangkan hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan para kelompok minoritas yang dilucuti oleh negara dan kelompok intoleran. Buyasering mengkritik keras kelompok intoleran yang disebutnya "preman berjubah" yang dianggap suka meneror dan menakut-nakuti siapa saja yang berbeda pendapat dengannyamelalui aksi kekerasan fisik.Buya Syafiijuga kerap mengkritik negara yang terkadang dianggap lebih tunduk pada kelompok intoleran dibandingkan konstitusi.

Pada November 2016, ia membela Ahok dengan mengatakan bahwa Ahok tidak melakukan penistaan agama. Pandangannya ini melawan pendapat mayoritas tokoh Islam lainnya termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah memfatwakan bahwa Ahok melakukan penistaan agama Islam dan para

[182] Lihat, Maarif, *Islam dalam Bingkai,* h.311-212

ulama.”Sekiranya saya telah membaca secara utuh pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang menghebohkan itu.

Dalam fatwa itu jelas dituduhkan bahwa Ahok telah menghina Al-Qur’an dan menghina ulama sehingga harus diproses secara hukum, semua berdasarkan Fatwa MUI yang tidak teliti itu, semestinya MUI sebagai lembaga menjaga martabatnya melalui fatwa-fatwa yang benar-benar dipertimbangkan secara jernih, cerdas, dan bertanggung jawab, fatwa atau pandangan agama itu benar, shahih, jelas atau sama seperti apa yang disampaikan ahli agama, jadi jangan percaya sama orang.

“Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya.”[183]

Perhatikan, apa terdapat penghinaan Al-Qur’an? Hanya otak sakit saja yang kesimpulan begitu, yang dikritik Ahok adalah mereka yang menggunakan ayat itu untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih dirinya, apakah kita mau mengorbankan kepentingan bangsa dan negara itu akibat fatwa yang tidak cermat itu?

Atau apakah seorang Ahok begitu ditakuti di negeri ini, sehingga harus dilawan dengan demo besar-besaran? Jangan jadi manusia dan bangsa kerdil, untuk kepentingan klarfiikasi atas legalitas pendapat keagamaan atau fatwa tentang adanya dugaan kasus penistaan atau penistaan agama yang dilakukan oleh saudara petahana Basuki Purnama.”

Ahmad Syafii Maarif sang Penganjur Toleransi. Syafii dikenal sebagai tokoh lintas agama yang berjuang keras menggalakkan toleransi di Indonesia. Pembelaannya kepada Ahok terkait kasus Al-Maidah 51, bahkan membuatnya dicerca orang-orang anti-Ahok di sosial media. Bahkan ada orang yang mengaku satu suku dengan Syafi’i, selain mengecam juga secara sepihak mencabut gelar Buya yang disandang Syafi’i.

Syafii, yang membaca secara utuh pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu, menyebut “Ahok tidak mengatakan Al Maidah (ayat 51) itu bohong”. Buya Syafii

[183] Pendapat Buya Syafii Maarif tentaang rekaman ahok tentang stentennya soal sursh Al-Maida 51 di Kepulauan Seribu.

hanya ingin berpikir adil sebagai orang terpelajar, dan juga sebagai orang Islam. Buya Syafii sejak lama risih dengan sikap intoleran di Indonesia. Itu bahkan terjadi di kelasnya. Suatu kali, waktu zaman Orde Baru, ada seorang mahasiswa menjelek-jelekkan agama lain. Itu mahasiswa intoleran lalu disemprotnya.

Menurut Syafii, toleransi itu penting bagi Indonesia yang majemuk dalam banyak hal. Dalam bukunya, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa demokrasi Terpimpin, 1959-1965 (1996), dengan mengacu pada Piagam Madinah, Buya Syafii menulis, “Sebuah bangsa dapat mengalami kehancuran bila toleransi sosial, agama, dan budaya tidak mantap.Wajah Islam Indonesia hari ini sebagian sisinya tercitra begitu negatif, hingga jauh dari nilai sejatinya sebagai agama damai. Mudah sekali menemukan orang-orang yang mengaku Islam namun perilakunya kasar dan merasa paling suci. Hal-hal baik gagal ditegakkan. Islam Indonesia golongan ini hanya terjebak pada simbolsimbol saja dan menjauh dari esensi.

Bagi Syafii, Islam adalah agama yang sarat dengan Nilai-nilai kemanusiaan. Sumber utama doktrin Islam yang utama, Al-Qur’an, pada dasarnya merupakan refleksi dari hasil dialog konstruktif antara pesan langit dengan realitas obyektif yang ada di bumi.Pesanpesan utama demokrasi dan hak-hak asasi manusia (HAM), meskipun secara literal tidak ada dalam Al-Qur’an, tapi jelas terkandung dalam kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW ini.

Pesan-pesan partikular seperti cara hidup sehari-hari yang diajarkan Al-Qur’an adalah ditujukan kepada semua umat manusia secara universal, bukan terbatas pada Muslim saja. Larangan tidak boleh membuhun, mencuri, berzina, bersumpah palsu, menuduh (tanpa bukti), berprasangka buruk, memfitnah, dan menyakiti orang lain, adalah pesan-pesan yang berlaku bagi siapa pun dan dimana pun, tanpa memandang agama, suku, golongan, dan strata sosial.

Baginya, yang penting bagi Indonesia adalah hukum yang sudah ada sekarang (KUHP) dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Dengan kata lain, bukan jenis hukumnya yang perlu dipersoalkan, melainkan penegakan hukum itu yang perlu ditegakkan. Selain itu, menurut Maarif, perda syariat sebenarnya problematik karena

"sesungguhnya pendukung Perda itu bukan hanya partai Islam, partai macam-macam, sekuler, lebih beriorientasi kepada kekuasaan jangka pendek untuk menjaga mendapatkan konstituen." Bahkan, lebih jauh lagi ia menginginkan agar perda-perda syariat yang berlawanan dengan UUD itu agar diuji kembali keabsahannya di Mahkamah Konstitusi, karena perda syariat adalah "Duri dalam daging itu, artinya mengganggu pelaksanaan konstitusi Indonesia ini dan bisa menimbulkan perpecahan,"[184]

Menurut Syafii Islam tidak mempermasalahkan apapun nama dan bentuk pemerintahan yang dipakai oleh pemimpin Is- lam, yang terpenting adalah bagaimana moral- etik dapat berjalan dengan baik dalam sebuah negara tersebut.[185]

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana landasan berpikir Ahmad Syafii Maarif sehingga sikap dan pernyataan diatas bisa muncul? Bagaimana Maarif merekonsiliasi identitasnya sebagai seorang yang beragama Islam dengan identitas dirinya sebagai orang Indonesia yang berfalsafah Pancasila yang menolak perda syariat. Untuk menjawab pertanyaan ini, posisi Maarif adalah Islam merupakan penafsiran dan pemahaman manusia yang tak sempurna dan berbeda-beda terhadap teks kitab suci. Ada pemahaman Islam yang justru menolak negara Islam dan segala bentuk pemaksaan negara kepada warga negara untuk menjalankan syariat.[186] Penafsiran seperti ini sangat cocok untuk iklim bangsa Indonesia yang kaya ragam perbedaan.

Prinsip kemashlahatan adalah kelanjutan dari sikap substansialis. Cara pandang kemashlahatan adalah dengan melihat dampak jangka panjang. Yakni, apakah keputusan yang diambil lebih banyak manfaat atau mudharatnya dimasa depan. Alasan utama Piagam Jakarta ditolak oleh pendiri bangsa yang beragama Islam adalah karena menganak-emaskan satu agama dibandingkan dengan agama

---

[184] https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/24/11/2018/Buya-Syafii-kurang-setuju-dengan-perda-syariah-ini-alasannya

[185] Asroni, A. (2011). Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang negara dan Syariat Islam di Indonesia. *Millah Jurnal Studi Agama*, X(2).

[186] Maarif, A. S. (2017) *Islam dan Pancasila sebagai dasar negara : studi tetang perdebatan dalam konstituante*. Bandung Mizan, 2017

yang lain akan membuat bangsa Indonesia yang majemuk ini pecah. Kebebasan beragama telah diberikan, tak perlu negara ikut campur memaksa warga negara untuk taat beribadah. Peribadatan yang dikerjakan dengan terpaksa hanya akan melahirkan kepalsuan.[187]

2. Kesetaraan Dalam Beragama

Syafii Maarif merupakan sosok yang termasuk intens mengangkat persoalan kebebasan agama di negaara ini. Dari berbagai tulisan yang dibuatnya, isu tentang pluralisme agama mendapat perhatian yang cukup serius. Ia juga memberikan dukungan yang cukup kuat bagi kebebasan beragama khususnya di Indonesia. Kebebasan beragama bagi Syafii Maarif merupakan fakta yang tidak mungkin diingkari. Menurutnya, Alquran sudah memaparkan dengan jelas masalah ini.[188]

Menurut Syafii Maarif, bumi yang telah dihamparkan Tuhan untuk kepentingan umat manusia berhak dihuni oleh siapa saja. Karena itu kaum teis harus menghormati kaum ateis begitu pula sebaliknya.[189] Antara kaum teis dan ateis perlu diikat oleh sebuah konsensus kemanusiaan, agar masing-masing dapat merasakan hidup damai dan tenteram. Jika salah satu kelompok menganggap lebih unggul daripada yang lain, maka hal itu menurutnya akan merusak perdamaian dunia. Sikap Syafii Maarif dalam mempedomani Alquran mengindikasikan bahwa ia adalah sosok yang "radikal" secara referensial, tapi di sisi lain ia dapat disebut sebagai pribadi yang "liberal" dalam pemikiran dan gerakan.[190] Sisi yang disebut terakhir menunjukkan keterbukaannya kepada berbagai bentuk pemikiran dan ia tidak merasakannya sebagai sebuah ancaman yang dapat mendangkalkan keimanannya.[191]

---

[187] Maarif, A. S. (2004) *Mencari Autentisifitas dalam Kegalauan*. Jakarta. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiah, 2015

[188] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 166.

[189] Syafii Maarif menjelaskan bahwa dari pemahamannya terhadap Alquran, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa beriman lebih baik daripada kufur. Menurutnya, ujung kufur hanya satu: malapetaka di sini atau di alam nanti atau pada kedua alam itu. Ia juga menegaskan bahwa iman saja tidak cukup tanpa diikuti oleh amal saleh. Ia menjelaskan bahwa iman memberi dasar ontologis yang teramat kokoh bagi kehidupan manusia.

[190] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 70.

[191] Diperkuat dengan ungkapan Helminski "Mereka yang hidup dengan bimbingan pesan Alquran harus mengakui cinta yang dilimpahkan Tuhan pada semua agama, dan setiap yang ada. Kasih Tuhan sampai tidak hanya kepada mereka yang beriman, namun juga kepada yang tidak beriman."

Syafii Maarif mendukung sepenuhnya prinsip kebebasan beragama. Ia menghormati perbedaan tersebut meskipun secara teologis berbeda dengan keyakinannya. Di sini kelihatan jelas bahwa keimanan Syafii Maarif tidak cenderung ternoda apalagi goyah karena keimanan lain, melainkan ia membuka luas hak-hak individu termasuk dalam menentukan keyakinannya.[192] Dalam konteks bernegara seperti Indonesia ini, tentu saja pendirian Syafii Maarif mendapat penguatan secara konstitusional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat satu disebutkan bahwa negara memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, pada satu sisi Syafii Maarif mendapatkan dasar teologis dan pada sisi yang lain penghargaannya terhadap kebebasan beragama berdasarkan konstitusi yang berlaku.

Syafii Maarif mendeskripsikan bahwa iman merupakan pilihan bebas manusia bukannya tanpa alasan. Sebagai sosok "radikal", ia tidak pernah bergerak sebelum mendapat "lampu hijau" dari Alquran. Bagi Syafii Maarif, pilihan bebas untuk memutuskan sebuah keimanan juga berdasarkan landasan normatif dari kitab suci tersebut, bukan sebagai ijtihad yang tidak memiliki akar teologis. Karena itu, iman yang dipaksakan ke dalam hati penganutnya merupakan sebuah ketidakpantasan.[193] Iman yang bersemayam ke dalam hati penganutnya harus datang secara tulus dan murni tanpa ada paksaan eksternal sedikit pun. Menurut Syafii Maarif, itulah yang disebut iman autentik. Karena itu, propaganda religius yang terkesan dipaksakan bertentangan dengan nilai-nilai etis Alquran. Iman adalah pilihan sadar dan bebas. Sadar karena ia dianut dengan penuh pertimbangan emosional dan rasional, bebas karena ia dapat dianut oleh siapa pun dan di mana pun. Tidak ada iman tanpa kesadaran dan kebebasan.

Syafii Maarif terkadang dinilai kontroversial adalah pandangannya terhadap kebenaran dan keselamatan eskatologis yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Menurut Syafii Maarif, pandangan tersebut hanya sebatas menghormati

---

Lihat Kabir Helminski, *The Knowing Heart: A Sufi Path of Transformation* (Boston & London: Sambala, 1999), 199

[192] Fajar Riza Ul-Haq, Direktur Eksekutif MAARIF Institute, *wawancara* 29 September 2010.

[193] QS. Yu>nus/ 10: 99-100.

keyakinan agama lain. Hakikat siapa yang salah dan benar, terpulang pada hak prerogatif Tuhan. Dalam konteks ini, Syafii Maarif tetap memiliki komitmen keislaman yang tidak mungkin goyah, namun terkait dengan keselamatan dalam agama lain, ia hanya sebatas menenggang perbedaan.[194] Sikap Syafii Maarif itu menunjukkan bahwa ia mengedepankan empati. Sikap itu menuntunnya untuk memahami orang lain dari logika berpikirnya. Jika ia mengklaim bahwa Islam adalah agama yang paling benar, maka orang lain juga memiliki hak yang sama untuk menyatakan bahwa agamanya juga demikian.

Lebih lanjut, Syafii Maarif menjelaskan bahwa masing-masing agama memiliki doktrin teologis tentang keselamatan eskatologis yang mesti dihormati. Sementara bagi Syafii Maarif sendiri, keselamatan tentunya ada di dalam agama Islam.[195] Dalam konteks ini, Syafii Maarif hanya sebatas memberikan penghormatan, namun bukan berarti bahwa ia membenarkan jalan keselamatan tersebut sebagaimana kebenaran yang ia yakini dalam Islam. Inilah poin penting yang perlu dicermati mengenai pandangan teologisnya terhadap agama-agama lain. Jika pemikiran Syafii Maarif dilihat dari tiga paradigma teologis yaitu: paradigma eksklusivisme, paradigma inklusivisme dan paradigma pluralisme, maka pemikiran Syafii Maarif berada pada paradigma eksklusivisme. Dalam konteks ini, ia lebih tepat disebut sebagai seorang eksklusivis.

Pada salah bukunya yang berjudul *Al-Qur'an dan Realitas Umat* (2010),[196] Syafii Maarif mencoba memahami dua buah ayat Alquran yang substansinya tentang Umat Yahudi, Umat Nasrani, dan kaum Shabi'in. Dijerjemahkan: "Mereka akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan jika memenuhi tiga kriteria, yaitu: beriman kepada Allah, beriman kepada Hari Kemudian dan melakukan amal saleh".[197] Di dalam buku itu Syafii Maarif tidak menyinggung secara jelas keselamatan dalam agama-agama lain, melainkan ia hanya menyinggung tentang bagaimana hubungan

[194] http://www.muhammadiyah.or.id. [home page on-line]: Internet (diakses tanggal 13 Februari 2024).
[195] Ahmad Syafii Maarif, *Al-Qur'an dan Realitas Umat* (Jakarta: Republika, 2010), h. 49-52.
[196] Ahmad Syafii Maarif, *Al-Qur'an dan Realitas Umat* (Jakarta: Republika, 2010), h. 50.
[197] QS. Al-Baqarah/ 2: 62 dan QS. Al-Ma>'idah/ 5: 69.

antar umat beragama berjalan secara baik dan damai dengan adanya toleransi.[198] Dengan demikian dapat dilihat bahwa kebesan beragama yang menjadi pemikiran Syafii Maarif terfokus pada tataran sosiologis. Meskipun ia menggunakan ayat-ayat Alquran sebagai landasan teologisnya.

Menurut Syafii Maarif, perbedaan antar manusia bukanlah alasan untuk memecah belah, melainkan menjadi sebuah aset yang memperkaya pemahaman visi dan realitas manusia. Dia juga menegaskan bahwa sikap toleransi tidak dapat dipisahkan dari prinsip kesetaraan manusia, karena keadilan dan persaudaraan yang sejati tidak dapat terwujud tanpa pengakuan akan kesetaraan status manusia, baik itu yang beragama, tidak beragama, atau bahkan ateis.[199]

Bagi Syafii Maarif, pokok yang selalu ia sampaikan adalah mengenai kebebasan beragama. Ia menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih agamanya sendiri. Bahkan menurutnya, adalah hak yang harus dihormati jika seseorang tidak memilih agama tertentu. Syafii Maarif berpendapat bahwa Alquran sebenarnya lebih toleran dalam masalah kebebasan beragama daripada kebanyakan umat Islam. Ia mengkritik sikap intoleran umat Islam terhadap perbedaan agama, meskipun Alquran telah memberikan pedoman yang berbeda.[200]

Menurut pandangan Syafii Maarif, kebebasan untuk memilih agama didukung oleh Kitab Suci. Prinsip ini tercermin dalam kalimat "la ikra ha fi al-din" (tidak ada paksaan dalam agama). Syafii Maarif meyakini bahwa kalimat ini adalah keputusan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, seorang Muslim harus memahami dan mematuhi prinsip ini dalam hubungannya dengan penganut agama lain. Menurutnya, ayat tersebut memiliki dua makna utama: Pertama, individu tidak boleh dipaksa untuk menerima suatu agama. Kedua, individu tidak boleh dipaksa dalam masalah kepercayaan. Bagi Syafii Maarif, memaksa seseorang untuk menerima

[198] Ahmad Syafii Maarif, *Al-Qur'an dan Realitas*, 51
[199] Ahmad Syafii Maarif, "*Reactualising*", h. 6.
[200] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h.166.

agama atau iman secara paksa disebut sebagai "keangkuhan teologis".[201] Segala jenis tekanan (paksaan) dalam agama pasti melanggar aturan dan nilai-nilai yang terdapat dalam Alquran. Menurut Syafii Maarif, setiap individu berhak untuk menjalani kehidupan di dunia ini, bahkan jika mereka ateis. Namun, penting untuk tetap menghormati kesepakatan sosial yang ada.[202]

3. Perdamaian Antaragama

Menurut Syafii Maarif, agama adalah pilihan yang disadari dan bertanggung jawab, yang tidak boleh dipaksa kepada orang lain. Oleh karena itu, memaksa agama kepada orang lain bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama itu sendiri. Menurutnya, perjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, perdamaian, dan persaudaraan adalah misi utama agama, bukan sekadar meningkatkan jumlah pengikutnya. Bagi Syafii Maarif, perkembangan jumlah umat harus terjadi secara alamiah seiring dengan kedewasaan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Ia juga menjelaskan bahwa agama yang tidak memberikan jawaban konkret terhadap masalah kemanusiaan akan sulit menciptakan masa depan yang bermakna. Agama harus berperan sebagai sumber spiritual, etis, dan intelektual agar relevan dalam setiap zaman dan menyediakan jawaban yang tepat terhadap isu-isu masa kini. Dalam konteks Indonesia, agama dapat berfungsi sebagai pendorong atau penghambat pembangunan tergantung pada apakah pembangunan tersebut meningkatkan martabat manusia sesuai dengan prinsip Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, atau menimbulkan penyimpangan moral dan anggaran yang berakibat fatal. Syafii Maarif menegaskan bahwa agama harus terus memberikan peringatan tanpa putus asa, karena manusia ditempatkan pada urutan pertama dalam perhatian agama, dengan tujuan utama untuk meningkatkan martabat manusia. Dengan demikian,

[201] Ahmad Syafii Maarif, “Alquran sebagai Fundamen Toleransi”, kata pengantar untuk buku Zuhairi Misrawi, Alquran Kitab Toleransi: Inklusivisme, *Pluralisme dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007), xxvii-xxxiii.

[202] Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar*, 232-233.

agama dapat menjadi sumber kedamaian bagi umat manusia dan menjadi pilihan yang relevan bagi manusia di era modern ini yang semakin kehilangan arah.[203]

Syafii Maarif menganggap bahwa berbagai ketidakberesan dalam praktik keagamaan merupakan kenyataan yang tak terhindarkan. Namun demikian, setiap penganut agama setidaknya harus mampu menggunakannya sebagai alat untuk mengevaluasi dan memperbaiki perilaku serta sikap hidup mereka, sehingga pesan-pesan agama yang senantiasa disampaikan di tempat ibadah tidak menjadi sia-sia. Di sini, Syafii Maarif melihat bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk membentuk masa depan perilaku mereka. Baik dan buruknya gambaran agama dalam sejarah tidak ditentukan oleh rencana ilahi, tetapi merupakan hasil dari skenario yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.[204]

Penting untuk memahami bahwa penilaian tentang kebaikan dan keburukan agama dalam sejarah tidak ditentukan oleh rencana Tuhan, melainkan oleh tindakan manusia sendiri. Syafii Maarif menyarankan agar semua bagian dari gerakan Islam memahami kondisi sosial masyarakat serta kebutuhan nyata yang ada. Menurutnya, jika hal ini diabaikan, Islam mungkin hanya menjadi formalitas belaka dan keaslian nilai-nilai kemanusiaan yang halus, indah, dan menyejukkan dalam agama wahyu itu bisa hilang.[205]

Oleh karena itu, Syafii Maarif menjelaskan bahwa tingkat keberagamaan seseorang bisa dilihat dari moralitasnya dalam berinteraksi dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan.[206] Kualitas hubungan individu dengan Tuhan harus tercermin dalam cara mereka berhubungan secara horizontal dengan sesama makhluk dan lingkungannya. Keselarasan dalam tiga dimensi ini menjadi syarat utama bagi

---

[203] Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas*, h.35-36.

[204] Dari sudut pandang teologis, Syafii Maarif lebih condong pada gagasan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk membuat pilihan (free will) daripada hanya bersikap pasrah pada takdir (predestination).

[205] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 302

[206] Ahmad Syafii Maarif, *Menggugah Nurani Bangsa* (Jakarta: MAARIF Institute, 2005), h. 26.

keberlangsungan peradaban yang mungkin akan berlangsung lama, termasuk di wilayah Nusantara.[207]

Syafii Maarif menempatkan manusia di posisi utama dari tiga dimensi yang dia gambarkan dengan sangat matang, yaitu karena dia yakin bahwa persoalan kemanusiaan adalah inti dari ajaran agama. Oleh karena itu, Syafii Maarif menekankan pentingnya mengaktifkan agama untuk meningkatkan martabat dan nilai manusia. Dengan demikian, agama dapat membuktikan dirinya sebagai sumber kedamaian bagi umat manusia, dan semakin banyak orang akan memilih agama sebagai panduan dalam menghadapi ketidakpastian zaman modern.

Syafii Maarif menegaskan pentingnya mengembangkan budaya yang penuh sopan santun, tanpa memandang perbedaan agama, etnis, atau ideologi politik, asalkan semua itu dilakukan dengan integritas dan ketulusan. Sikap rasialis, di mana manusia terjebak dalam kekangan kehidupan dan terisolasi dalam ruang-ruang kemanusiaan yang gelap, harus ditangani oleh semua individu, terutama yang menjalankan ajaran agama. Pemakaian agama sebagai alat untuk mendukung sikap rasialis adalah tindakan yang merusak dan bernuansa politis.[208] Dengan populasi bumi yang semakin padat, semua penduduk bumi memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan menjadikannya fokus utama dalam setiap kegiatan keagamaan.

Pengikut agama-agama di seluruh dunia percaya bahwa tujuan utama agama yang mereka anut adalah membimbing manusia menuju keselamatan dalam kehidupan di dunia dan setelah kematian. Mereka menyatakan bahwa agama mereka mengajarkan kasih sayang terhadap sesama manusia dan ciptaan Tuhan lainnya, termasuk alam, hewan, dan benda mati. Oleh karena itu, banyak ahli dan pemimpin agama dari berbagai agama terlibat dalam dialog untuk menyelesaikan konflik keagamaan dan mempromosikan perdamaian. Di tingkat global, muncul pandangan tentang agama universal yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan

[207] Ahmad Syafii Maarif, *Menggugah Nurani*, h. 26.
[208] Ahmad Syafii Maarif, *Menggugah Nurani*, h. 27-28.

kerjasama, tanpa membedakan asal teologis atau unsur transcendental dari agama tertentu.[209]

Menurut Syafii Maarif, ideologi agama universal terwujud dalam etika bersama. Meskipun ia tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai ideologi agama universal, namun ia mengakui esensinya. Etika ini dianggap sebagai faktor penyatuan yang mengikat keragaman agama dan latar belakang budaya. Syafii Maarif percaya bahwa masalah benar dan salah adalah hal internal bagi setiap agama. Namun, ketika umat beragama berkumpul, mereka membahas masalah bersama. Dalam konteks sosial semacam itu, Syafii Maarif memandang setiap umat beragama sebagai setara.

Syafii Maarif meyakini bahwa perdamaian dan kemakmuran bagi kehidupan manusia di bumi ini adalah esensi dari segala ajaran agama. Keyakinan ini memberikan semangat untuk memandu hubungan kasih sayang antara manusia, lingkungan, dan Tuhan, serta menegaskan pentingnya tanggung jawab manusia untuk menjaga bumi dengan membatasi kebebasannya. Inti ajaran setiap agama selalu mengarah pada perdamaian, di mana saling menghormati dan menghargai secara tulus, komunikatif, dan terbuka merupakan hal yang penting. Tidak ada tempat untuk saling mencurigai dan menyalahkan, yang lebih penting adalah mengembangkan sifat tolong-menolong sebagai bentuk nyata dari agama dan rasa kemanusiaan yang mendalam. Kebahagiaan dan keharmonisan masyarakat seringkali terganggu oleh kekecewaan terhadap kondisi ekonomi, politik, dan hukum yang tidak adil. Agama seharusnya menjadi sumber motivasi dan memberikan harapan baru bagi para pengikutnya.[210] Namun, terkadang agama kesulitan untuk menyelesaikan masalah karena kurangnya pemahaman tentang agama itu sendiri atau kesalahan dalam menafsirkan ajaran-ajarannya. Namun, sayangnya, keberagaman agama sering disalahpahami dan bahkan dapat menciptakan perasaan superioritas dan saling menyalahkan di antara para pengikutnya. Hal ini sering kali menghasilkan

[209] Maulana Wahiduddin Khan, Islam and Peace, 159-160; Roger Boase dan Hasan bin Talal, ed., *Islam and Global Dialogue: Religious Pluralism and The Pursuit of Peace* (London: Ashgate Publishing, 2010), xv

[210] Komaruddin Hidayat, *Wahyu di Langit*, h. 1-15.

ketidakharmonisan sosial dan meningkatkan risiko konflik. Lebih lanjut, agama kadang juga disalahgunakan untuk menyembunyikan perilaku amoral seseorang.

Syafii Maarif khawatir dengan kondisi tersebut. Baginya, ada banyak tindakan amoral yang dilakukan, bahkan seringkali atas nama Tuhan. Nilai-nilai agama yang mulia diinjak-injak dan disalahgunakan dengan menggunakan pembenaran teologis dan kutipan-kutipan sakral. Bahkan, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Pancasila, mengalami perlakuan yang tidak lebih baik daripada agama. Falsafah tersebut selalu dimanfaatkan sebagai alasan bagi mereka yang ingin menyembunyikan nafsu kekuasaan sebagai kepentingan tersembunyi.[211]

Menurut Syafii Maarif, agama tidak seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan atau untuk merendahkan orang lain. Pada dasarnya, agama adalah tentang memperbaiki masyarakat sehingga manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Bagi Syafii Maarif, aktivitas ini menjadi penanda apakah seseorang benar-benar beragama atau tidak, apakah ia beriman secara otentik atau hanya menyembunyikan kepalsuan di balik lapisan iman. Baginya, agama yang berfungsi adalah agama yang mampu menggabungkan kekuatan spiritual dengan tindakan yang baik dan luhur untuk membangun kehidupan bersama. Dengan kata lain, agama yang mampu mengendalikan arus peradaban, bukan yang terbawa oleh kekuatan sosial yang merusak.[212]

4. Dialog Antar Umat Beragama

Kata "dialog" berasal dari kata Yunani "dia-logos", yang berarti percakapan antara dua pihak atau "dua pembicara". Sebaliknya, "monolog" adalah bicara seorang diri. Secara sederhana, dialog adalah pertukaran nilai antara dua orang atau lebih yang terlibat dalam percakapan. Selain itu, dialog juga mencakup usaha untuk memahami sudut pandang orang lain yang berbeda. Salah satu langkah penting yang memiliki potensi positif untuk meningkatkan kecerdasan umat adalah melalui dialog. Dialog tidak hanya tentang mempertahankan atau membela agama dari serangan luar,

[211] Ahmad Syafii Maarif, *Menggugah Nurani*, h. 28-29.
[212] Ahmad Syafii Maarif, *Menggugah Nurani*, 30.

tetapi juga tentang upaya untuk memahami keyakinan dari agama-agama lain.[213] Dalam konteks sosial, dialog adalah tempat di mana kita bisa belajar tentang beragama, yang berfungsi sebagai sarana peningkatan pemahaman dalam berbagai aspek, seperti pikiran, perasaan, dan tindakan. Ketika umat beragama dapat mengalami pemahaman yang lebih dalam melalui dialog antar-agama yang bersifat inklusif, maka kecurigaan antar penganut agama dapat diminimalkan. Dialog menjadi kunci utama dalam mewujudkan harmoni antar umat beragama.

Menurut pandangan Syafii Maarif, percakapan antar umat beragama dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat jika setiap pihak bersedia menerima beragam latar belakang identitas yang dimiliki. Untuk itu, Syafii Maarif mengajukan sebuah filsafat dialog yang dijelaskan dalam kalimat, "Menjadi saudara dalam keberagaman dan memiliki perbedaan dalam persaudaraan."[214] Baginya, keyakinan seseorang tidak akan tergoyahkan karena keterbukaannya terhadap pemeluk agama lain, melainkan keterbukaan tersebut justru akan menjadi sumber kekuatan. Percakapan antar umat beragama dijalani untuk merangkul berbagai perbedaan dan mengelolanya dengan dinamis dan produktif.[215]

Menurut Syafii Maarif, sebuah tatanan masyarakat yang belum matang secara psikologis dan emosional sering kali menganggap perbedaan sebagai bentuk permusuhan. Ini juga mengurangi pentingnya toleransi. Menurutnya, kebesaran peradaban sering kali muncul dari perbedaan pandangan yang didasari oleh sikap toleransi. Secara praktis, Syafii Maarif meyakini bahwa konflik pendapat, jika dibicarakan dengan baik dan dewasa, dapat menghasilkan pandangan yang lebih kuat dan komprehensif. Oleh karena itu, menjadi tidak etis bagi seseorang untuk mengklaim kebenaran mutlak sebelum pendapatnya diuji dan dibicarakan secara sehat dalam suasana toleransi dan keterbukaan.[216]

---

[213] D. Hendropuspito, O.C., Sosiologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1983), h. 172.
[214] Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar*, h. 233.
[215] Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar*, h. 233.
[216] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 178.

Syafii Maarif mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat terjadi kelesuan spiritual. Ini terlihat dari pemisahan antara kedalaman spiritual individu dan partisipasi sosial. Padahal, menurutnya, kedua hal tersebut saling terkait erat. Ini berarti bahwa keberhasilan kesalehan pribadi harus tercermin dalam berbagai perubahan positif yang diperlihatkan oleh seorang Muslim dalam kehidupan masyarakat. Ia mencatat bahwa pelaksanaan formal dan ritualistik Islam tidak selalu membawa dampak positif dalam kegiatan sehari-hari. Sementara itu, tanda-tanda ketakwaan kepada Tuhan seharusnya terlihat dalam perbuatan baik dan bantuan yang diberikan kepada sesama manusia. Syafii Maarif juga menyadari bahwa meskipun umat Islam umumnya menerima Alquran dengan baik, namun semangatnya sering kali hilang dalam kegiatan sehari-hari mereka.[217]

Syafii Maarif berkeinginan agar pelaksanaan berbagai bentuk ritual yang dilakukan oleh umat Muslim secara terus-menerus memiliki konsekuensi yang logis terhadap pembentukan tata kehidupan sosial yang baik dan terang benderang. Dia menetapkan skala perbandingan, di mana jika ritualisme terus ditekuni dari waktu ke waktu, akan menghasilkan berbagai kebajikan sosial. Namun, jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka struktur sosial masyarakat Indonesia akan terbukti rapuh meskipun tampak religius secara formal.[218] Oleh karena itu, inti dari pemikiran Syafii Maarif dalam konteks ini adalah bagaimana praktik ritual dapat membawa kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat.

Dalam usahanya mencari solusi atas masalah bangsa ini, Syafii Maarif menawarkan dua hal. Pertama, pentingnya menelusuri sejarah kemajuan dan kemunduran peradaban Islam masa lalu, sambil menjaga nilai-nilai lama yang masih relevan. Bagian-bagian yang tidak bermanfaat harus ditinggalkan, tanpa dipertahankan. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan mengadopsi nilai-nilai baru yang dianggap lebih baik.[219]

---

[217] Ahmad Syafii Maarif, *Menggugah Nurani*, h. 84.
[218] Ahmad Syafii Maarif, *Menggugah Nurani*, h. 85.
[219] Ahmad Syafii Maarif, Alquran, *Realitas Sosial*, h. 4.

Kedua, ia mengajak umat Islam, terutama pemegang kebijakan, untuk menggali nilai-nilai moral yang terdapat dalam Alquran, sumber otoritatif agama. Namun, penggalian tersebut harus dilakukan dengan dialog yang jujur dan meninggalkan keserakahan pada hal-hal duniawi.[220]

Syafii Maarif mengamati bahwa satu aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai pendorong utama keberhasilan misi pencerahan kepada masyarakat adalah cara pandang atau paradigma dalam beragama. Dia menyatakan bahwa generasi pertama umat Islam sungguh mampu mengintegrasikan doktrin Alquran dengan realitas sosial secara dialektis.[221] Mereka memandang Alquran dan realitas sosial sebagai satu kesatuan yang utuh.[222] Oleh karena itu, memahami makna Alquran tanpa memperhatikan realitas sosial akan membuat Alquran menjadi terisolasi. Dengan kata lain, keberadaan sosial Alquran akan terputus dengan sendirinya.

Selanjutnya, Syafii Maarif menjelaskan bahwa esensi paradigma agama umat Islam generasi pertama harus disesuaikan dengan zaman sekarang. Meskipun Alquran turun berabad-abad yang lalu dan telah diterima oleh ribuan generasi umat manusia, kita harus menghadapinya seolah-olah Alquran turun pertama kali saat ini. Artinya, memahami Alquran seperti yang dilakukan oleh umat Islam pada masa awal adalah menganggap Alquran sebagai panduan utama dalam hidup, tanpa mencampuradukkan dengan kepentingan pribadi yang sementara. Ajaran-ajaran suci dalam Alquran seharusnya menjadi petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Ia yakin bahwa umat Islam dapat terhindar dari pemahaman Alquran yang terkontaminasi oleh berbagai kepentingan yang seringkali muncul. Setiap perintah dan larangan yang disampaikan oleh Alquran seharusnya dipahami dalam konteks masa kini, sehingga pemahaman terhadap Alquran akan terus berubah seiring waktu.[223] Revitalisasi paradigma agama akan menghasilkan sikap beragama yang sesuai dengan konteks.

---

[220] Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas*, h. 113.
[221] Ahmad Syafii Maarif, *Al-Qur'an dan Realitas*, h. 3..
[222] Ahmad Syafii Maarif, *Al-Qur'an dan Realitas*, h. 3.
[223] Hamid Basyaib, "Agama Bukan Pedoman Mati", dalam *Jaringan Islam Liberal (JIL)*, edisi 11 Oktober 2004, h. 114.

Setelah mengidentifikasi akar permasalahan terkait anomali sosial, yang beberapa pelakunya adalah individu yang memeluk agama Islam, dengan proses memperbaharui paradigma keagamaan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai agama tersebut.

Dalam sudut pandang filsafat kebudayaan, kesadaran akan hal ini terletak dalam ranah ontologis, yang artinya kesadaran eksistensial dalam memahami posisi diri dalam konteks realitas luar. Tingkat kesadaran ontologis ditandai oleh cara manusia menjaga jarak dengan realitas di luar dirinya. Dalam keadaan ini, manusia mampu mempertimbangkan posisinya sendiri dalam dinamika kehidupan dan merencanakan tindakan untuk membangun interaksi yang sinergis dengan keberagaman realitas di Bumi.[224]

Kemudian, langkah dari ranah ontologis ini menuju ranah aksiologis di mana individu yang telah memiliki pemahaman mendalam telah menemukan makna eksistensinya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Tahap teritori aksiologis juga dikenal sebagai tahap fungsional yang menunjukkan pelaksanaan eksistensi diri. Ini menandakan adanya hubungan yang dinamis antara manusia dan realitas di sekitarnya yang menghasilkan sesuatu yang memiliki arti. Pada ranah aksiologis, Islam muncul sebagai kekuatan yang kuat yang membimbing para penganutnya untuk melakukan perubahan sosial menuju terbentuknya masyarakat yang tercerahkan. Ajaran Islam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, harus memiliki kemampuan untuk membebaskan manusia menuju keberagamaan yang murni yang menghargai keragaman di dunia ini. Sebagaimana termaktub pada surat at-Taubah ayat 71:

[224] C.A van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 66.

﴿ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾ ﴾

Terjemahnya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.[225]

Syafii Maarif menjelaskan bahwa di Indonesia, Islam masih memiliki banyak keunggulan, terutama dalam hal toleransi antar umat beragama. Meskipun jumlahnya lebih banyak, umat Islam Indonesia tetap memberikan kebebasan penuh bagi minoritas untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ini sesuai dengan konstitusi yang berlaku, menurut Syafii Maarif. Kebebasan beragama dan penentuan keyakinan merupakan prinsip yang sesuai dengan sistem demokrasi Indonesia.[226] Bagi Syafii Maarif, konsep keesaan Tuhan dan perdamaian nasional merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam kehidupan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam.

Keadaan ideal seperti ini menjadi tujuan sosial dari Syafii Maarif. Dia menginginkan Islam yang diimplementasikan oleh umatnya untuk berdiri teguh di bumi dan menyebabkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kerangka kemanusiaan. Semua orang harus merasakan manfaat dari keberadaan Islam, bahkan orang yang menyatakan diri sebagai ateis sekalipun. Seperti yang disebutkan oleh R. William Liddle, Syafii Maarif bermimpi tentang Indonesia yang memiliki kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik yang sejati, serta

[225] QS. Al-Taubah 9/71
[226] Ahmad Syafii Maarif, *Tuhan Menyapa Kita*, h. 31-32.

benar-benar demokratis. Menurut pandangan Liddle, model Islam yang dipahami dan diterapkan oleh Syafii Maarif dapat disebut sebagai Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, seperti misi Islam yang selalu dia perjuangkan.[227]

Menurut Syafii Maarif, konsep Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam tidaklah menjadi sesuatu yang sudah pasti. Misi tersebut harus terus diperjuangkan melalui pemikiran dan tindakan konkret. Menurutnya, konsep tersebut harus terus disegarkan. Syafii Maarif memiliki dua argumen yang mendasari pandangannya. *Pertama*, Islam bertujuan untuk menciptakan tata sosio-politik yang baik berdasarkan pada landasan etika yang kuat untuk mewujudkan prinsip rahmat bagi seluruh alam sesuai dengan konteks ruang dan waktu. *Kedua*, pemahaman terhadap ajaran transendental (wahyu) tidak pernah menjadi mutlak seperti ajarannya itu sendiri. Oleh karena itu, otoritas seseorang dalam memahami Islam harus bisa ditinjau kembali agar dapat memperoleh semangat yang lebih segar dan kontekstual.[228]

Pemahaman ini menjelaskan bahwa Islam akan selalu menampilkan kultur yang berbeda di berbagai tempat. Dalam konteks Indonesia, Islam yang diinginkan oleh Syafii Maarif, secara historis, sesuai dengan konteks keindonesiaan.

5. Menolak Ekstremisme

Indonesia seperti sebuah pesawat besar yang terbang tinggi di langit dengan banyak penumpang yang berasal dari berbagai latar belakang. Keanekaragaman ini tidak hanya terlihat dari asal geografis penumpang, yang meliputi wilayah dari Sabang hingga Merauke, tetapi juga dari beragam ras, suku, budaya, tradisi, bahasa, dan agama. Di antara mereka, ada pula yang memegang keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tersebar di berbagai sudut nusantara. Sebagai warga Indonesia, mereka terus bersyukur atas keberagaman ini, yang merupakan anugerah langka di dunia.

---

[227] Lihat R. William Liddle, "Syafii Maarif dan Indonesia". Sebuah Kata Pengantar untuk buku "Mencari Autentisitas". Lihat Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas*, h. xvi.

[228] Ahmad Syafii Maarif, *Independensi Muhammadiyah: Di Tengah Pergumulan Islam dan Politik* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), h. 14.

Banyak pihak melihat penggunaan istilah kerukunan beragama sebagai sesuatu yang bertentangan. Bagaimana mungkin, agama yang pada umumnya dianggap sebagai penuntun dan jalan kebenaran, kasih sayang, dan kebaikan manusia, masih memerlukan pembicaraan tentang kerukunan? Seharusnya, kedamaian, keadilan, dan keselarasan seharusnya sudah ada secara alami dalam setiap agama dan dalam setiap masyarakat yang telah diberkati dengan kehidupan keagamaan yang aktif, bersemangat, dan konsisten. Penggunaan istilah kerukunan beragama menunjukkan paradoks antara peran substansial agama sebagai sumber kebaikan di satu sisi, dan realitas sosial konkret yang menunjukkan potensi konflik, pertentangan, perbedaan, bahkan kekerasan di sisi lain.

Di tengah merebaknya berbagai aliran ekstremisme dan radikalisme, Ahmad Syafii Maarif menguraikan dampak intoleransi dan politik identitas, di mana intoleransi dan konflik yang muncul dari politik identitas tidak menghargai keberagaman dan pluralitas, yang pada akhirnya akan memecah belah komunitas keagamaan dan memicu pertikaian sosial.[229] Bahkan, pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, telah menunjukkan prinsip-prinsip pluralisme dan multikulturalisme di masa lalu dengan mendirikan sekolah di mana siswa-siswanya termasuk beberapa orang Belanda non-Muslim yang bergabung dengan siswa Muslim saat itu.[230]

Tidak kah Allah SWT telah menjelaskan bahwa dalam proses penciptaan manusia di bumi, perbedaan sudah tampak sejak awal, seperti perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), ras serta suku bangsa (seperti Melayu, Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan lain-lain), bahasa (contohnya bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Italia, Mandarin, dan sebagainya), serta budaya? Allah menghadirkan perbedaan tersebut sebagai sebuah keindahan untuk memupuk rasa saling menghargai dan mencintai satu sama lain. Melihat Indonesia sebagai negara yang kaya akan

[229] 7 Ahmad Syafi‟i Maarif, *Politik Idetitas* …, h. 7.

[230] Materi dalam webinar yang diselenggarakan oleh C-Genial jelang Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Abdul Mu‟ti, M.Ed. tentang *Jalan Pendidikan Mewujudkan Pendidikan Pluralitas yang disampaikan oleh Ibu Diyah P.* pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 20.00-21.30. Lihat juga Dr. Prof. Komaruddin Hidayat & Prof. Dr. Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE, 2006), h. 12

keberagaman, baik dalam bentuk pulau-pulau, ras, etnis, maupun suku, dapat menjadi teladan dalam menerapkan pendidikan yang menghargai keberagaman budaya.

Pentingnya lembaga pendidikan dan agama sebagai motor penggerak untuk menciptakan masyarakat yang beragam dan menghormati satu sama lain adalah agar penyebaran intoleransi antar kelompok tidak mengganggu kedamaian warga negara. Dengan demikian, setelah menyelesaikan pendidikan formal maupun non-formal, siswa akan mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk memperjuangkan perubahan sosial melalui proses transfer ilmu, nilai, dan prinsip.[231]

Ide pembelajaran yang penting untuk mencapai sasaran menerapkan keberagaman adalah mengubah serta memperkuat kembali nilai-nilai budaya lokal, lalu mengintegrasikannya dengan gagasan multikulturalisme. Tantangan utama setelahnya adalah merancang kurikulum yang menyeluruh dengan pendekatan budaya.[232]

Kebebasan beragama sebagai bagian dari sikap dan konsep Islam adalah upaya untuk melawan segala bentuk radikalisme yang belakangan ini muncul di Indonesia. Radikalisme yang mengarah pada fanatisme dan kekerasan akan menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Ada kesadaran bahwa Islam saat ini menghadapi krisis terhadap masa depan agama. Namun, argumen tersebut ditentang oleh tokoh pemikir Islam seperti Fazlur Rahman, yang menganggapnya sebagai reaksi rasional terhadap tantangan modernitas dalam dunia Islam.[233]

Radikalisme memiliki hubungan yang erat dengan pemahaman manusia terhadap ajaran Islam dalam konteks kehidupan. Saat manusia menjalani kehidupannya, perbedaan dalam memahami agama muncul karena kita memiliki sudut pandang yang beragam dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Perbedaan pandangan ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, pendidikan,

---

[231] Ahmad Syafi‟i Ma‟arif, *Politik Identitas*…, h. 96.
[232] Ahmad Syafi‟i Ma‟arif, *Politik Identitas*…, h. 97.
[233] Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari moderasi, keutamaan dan kebangsaan*, Cet..1, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), h. 253

dan pengalaman individu. Jika seseorang memiliki pandangan yang ekstrem, maka akan muncul tindakan yang merugikan dalam kehidupannya.[234]

Radikalisme menjadi masalah serius di Indonesia, seperti yang disoroti oleh sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa pemikiran radikal sudah merambah generasi muda. Islam radikal muncul karena sebagian masyarakat atau kelompok menginterpretasikan teks agama secara harfiah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pandangan radikalisme yang dapat berujung pada kekerasan berpotensi menimbulkan gangguan sosial. Satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan membangun kembali kemampuan dalam berinteraksi secara toleran antar komunitas agama.[235]

Ahmad Syafii Maarif mengajak seluruh umat Muslim di Indonesia untuk mendukung konsep Pancasila sebagai tujuan utama bagi seluruh penduduk Indonesia. Meskipun dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk menjalankan keyakinan agama mereka masing-masing, namun hal tersebut tidak berarti Indonesia harus menjadi negara Islam hanya karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Kendati Islam menjadi mayoritas di Indonesia, namun umat Islam di Indonesia sangat menghargai aturan dan konstitusi negara.[236]

Pada konsep tersebut juga ada di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨ ﴾

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu

[234] 3 Ali Nurdin, *Model Moderasi* …, h 87.

[235] Rido Putra, "Moderasi Islam Ahmad Syafii Maaarif", dalam *thesis* magister aqidah dan filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[236] Ahmad Syafii Maarif, *Tuhan Menyapa* …, h. 54.

terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[237]

Berdasarkan konsep keadilan yang terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 8, dijelaskan bahwa keadilan adalah tindakan yang paling bertakwa atau disertai kesadaran dalam diri serta mengutamakan prinsip ketuhanan. Seseorang dikatakan beriman saat ia mampu bertindak adil sesuai dengan bagian masing-masing, dan jika tujuan keadilan tercapai, maka akan lebih mendekatkan diri kepada ketaqwaan karena ketaqwaan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam beberapa kasus kekerasan, Syafii Maarif menyebutkan bahwa kegiatan keagamaan sering mengalami kendala karena masalah keamanan. Ia menjelaskan bahwa gerakan keagamaan yang radikal, yang ia sebut sebagai "polisi swasta", seringkali mengambil alih peran polisi yang seharusnya. Mereka melakukan kekerasan terhadap individu yang dianggap melanggar ajaran agama. Contohnya adalah tragedi 1 Juni 2008 di mana Front Pembela Islam (FPI) menyerbu demonstrasi damai AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan). Hal ini mengubah sikap saling pengertian yang diharapkan dari pemuka agama menjadi radikalisasi agama. Kondisi ini menuntut aparat keamanan untuk bertindak lebih tegas.[238]

Komitmen Syafii Maarif sebagai tokoh agama dalam mempromosikan perdamaian antar umat beragama dapat dilihat dari kesediaannya untuk memberikan kuliah dalam Konferensi "Teologi Katolik di Gereja Dunia" pada 24-27 Juli 2010 di Tronto, Italia. Dia diundang untuk mewakili intelektual Muslim. Syafii Maarif memberikan pidato pada pembukaan acara "Agama, Etika, dan Dialog" pada tanggal 24, di mana dia diminta untuk berbicara tentang "Tantangan Etika Global dalam

[237] QS. Al-Maidah 5/8.

[238] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 190. Lihat juga Lihat “Syafii Maarif Pembicara di Konferensi Teolog Katolik Sedunia”, didapat dari http://www.antaranews.com/ [home page on-line]: Internet (diakses tanggal 10 Februari 2024)

Perspektif Islam" bersama Kardinal Bruno Forte (Uskup Kepala Keuskupan Chieti-Vasto, Italia) dan Prof. Mercy Amba Oduyoye (Sekolah Teologi Trinity, Ghana).[239]

Dari pertemuan tersebut, dapat ditekankan dua hal: Pertama, Syafii Maarif mengajak setiap orang yang beragama untuk kembali kepada ajaran agamanya dengan baik. Jika ajaran agama dipahami dan diamalkan, maka akan menghasilkan kebaikan bersama. Kedua, Syafii Maarif menegaskan bahwa berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh penganut agama tertentu bukanlah hanya tanggung jawab individu tersebut, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara kolektif. Tindakan yang dilakukan oleh Syafii Maarif merupakan contoh positif yang harus diikuti oleh pemuka agama secara luas dan berkelanjutan.

Syafii Maarif juga menggambarkan gerakan fundamentalisme seperti HTI dan FPI sebagai "khawarij gaya baru". Meskipun ada kesamaan dalam upaya penegakan syariat Islam antara Khawarij, HTI, dan FPI dalam beberapa aspek, namun ada perbedaan signifikan di antaranya. Contohnya, kelompok Khawarij seperti Sekte Al-Azariqah melakukan tindakan radikal seperti pembunuhan terhadap mereka yang berbeda pandangan.[240] Tindakan semacam ini tidak dilakukan oleh HTI dan FPI. Selain itu, doktrin Khawarij mengizinkan pembunuhan terhadap orang di luar kelompok mereka, yang berbeda dengan doktrin HTI dan FPI. Sikap terhadap variasi keislaman semacam ini menunjukkan ketidak toleransian yang kurang oleh Syafii Maarif.

Syafii Maarif menjelaskan bahwa pada zaman ini (sewaktu ia masih hidup), manusia tinggal berdampingan dengan individu-individu yang memiliki keyakinan

[239] Dalam penjelasannya, Syafii Maarif menyatakan bahwa tantangan global yang berkaitan dengan kemanusiaan menuntut pemimpin agama untuk mengkaji kembali nilai-nilai moral agama, karena masalah-masalah kemanusiaan saat ini sangat mengancam prinsip keadilan bagi umat manusia itu sendiri. Kekhawatiran yang dirasakan oleh gereja saat ini juga dirasakan oleh agama lain, termasuk Islam. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang terbuka dalam membangun kembali solidaritas dan kerjasama untuk memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan. Keterlibatan Syafii Maarif dalam konferensi ini menunjukkan pengakuan dari pihak gereja akan pentingnya dialog dan toleransi dalam mencapai kesamaan pandangan dengan dunia Muslim. Ini merupakan kali pertama perwakilan Muslim diundang untuk berbicara di hadapan para pemimpin teolog Katolik dari seluruh dunia, menunjukkan langkah progresif dalam memperkuat hubungan lintas agama.

[240] Lihat defenisi *khawarij* pada Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986), h. 16-17.

agama, kebangsaan, ras, atau aliran yang berbeda, yang semakin terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan yang dulunya dianggap sebagai hal yang perlu dihindari kini menjadi bagian dari rutinitas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Bahkan, menurutnya, keberagaman dalam berbagai segi adalah hal yang alami dalam kehidupan manusia. Syafii Maarif berharap bahwa masyarakat yang terdiri dari beragam varian keagamaan harus menjadi wadah di mana perdamaian ditanamkan. Lebih dari itu, berbagai variasi tersebut harus dilihat secara positif. Dia menyatakan bahwa fundamentalisme sebenarnya menjadi penghalang dalam memahami dan mengelola keberagaman tersebut.[241] Oleh karena itu, fundamentalisme agama mendapatkan konotasi negatif baru ketika cenderung mengganggu keseimbangan sosial yang sudah terjalin baik dalam masyarakat.

Menurut Syafii Maarif, fundamentalisme kadang-kadang tumbuh subur di banyak tempat ibadah. Baginya, fungsi asli tempat ibadah yang seharusnya memasyarakatkan manusia telah berubah menjadi tempat penanaman doktrin yang bersifat radikal.[242] Dalam konteks hubungan antar umat beragama di beberapa wilayah Indonesia, kecenderungan kekerasan yang berbasis agama dan konflik etnis yang semakin meningkat menjadi ancaman serius bagi masa depan kehidupan bersama dalam masyarakat yang sangat beragam ini. Kekerasan semacam itu tentu tidak boleh dibiarkan berkembang. Menurut Franz Magnis Suseno, hal tersebut merupakan bagian dari upaya semua pihak dalam masyarakat untuk mencari solusi dari ancaman konflik agama dan etnis.

Berdasarkan paparan diatas, maka Syafii Maarif bahwa sebenarnya peran dan fungsi agama yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan pencerahan, bukan hanya berasal dari aspek teologis-etis agama, tetapi juga sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai. Meskipun kekerasan yang timbul akibat fundamentalisme harus dianggap sebagai ancaman terhadap kemanusiaan secara bersama-sama dan filosofi yang mendasari fundamentalisme cenderung pada rasa benci juga fanatisme. Ia menyarankan agar kita menghentikan kekerasan sektarian antara umat beragama,

[241] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai*, h. 172.
[242] Ahmad Syafii Maarif, *Alquran dan Realitas Umat*, h. 14.

terutama di Indonesia, dengan menerapkan nilai-nilai inklusivisme yang tidak egois dan tidak eksklusif sebagai solusi terbaik.

C. Relevansi Kebebasan Beragama Terhadap Pemikiran Kebangsaan

Perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk ‚satu kesatuan sebagai bangsa ‚nation' dan ‚membentuk negara yang merdeka' penuh dengan dinamika dan pasang surut. Dimulai dari Perjuangan para pemuda, sejak 1908 yang selalu kita peringati dengan Hari kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 1908, disitulah kita telah mengenal Kehidupan Berbangsa dan berpolitik; dan pada tanggal 20 Mei juga, pada tahun 1965 Presiden Sukarno, mendirikan Lemhannas RI. Setelah itu dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, para pemuda di seluruh Indonesia berkumpul dari perwakilan pemuda di seluruh Indonesia.

Dari berbagai peristiwa perjalanan perjuangan tersebut ada suatu peristiwa yang perlu terus kita jadikan sebagai catatan penting, karena pada saat-saat itulah sebuah komitmen atau konsensus bangsa diletakkan, oleh para pemuda. Peristiwa dimaksud adalah ‚Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian sehari setelah itu dilanjutkan dengan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara'. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsensus nasional (semua warga bangsa) bahwa pengaturan kehidupan berkebangsaan dan kehidupan bernegara dalam negara Indonesia yang dibentuk disepakati dengan dilandasi oleh ideologi negara yang disebut Pancasila, dilandasi oleh sebuah konstitusi negara yang disebut UUD NRI Tahun 1945, disepakati mengenai konsepsi bentuk negaranya adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dan disepakati bahwa masyarakatnya berada dalam satu ke-Indonesia-an yang terdiri dari berbagai suku/ras/etnis, budaya, agama dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan dalam Bhinneka Tunggal Ika.[243]

Konsensus nasional tersebut menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa penghianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis, coup

[243] Rowi Jamaluddin, Menggugah cita-cita Nasionalisme.(Jakarta: Pustaka Media). h. 55

d'Etat, bahkan perjuangan politik yang legal melalui Konstituante, yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk merubah atau mengganti konsensus tersebut dapat diatasi, khususnya oleh para pemuda, yang kita kenal dengan angkatan 66, dan diteruskan pada tahun 1998, bagaimana para pemuda dengan semangat tanpa pamrih, memperjuangkan reformasi sampai saat ini. Konsensus nasional yang selama ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, dan pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, ternyata saat ini, mengalami suatu kemunduran (degradasi). Degradasi rasa, jiwa dan semangat kebangsaan. Indikasi dari degradasi tersebut terlihat semakin menipisnya kesadaran dan kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan pada nilainilai ideologi Pancasila dan Konstitusi, pada hampir semua generasi bangsa. Khusus pemuda, menurut laporan dari Kemengpora RI saat ini, ada 10 (sepuluh) masalah karakter bangsa pada generasi muda/pemuda, antara lain: masih maraknya tingkat kekerasan dikalangan pemuda ,adanya kecendrungan sikap ketidak jujuran yg semakin membudaya, berkembangnya rasa tdk hormat, kpd org tua, guru dan pemimpin, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain, penggunaan bahasa Indonesia dg semakin memburuk, berkembangnya prilaku menyimpang dikalangan pemuda (narkoba, pornografi, pornoaksi,dll), kecendrungan mengadopsi nilai2 budaya asing, melemahnya idealisme, patriotisme,serta mengendapnya spirit of nation, meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme,serta semakin kabur pedoman yg berlaku , dan sikap acu tak acu terhadap pedoman ajaran agama.

Oleh karena itulah kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai kebangsaan khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, demi meneguhkan kembali jati diri bangsa dan membangun kesadaran tentang sistem kenegaraan yang menjadi konsensus nasional, sehingga diharapkan bangsa Indonesia dapat tetap menjaga keutuhan dan mampu menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah terpaan arus globalisasi yang bersifat multidimensial.[244]

[244] Toto Pandoyo UlasaN TERHADAP Beberapa Ketentuan Undsng-Undsng Dasar 1945 (Yogyakarta: Liberty, 1981)h. 11.

Nilai-nilai Kebangsaan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu: *pertama*, Nilai demokrasi, mengandung makna bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pemerintahan. *Kedua*, Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. *Ketiga*, Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang belaku.

Berdasarkan uraian nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan perumusan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengakomodasi segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disesuai-kan dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia saat itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut sampai dengan saat ini masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia walaupun adanya pengaruh globalisasi. Sehingga diharapkan nilai-nilai tersebut untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses reformasi yang bergulir pada penghujung tahun 1998, pada hakekatnya merupakan proses demokratisasi yang dilakukan bangsa Indonesia secara gradual, berkesinambungan dan sistematis serta menyeluruh. Proses ini akan merupakan "*on going process*" mengingat agendanya yang berlanjut di samping interaksi pelbagai fenomena sosial politik yang harus dihadapi karena lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional.

a. Model-model penanaman faham kebangsaan di Indonesia

Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1960-an, dalam kerangka *nation and character building*. Upaya ini dilakukan untuk meng-Indonesiakan orang Indonesia yang disesuaikan dengan visi dan misi politik penguasa pada masa itu. Oleh karena itu, bahan-bahan yang diberikan pun bukan hanya tentang Pancasila dan UUD 1945,

tetapi juga bahan-bahan yang berisi pandangan politik penguasa masa itu. Upaya menggelorakan semangat nasionalisme sangat tinggi, sehingga oleh Azyumardi Azra dipandang sebagai fase ke-2 tumbuhnya nasionalisme pada bangsa Indonesia. Pada masa ini, upaya *nation and character* building ini bukan hanya untuk masyarakat luas pada umumnya, namun juga dilakukan melalui jalur pendidikan formal, misalnya melalui mata pelajaran Civics. Sejarah mencatat, bahwa pada periode selanjutnya, yakni pada masa Orde Baru, apa yang dilakukan oleh rezim Orde Lama itu dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi.

Ketika awal Orde Baru berkuasa, yang pada saat itu bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, hal yang dibenahi pertama untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme adalah, melalui jalur pendidikan formal. Ketika Kurikulum persekolahan diubah pada tahun 1968, maka perubahan terhadap mata pelajaran yang mengembangkan misi pembinaan warga negara yang baik, yang Pancasilais, juga mengalami perubahan. Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) pun masuk dalam kurkulum persekolahan sebagai mata pelajaran, dan materinya berisi Pancasila dan UUD 1945 yang telah dibersihkan dari pengaruh pandangan Orde Lama.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme melalui jalur sekolah lebih diperjelas lagi dengan keluarnya Kurikulum 1975, di mana terdapat mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai pengganti nama PKN. Dari namanya saja sudah tersirat bahwa mata pelajaran ini dimaksudkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para pelajar. Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara meluas kepada semua lapisan masyarakat, birokrasi, dan persekolahan dilakukan oleh penguasa Orde Baru dengan ditetapkannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 pada awalnya dilandasi oleh upaya dari pemerintah yang menginginkan agar nilai-nilai Pancasila dapat dengan mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh warga negara. P4 juga berpengaruh pada kurikulum persekolahan dan perguruan tinggi. Kurikulum PMP tahun 1984 dan terutama kurikulum PPKn (Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan) 1994 secara jelas menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme yang telah diuraikan di dalam P4. Kurikulum Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, juga tidak lepas dari pengaruh P4. Diseminasi P4 melalui jalur pendidikan formal bukan hanya melalui kurikulum melainkan juga melalui penataran P4 untuk siswa dan mahasiswa baru.

Para pengembang Penataran P4 pada masa itu, sudah mencoba mengembangkan berbagai cara atau metode yang lebih baik dari sekedar indoktrinasi. Namun karena penataran P4 yang bersifat massal dan penafsiran Pancasila yang dianggap tunggal oleh penguasa, maka penataran P4 ini pun oleh kaum pendukung reformasi dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi ala Orde Baru.

Ketika memasuki masa reformasi, terjadi pula perubahan pada upaya internalisasi nilainilai Pancasila dan nasionalisme. Kurikulum PPkn di sekolah pun mengalami perubahan baik dari nama maupun substansi materinya. Begitu juga kurikulum pada mata kuliah umum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan/Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, mengalami perubahan. Materi yang berbau Orde Baru dihapuskan dari kurikulum dan diganti dengan materi-materi yang lebih sesuai dengan visi dan misi politik Orde Reformasi. Kurikulum PPKn dalam kurikulum persekolahan 1994 yang dulu sangat berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, diganti dengan Kurikulum PKn 2004 dan 2006 yang lebih bersifat konseptual teoritis. Mata kuliah yang mengemban pembinaan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik dan Pancasilais, juga mengalami pengecilan peran. Secara formal, mata kuliah Pendidikan Pancasila pada sebagian besar perguruan tinggi, dihilangkan dan disatukan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan demikian, sebenarnya pada masa ini dalam kurikulum formal baik di jenjang persekolahan maupun perguruan tinggi, upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme, mengalami penurunan intensitas. Di luar lembaga pendidikan formal, seperti di lingkungan birokrasi dan masyarakat pada umumnya, upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme pada masa reformasi, bahkan lebih tidak jelas lagi.

b. Masalah Kebangsaan di Indonesia

Pertama, nilai-nilai Pancasila sepertinya masih belum membumi, masih belum diamalkan secara baik oleh bangsa Indonesia. Pancasila seakan hanya menjadi simbol saja, tanpa terimplementasi secara nyata baik pada tataran kehidupan kenegaraan maupun pada tataran kehidupan masyarakat. *Kedua*, kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda pada era globalisasi ini mendapat pengaruh yang sangat kuat dari nilainilai budaya luar, sehingga mulai banyak sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.[245]

Ketiga, nilai-nilai nasionalisme pun oleh sebagian pihak dipandang mengalami erosi pada saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Keempat, berkembangnya paham keagamaan yang tidak memandang penting nasionalisme dan negara kebangsaan Indonesia, dan lebih memandang penting universalisme. Pendukung paham ini juga menolak demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dipandang baik dan pada ujungnya tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi yang penting dan tepat bagi bangsa kita. Paham ini bukan hanya berkembang di masyarakat, tetapi juga berkembang di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi; dan yang *Kelima*, masih perlu dipertanyakan peran pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada generasi muda.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang absolut. Penduduknya tak satu jenis warna kulit, tak satu macam agama, suku, dan adat istiadat, etnis, bahasa daerah, jenis kelamin dan orientasi seksual, status dan kelas sosial, serta warna politik dan ideologi.[246] Jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari 276 juta. Dari 17.508 pulau, penduduk tersebar secara tak merata di ribuan pulau, terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Keanekaan itu diikat dalam nasionalisme Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan

[245] M. Harmaily Ibrahim Kusandi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. (Jakarta: CV Sinar Baakti, 1995). Hal 89

[246] Hendardi, "Pluralisme dan Negara", Mengadvokasi Hak Sipil dan Politik. Kompas, Jakarta, h. 295

dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Secara simbolik fakta fluralitas tersebut diteguhkan dalam Pasal 86A UUD 1945 dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika.* Setiap kelompok identitas yang beragam diidealkan untuk menerima golongan lain sebagai sesama bangsa Indonesia, tanpa intensi untuk menonjolkan eksklusivitas partikular masing-masing. [247]

Nasionalisme Indonesia dibangun di atas dasar kenyataan bahwa penduduk Indonesia bersifat majemuk, tak hanya beraneka suku, tetapi juga asal etnis;seperti India, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Selain itu, ada banyak kepercayaan dan keyakinan lokal yang telah berperan sebelum agama-agama besar tersebar. Bahkan lebih dari itu, pikiran dan aspirasi pun bisa berbeda-beda dari berbagai kelompok, seperti pikiran dan aspirasi untuk mengembalikan kejayaan rezim otoriter, memperjuangkan demokrasi, memurnikan ajaran agama secara eksklusif, pikiran mengubah struktur sosial guna menghapus eksploitasi atas mereka yang bekerja, memanfaatkan krisis ekonomi dan politik guna menimbulkan kekacauan dan konflik horizontal, atau pikiran untuk berpisah (disintegrasi) dari negara RI.

Ahmad Syafi'i Ma'arif pernah menjadi Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berusaha menyesuaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan keadaan dan tantangan zaman yang semakin berubah tanpa mengubah nilainilai dasar yang terkandung didalamnya. Hal tersebut Ahmad Syafi'I Ma'arif jelaskan dengan mengatakan Indonesia sebagai bangsa itu belum menjadi, masih dalam proses menjadi. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sejatinya sudah dalam posisi yang kokoh. Walaupun masih terdapat kelompok-kelompok kecil yang menolak Pancasila, namun tidak memberikan dampak yang cukup signifikan. Hanya berupa riak-riak kecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Walaupun hanya berupa riak-riak kecil, namun harus tetap menjadi fokus perhatian seluruh elemen bangsa baik pemerintah maupun *civil society* yang konsisten terhadap ideologi Pancasila. Hal ini demi mempertahankan dan melihat Indonesia sampai masa yang akan datang nanti.

[247]https://datacommons.org/place/country/IDN?utm_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=en, diakses pada 31 Januari 2024

Ahmad Syafi'I Ma'arif lebih lanjut menjelaskan bagaimana sejatinya suasana kebatinan yang terjadi di dalam Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dimana pada saat itu Bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga pilihan, yakni Islam, Pancasila, dan SosialEkonomi. Yang kemudian Sosial-Ekonomi itu pendukungnya tidak banyak, lalu bergabung ke Pancasila. Kita seharusnya merasa beruntung punya filsafat Pancasila yang hebat, digali oleh Bung Karno tanpa teks pada 1 Juni 1945. Yang menjadi persoalan Pancasila dewasa ini adalah Sila ke Lima yakni "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang belum menjadi pedoman dalam membangun bangsa sejak kita merdeka.

Menurut Ahmad Syafii Maarif, setelah dikaji dalam konteks kultur Indonesia, sampai sekarang tidak ada konsep lain yang tepat yang secara rasional dapat mengukuhkan persatuan dan keutuhan bangsa, kecuali lima dasar Pancasila.[248] Kelima sila Pancasila itu jika dipahami secara benar dalam satu kesatuan tidak ada yang perlu dipersoalkan dari pandangan sudut pandangan teologi Islam. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa akan menjadi sila kosong bilamana keadilan dan kemakmuran untuk semua tidak menjadi realitas di tanah air kita.

Pengalaman traumatik masa lampau jangan diulang lagi, sebab hanya akan berujung dengan kesia-siaan. Dengan ungkapan lain, Islam yang harus ditawarkan adalah sebuah Islam yang bersedia bergandengan tangan dengan nilai-nilai keindonesiaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.116 Maka demi upaya mengukuhkan keindonesiaan dan kemanusiaan, bagi Maarif Piagam Jakarta tidak perlu lagi dilihat dari perspektif legal formal, tetapi diambil ruhnya berupa tegaknya keadilan yang merata bagi seluruh penghuni Nusantara, tanpa diskriminasi. selanjutnya Pancasila yang sudah disepakati sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, harus membukakan pintu seluas-luasnya bagi masuknya sinar wahyu. Bagi Ahmad Syafii Maarif, langkah ini perlu dilakukan agar Pancasila ini bebas dari tuduhan dari sebutan negara sekuler. Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya harus berhenti untuk hanya dijadikan retorika politik. Semua nilai yang terkandung dalam

[248] Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, h. 23

Pancasila harus diterjemahkan ke dalam format yang konkrit sehingga prinsip "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" benar-benar menjadi kenyataan.

Ahmad Syafii Maarif berpendapat bahwa Pancasila dapat disebandingkan - meski tidak persis sama- dengan Piagam Madinah. Alasannya berdasarkan dua hal; pertama, secara substantif, baik Piagam Madinah maupun Pancasila mengakui kaitan antara nilai-nilai agama dan masalah-masalah kenegaraan. Kedua, secara fungsional, kedua rumusan politik tersebut mencerminkan titik temu (*common platform*), yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip yang mengatur sebuah masyarakat politik dengan latar belakang sosial keagamaan yang beragam.[249]

Menurut Syafii Maarif, penerimaan Pancasila sebagai dasar falsafah negara oleh para pemikir Muslim Indonesia yang lebih mudah ialah penerimaan secara sadar, bukan karena kalkulasi politik kekuasaan, bukan pula untuk mengganti Islam dengan Pancasila, sesuatu yang tidak mungkin. Para pemikir ini menurut Syafii Maarif adalah generasi-generasi terdidik yang lahir di era lain dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang sibuk dengan pertarungan tentang masalah dasar negara yang sangat melelahkan itu. Bagi pemikir yang datang kemudian, alur pemikiran dan strategi intelektualnya sudah berbeda, "ilmu garam jauh lebih penting dari pada ilmu gincu".[250]

Maka tugas selanjutnya menurut Syafii Maarif, adalah mengisi Pancasila dengan nilai-nilai kenabian yang sangat kaya dalam masalah moral, etika, sumber hukum, dan doktrin eskatologis yang tidak mungkin diberikan filsafat ciptaan manusia. Untuk keperluan masalah-masalah besar ini, Pancasila harus bersikap jujur dalam mengukur dirinya yang serba terbatas dalam dinding keindonesiaan, sekalipun aspek universal dari empat sila yang lain dapat dikembangkan lebih jauh.

Jika Pancasila tetap saja menjadi permainan bibir, sementara prinsipprinsipnya diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka menurut Syafii Maarif masa depan Indonesia sulit sekali dibayangkan akan menjadi lebih baik. Ia mengatakan bahwa sudah lebih 60 tahun

[249] Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, h. 243

[250] Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, h. 284

Indonesia merdeka tapi hampir tidak ada pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat banyak yang miskin. Memang di era demokrasi liberal tahun 1950-an, ada dua atau tiga kabinet yang mempunyai program bagus untuk kesejahteraan rakyat, tetapi tidak punya waktu untuk melaksanakannya karena umurnya relatif singkat. Pertentangan partai-partai menjadi sebab utama mengapa umur kabinet di era itu tidak bisa panjang.[251]

Pengejawantahan yang di lakukan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif tersebut merupakan suatu bentuk dukungan yang dilakukannya dalam mengembangkan ideologi Pancasila agar dapat tetap relevan dengan kondisi dan tantangan zaman. Dengan tujuan agar ideologi Pancasila dapat terus membumi atau dapat di tarik kebumi sehingga Pancasila sebagai ideologi negara dapat benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga tujuan akhir yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera atau mengalami percepatan dalam laju gerak langkah negara ini.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, syiar-syiar kebangsaan atau sosialisasi mengenai ideologi Pancasila yang Ahmad Syafi'I Ma'arif lakukan menggunakan berbagai macam forum yang dalam setiap acaranya selalu memaparkan mengenai historycal asal muasal ideologi Pancasila menjadi suatu kesepakatan bersama. Dalam setiap isi pemaparan mengenai ideologi Pancasila, keduanya selalu menjadikan Bung Karno dengan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai tokoh utama dalam menggani ideologi Pancasila.

Ahmad Syafi'I Ma'arif dalam praktik kesehariannya yang peneliti amati masuk dalam kategori ini, kedua tokoh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini merupakan tokoh yang benar-benar konsisten dan loyal dalam memberikan kontribusi pemikirannya terhadap pengembangan ideologi bangsa.

Dalam hasil observasi dan studi dokumentasi menunjukan usaha-usaha konkret yang di lakukan oleh Ahmad Syafii Maarif dalam mengembangkan ideologi Pancasila. Dalam berbagai kesempatan di mimbar akademik, karya ilmiah, dan media baik cetak maupun elektronik, Ahmad Syafi'i Ma'arif berupaya secara nyata

[251] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, h. 315

mensosialisasikan rasionalitas ideologi Pancasila agar mendapatkan penerimaan sosial yang baik di masyarakat. Sehingga penghayatan atas sosialisasi yang dilakukan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif dapat dilaksanakan sebagai pedoman kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keberagaman dalam suatu ruang bersama ke-Indonesia-an akan tampak indah bukan bukan saja bila terjadi harmoni, terbangun kehidupan yang rukun, dan kehidupan berdampingan secara damai di tengah perbedaan (*peaceful coexistence*), namun juga menampakkan solidaritas antar sesama yang tergambar dari keadaan saling membutuhkan, sehingga tak ada yang merasa ditinggalkan (*no one left behind*). Pluralitas hanya dapat menjadi fondasi bangunan ke-Indonesia-an yang kokoh bila etos sosial dan etika politik kuat dengan penerimaan penuh pada keberagaman sebagai ruang bersama, yang mana satu sama lain saling membutuhkan dan bekerja sama. Di sisi lain, perbedaan dan ketidaksetujuan atas perbedaan yang melekat pada masing-masing identitas tak diekspresikan dengan kekerasan. Sebaliknya, perbedaan justru diterima dengan lapang dada, sikap terbuka, dan saling menguatkan.

Etos sosial dan etika politik, yang dibutuhkan dalam memajukan dan memperkokoh tata kebinekaan, berdasar prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum (*equality before the law*), perlakuan nondiskriminasi, serta nonkekerasan. Etos dan etika ini akan menghidupi ruang bersama yang terbuka dan bersifat saling pengertian tanpa peduli asal dan warna, hormat pada persamaan di muka hukum, serta menjadi ruang memupuk solidaritas, terutama bagi mereka yang lemah.

Dalam konteks itu, Pancasila merupakan jawaban atas persoalan-persoalan yang mungkin hadir dalam tata keberagaman tersebut. Pancasila juga merupakan jalan ideologis untuk merespons tantangan yang mengemuka di tengah perbedaan yang ada di antara berbagai elemen pembentuk kebangsaan Indonesia. Betul bahwa keberagaman merupakan kenyataan sosiologis bagi masyarakat pluralis seperti Indonesia. Benar bahwa ikatan ke-Indonesia-an bagi keanekaragamann identitas merupakan pilihan politik yang sudah diambil dan diwariskan oleh para pendiri negara-bangsa sebagai ikhtiar politik untuk menghimpun keanekaragaman Indonesia. Namun secara faktual, fakta kekinian Indonesia ditandai dengan meningkatnya

ancaman atas kebinekaan sebagai ruang bersama. Belakangan mengemuka sentimen golongan, ketegangan antar kelompok, bahkan konflik komunal.

Pancasila diharapkan menjadi solusi ideologis bagi keluhan-keluhan kelompok (*group grievance*) yang muncul dalam tata kebinekaan. Itulah mengapa sebagian pengkaji prominen Pancasila menyebut Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju.[252] Pancasila merupakan titik bertemunya seluruh identitas yang beragam dalam identitas baru ke-Indonesiaan. Namun, Pancasila merupakan titik pijak bagi seluruh upaya operasionalisasi pemerintahan negara dan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Selain itu, Pancasila juga merupakan orientasi bagi pencapaian tujuan-tujuan luhur pemerintahan negara.

Pada tatanan kokoh pluralisme juga memprasyaratkan perlindungan negara. Negara harus mempertegas perannya dalam masyarakat bahwa keberagamaan adalah fakta objektif dan ruang bersama yang sehat. Negara dan pemerintah dibentuk untuk mengakomodasi dan tidak untuk mengingkari pluralitas identitas. Berkenaan dengan itu, menjadi tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di tingkat masyarakat dan warga semua entitas dan identitas partikular di dalamnya untuk menghormati pluralitas sebagai ruang bersama publik. Sebab, hanya negaralah yang bisa melampaui entitas sosial di dalamnya. Nagara bukanlah masyarakat itu sendiri. Negara merangkul dan melampaui seluruh institusi privat dan publik serta jejaring interrelasi di antara mereka, yang dibentuk oleh gagasan, tradisi, dan berbagai aspek yang melekat dalam kebudayaan.[253]

Dalam konteks itu, penguatan prosedur, kelembagaan, dan mekanisme dalam penyelenggaraan mesti turut berkontribusi bagi penguatan kebinekaan serta mendegradasi ruang sesempit mungkin bagi kerentanan kelompok-kelompok yang kecil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dalam tata kebinekaan tersebut. Dan bukan sebaliknya, dimana bekerjanya prosedur, kelembagaan, dan mekanisme demokrasi justru meningkatkan tensi, menciptakan polarisasi dan menebalkan

[252] Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: *Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, h. 40

[253] Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945

segregasi, yang pada ujungnya memperapuh bahkan dapat menghancurkan kebinekaan sebagai ruang bersama seluruh elemen pembentuk kebangsaan Indonesia.

Pancasila memberikan jaminan filosofis dan moral atas kebebasan untuk beragama/berkeyakinan. Sila pertama Pancasila menegaskan hal itu. Meskipun pada kenyataannya "sila segala sila" Pancasila tersebut seringkali diinterpretasi dalam debat yang bersifat kontroversial, terutama pada dua aspek. Pertama, sila pertama dimaknai sebagai prinsip yang mengakomodasi spiritualitas metaagama, namun di sisi lain kerap diinterpretasi sebagai rumusan yang merujuk pada keberagamaan yang bersifat formalistik, bahkan, untuk kepentingan legalisasi dominasi masyarakat agama yang dominan. Kedua, sila pertama ditafsir sebagai sandaran filosofis keberagamaan yang mengacu pada ekstraksi konsep tauhid, artinya direduksi sekadar untuk memayungi kemayoran kuantitatif satu agama tertentu di Indonesia, dalam hal ini Islam.[254]

Melampaui hal itu, rujukan utama dalam membaca dan menafsirkan sila pertama Pancasila adalah pernyataan langsung yang disampaikan oleh para pendiri bangsa dan negara (*the founding fathers and mothers*) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Salah satunya dan yang paling pokok adalah Sukarno. Saat mengulas sila-sila Pancasila pada 1 Juni 19457 melalui pidato agitatifnya, Sukarno menyatakan bahwa:[255]

> *Bukan saja bangsa Indonesia harus ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. ..... Marilah semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme agama". Dan hendaknya negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!*

Berkenaan dengan penjabaran "Sila Ketuhanan" dalam Pancasila, UUD 1945 memuat beberapa ketentuan yang memberikan jaminan atas hak warga negara untuk beragama/berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD 1945 yang dapat

---

[254]Hafiz, Muhammad dan Hasani, Ismail, 2020, Kebebasan Beragama dan Pengutamaan Stabilitas Politik Keamanan di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2019, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, hlm. 3-8.

[255]Pidato Sukarno di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Lihat Bahar, et.al [eds.], 1995, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, (Jakarta: Sekretariat Negara), halaman 80-81, atau Alam [ed), Bung Karno Menggali Pancasila, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 28.

diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap orang, baik warga negara maupun bukan, yaitu Pasal 28E dan Pasal 28I.

Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan bagi siapapun untuk memeluk agama/keyakinan dan/atau kepercayaannya secara bebas. Ketentuan tersebut secara implisit mendeklarasikan jaminan konstitusional kebebasan bagi siapapun untuk beragama/berkeyakinan. Pada saat yang sama, setiap orang juga dijamin untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Adanya jaminan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemelukan suatu agama oleh seseorang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat esensial.9 Dalam bahasa yang lebih tegas dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi manusia. Di samping itu, hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga negaranya masingmasing.[256]

Hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan yang dijamin oleh Konstitusi Negara sejalan dengan norma universal Hak Asasi Manusia yang menempatkan hak tersebut sebagai non derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sebagai hak yang terkategori *non derogable rights*, maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Mandat konstitusional yang diturunkan dari filosofi dasar negara (*philosophische gronslag*) diperkuat dengan berbagai instrumen derivatnya dalam bentuk undang-undang. Disinilah titik problematiknya yang mana terdapat beberapa ketegangan dalam implementasi jaminan konstitusional tersebut. Sangat terlihat

[256]Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, h. 320.

disparitas antara *das sollen* konstitusional dengan *das sein* kebijakan pemerintahan yang lebih spesifik, detil, dan konkrit.

Tepatlah jika dalam filsafat Pancasila bahwa hakekat dasar antropologis sila Pancasila adalah manusia. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara antologis memiliki hal-hal mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia adalah sebagai mahluk individu dan mahluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahluk tuhan yang maha esa. Oleh karena itu, kedudukan kodrat manusia sebagai pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahluk tuhan inilah maka secara hirarkis sila pertama Ketuhanan yang maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila pancasila lainya.

Tantangan–tantangan besar ada di sekeliling kita hari ini. Kita tinjau beberapa yang strategis dan memiliki dampak yang luas bagi perikehidupan berbangsa dan bernegara. *Pertama*, Tantangan Diri Sendiri. Gunnar Myrdal menyebut kita sebagai negara yang lembek (*soft state*) dalam pengertian pemimpin–pemimpin dan masyarakatnya tidak mampu mengambil sikap yang tegas dan jelas terhadap suatu persoalan. Mochtar Lubis (1977) dalam buku *Manusia Indonesia* merangkum sifat–sifat jelek orang Indonesia seperti suka jalan pintas, pemalas, dan hipokrit. Membaca buku Lubis yang sangat keras ini seakan menemukan kebenaran dalam realitas sehari–hari.[257] Adam Schwatz menyebut kita sebagai *Nation in Waiting.* Max Line menambahkan dalam bukunya *Bangsa Yang Belum Selesai*. Negeri jiran Malaysia menyebut tenaga kerja Indonesia disana sebagai *Indon* dalam makna yang merendahkan. Yang paling berat diantara semuanya adalah kecilnya rasa percaya diri dan mulai hilangnya harapan dari dada rakyat Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan bangsa–bangsa asing. Kita mulai merasa bahwa Indonesia tidak akan bisa menjadi negara besar yang setara dengan Amerika Serikat, Cina, Jepang, maupun India. Kita masih berkutat pada persoalan remeh-temeh yang menguras tenaga, biaya, dan pikiran anak-anak bangsa.

[257] Myrdal, Gunnar, *The "Soft State" in Underdeveloped Countries"*, LA: UCLA Press, h. 220.

Kita belum punya agenda kolektif bangsa yang menjadi konsensus nasional. Pemerintah memiliki Rencana Program Jangka Panjang (RPJM) tahun 2025 tanpa banyak melibatkan partisipasi masyarakat luas untuk memberikan kritikan, saran, dan masukan. Beberapa elemen masyarakat merumuskan sendiri visinya, misal Visi 2020, Visi 2030, dan seterusnya. Kita tidak punya diskursus yang kuat dan menggugah untuk masa depan seperti Revolusi Indonesia, Modernisasi Indonesia, atau, Reformasi Indonesia.[258]

Kedua, Tantangan Dalam Negeri. Berbeda dengan tantangan pertama yang bersifat kultural, tantangan kedua ini lebih merupakan persoalan struktural, kebijakan–kebijakan yang diambil oleh negara/pemerintah. Korupsi adalah tantangan terberat. Praktik korupsi terjadi di semua level dan sektor. Dari level pusat hingga ke desa–desa. Dari sektor formal hingga non formal, ekonomi hingga non ekonomi, dan sektor–sektor yang kita pandang selama ini misalnya jauh dari korupsi seperti lembaga–lembaga keagamaan. Kita sudah memiliki aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman untuk memberantasnya. Itu tidak cukup. Kita bangun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk itu. Kemiskinan masih tinggi. Angka pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan dengan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti kue pertumbuhan ekonomi hanya tersirkulasi di kalangan elit ekonomi saja. Rasio Gini terus meningkat yang mengindikasikan semakin lebarnya jurang ketimpangan sosial. Pendidikan nasional yang belum diarahkan untuk menjadi instrumen kesejahteraan. Dengan alokasi 20% APBN, seharusnya pendidikan kita tidak mengalami hambatan yang berarti untuk mendidik rakyat Indonesia dengan tepat sehingga mereka dapat menjadi individu produktif yang menciptakan kesejahteraan. Birokrasi yang hingga kini belum direformasi secara sungguh–sungguh. Inefisiensi dan inefektivitas adalah gejala pokok birokrasi kita. Kewirausahaan yang kurang didukung oleh policy negara/pemerintah. Kecilnya jumlah pengusaha di Indonesia berbanding lurus dengan output ekonomi yang dihasilkan dan lapangan pekerjaan baru yang diciptakan. Konglomerasi menghalangi

[258] Kajian yang cukup bagus tentang "Reformasi" ditulis oleh Kevin O'Rourke dalam Reformasi: *The Struggle of Power in Post- Soeharto Indonesia*, h. 48.

potensi–potensi muda untuk menjadi pengusaha yang mandiri dan sejati. Konflik sosial yang semakin menggejala di tengah masyarakat karena abainya negara. Pertikaian kelompok sosial keagamaan semakin menggerogoti wibawa Pancasila sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, Tantangan Global. Dunia berkembang semakin kencang dan berlari. Giddens punya ilustrasi menarik dengan menyebutnya seperti berlarinya Jaggernaut. Kemana kita berkaca? Hegemoni Amerika Serikat yang sangat kuat pada abad XX dan awal abad XXI terlihat semakin pudar dengan naiknya Cina sebagai superpower baru. Tak butuh waktu lama bagi Cina. Sejak dipimpin oleh Deng Xio-ping tahun 1978, Cina mengambil langkah radikal dengan berpihak pada kapitalisme (tanpa demokrasi). Dalam waktu kurang dari tiga dekade, Cina berhasil menggeser Jepang sebagai ekonomi terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat. Cina menyebutnya sebagai Sosialisme ala Cina, dimana kapitalisme diberi tempat tapi politik dikontrol sepenuhnya oleh Partai Komunis Cina. Diprediksi oleh banyak ahli, Cina akan mampu menggeser posisi ekonomi Amerika Serikat sebelum tahun 2050. Dengan berfokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi, India berhasil menyejajarkan dirinya dengan negara – negara utama teknologi. Sebagai negara terbesar di Asia Selatan, kedudukan India sangatlah penting karena berada di tengah–tengah antara Timur dan Barat benua Asia. Kemajuan Cina dan India umum disebut oleh para ahli sebagai ‚Chindia' yang mengindikan keduanya akan menjadi superpower Asia di masa depan.[259]

Tantangan terberat dari Generasi V dalam memimpin dan mengelola Bangsa Indonesia adalah bagaimana mengurus Generasi VI (kelahiran 1980– 2000) dan Generasi VII (kelahiran 2000–2020), yang paling tua diantara mereka adalah berumur 35 tahun. Usia 35 tahun kebawah inilah disebut sebagai *Generation-Connected* (Gen-C), yang di tangannya selalu ada *gadget* tak putus-putusnya, selalu terkoneksi dengan internet, *real time*, dan setiap saat *update.* Mereka lah sebenarnya yang menjadi pusat perhatian sekaligus kekhawatiran dari tema seminar yang diangkat dalam kesempatan

[259] Engardio, Peter, Chindia: *How China and India Are Revoluzioning the Global Business,* h. 40.

kali ini. Oleh karena itu, pendekatan kependudukan (demografi) sangat diperlukan untuk mengelola anak-anak muda yang tak lama lagi akan menjadi bonus demografi Indonesia. Daya tahan kultural generasi-generasi sebelumnya cukup kuat karena pendidikan keluarga dan masih belum derasnya arus informasi masuk ke ruang-ruang privat. Kini, dari kamar tidurnya, sang anak usia SD sudah mampu mengakses segala bentuk informasi melalui gadgetnya jika tidak dilarang oleh orang tua mereka.

Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Menjadikan generasi sebagai rumusan paradigmatik tentu akan banyak menolong dalam merumuskan strategi aksinya. Yang pasti, mesin globalisasi akan terus bekerja. Semua generasi Indonesia modern sejak generasi I sampai VII menghadapinya. Misal, mesin kapital telah melahirkan kapitalisme. Mesin teknologi telah melahirkan industrialisme. Mesin manajemen telah melahirkan korporatisme global yang cenderung anti-nasionalisme. Jadi, tiga mesin ini menjadi titik sentral dalam memahami dinamika yang bergerak pada setiap generasi. Misal generasi VI dan VII yang lahir dan besar dengan mesin tekonologi informasi dan komunikasi telah memaksa mereka terbentuk dengan gaya kerja yang cepat, egaliter, dan individualis. Mesin manajemen telah menciptakan sistem organisasi yang tidak hierarkis-feodal. Mesin kapital telah menjadikan generasi terkini sebagai manusia-manusia yang cenderung mengejar keuntungan material sebanyak-banyaknya. Disinilah diperlukan konsepsi strategi pembangunan generasi muda yang akan datang, yaitu Generasi VI dan VII dengan menggabungkan paradigma generasi dengan mesin globalisasi. Kita menemukan minimal enam strategi yang dapat diterapkan segera dengan sinergi berbagai kekuatan dan elemen bangsa kita.

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dipengaruhi oleh pendekatan Neo-Modernisme Islamnya Fazlur Rahman.[260] Dan seperti yang dijelaskan oleh Rahman sendiri bahwa gerakan pembaharuannya bertumpu pada pada *pertama*, perumusan pandangan al-

[260] Menurut Fazlur Rahman, Neo-Modernisne tidak lain merupakan modernisme Islam plus metodologi yang mantap untuk memahami al-Quran dan Sunnah Nabi dalam perpektif sosio-historis. Lihat, Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995), h. 138. Atau lebih detailnya baca, Fazlur Rahman, "Islam: Challenges and Opportunities" dalam Alford T. Welch & Pierre Cachia (eds), *Islam: Past Influence and Present Challenge* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979), h. 323-327

Quran. *Kedua*, menciptakan suatu analisis yang sistematis terhadap ajaran-ajaran moral al-Quran dan pada gilirannya akan tercipta etika al-Quran. *Ketiga*, merumuskan sistem dan formula hukum yang selaras dengan kebutuhan kontemporer berdasarkan etika. Arah gerakan Rahman ini mengambil bentuknya pada hipotesanya tentang arus kebangkitan Islam yang menyebar di dunia yang muncul sebagai reaksi yang kuat terhadap kelemahan ulama tradisional dan kegagalan negara Islam dalam menanggulangi pengaruh Barat.[261] Singkatnya, model berpikir neo-modernisme Islam ala Rahman, seperti yang secara kritis diungkapkan juga oleh Farid Essack dalam bukunya *Qur'an, Liberation & Pluralism.*

Dalam rumusan model di atas, pemikiran Islam Ahmad Syafii Maarif mengenai dasar-dasar Islam apakah itu konsepsinya tentang al-Quran dan Sunnah Nabi lahir dari bentuk pemahaman yang diperolehnya dari sang guru neomodernisme Islam Fazlur Rahman.

Sementara pada sisi yang lain, selain pengaruh Rahman, Syafii juga terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti Toynbee, Iqbal dan Hatta yang menurut hemat saya memberikan fondasi bagi lahirnya pemikiran kritisnya. Pendekatan kritis yang dimaksud, seperti yang diulas juga oleh Haryatmoko,[262] nampak pada empat pernyataannya, yaitu pertama, agama tidak selalu berdaya mengawal perilaku penyimpangan kekuasaan yang dilakukan penguasa Muslim. Maka perlu sikap kritis untuk jujur terhadap masa lampau.[263] Kedua, sejarah kepahitan harus dikatakan dan dibongkar meski harus menelanjangi diri karena sejarah merupakan pedoman bertindak dalam batas ruang dan waktu. Ketiga, ada kecenderungan manusia untuk menyembunyikan kepentingan-kepentingan di balik ayat-ayat suci.[264] Dan keempat, tinggalkan sikap bangga dalam kesemuan, pakai

[261] Ihsan Ali Fauzi, "Menuju Sistematisasi Etika Al-Qur'an", *Al-Hikmah*, No. 9, April-Juni, 1993, h. 41-42.

[262] Haryatmoko, "Islam Terbuka, Bersahabat, dan Dinamis", Jurnal MAARIF vol. 4, No. 1-Juli 2009. h. 34-35

[263] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan,* (Bandung: Mizan, 2009), h. 47

[264]

ukuran akurat untuk berkaca diri secara kritis, jangan menyembunyikan kelemahan diri dan bersiaplah menertawakan diri sendiri.

Menurut Haryatmoko, pendekatan kritis ini, selain mampu membongkar mitos- mitos masa lampau dan legitimasi kekuasaan, juga merupakan kritik ideologi atau kritik terhadap keyakinan-keyakinan yang bisa berubah menjadi ilusi. Pengambilan jarak kritis ini memungkinkan membuka cakrawala baru sejarah dan terobosan di dalam melihat masa depan karena tidak terpasung oleh penafsiran yang mandek dan apologetis. Kemampuan diri sendiri adalah bentuk kebebasan dan keterbukaan untuk berubah.

Cara berpikir Ahmad Syafii dengan mengelaborasi model neo-modernis Islam dan pendekatan kritis menjadikannya sebagai seorang yang memiliki integritas keislaman yang unik dan independen. Pemahaman Islam yang kontekstual dan substantif tapi tetap kritis pada alur perubahan yang bergerak.

Mengupas soal term Islam dalam pemahaman Ahmad Syafii. Dengan mengetahui pandangan beliau mengenai agama ini, maka setidaknya kita bisa mengetahui *grand naratif* yang hendak dicitrakannya kepada publik. Dan inilah yang menjadi dasar spektrumnya terhadap semua persoalan yang dipotretnya, pemahamannya tentang Islam mewarnai pemikirannya tentang tema lainnya.

Dengan mengutip apa yang dikemukakan oleh Frithjof Schoun, bagi Buya Ahmad Syafii, Islam dipahami sebagai agama yang secara tegas menawarkan prinsip keseimbangan kepada manusia,[265] karena tujuan yang hendak dicapai oleh Islam adalah tegaknya prinsip-prinsip *persamaan, keadilan, persaudaraan dan toleransi*. Pandangan ini didasarkan pada beberapa ayat dalam al-Quran; *al-Hujurât,* 49:10, 13 dan 15; an-Nisâ', 4:58; an-Nahl, 16:90; al-Zumar, 39:18; al-Baqarah, 2:256.

Nilai-nilai di atas, menurut Ahmad Syafii, telah menghilang dari kehidupan umat, hingga Islam dilihat orang tampil dalam periode-periode tertentu dalam sejarah dengan wajah bopeng, jauh dari anggun. Di antara sebab utama mengapa situasi ini memudar adalah karena dasar etik yang dipedomani dalam kehidupan bukanlah

[265] Menurut Frithjof Schoun, Islam adalah jalan keseimbangan dan jalan cahaya yang ditegakkan di atas landasan ikuibilirium yang kokoh. Kutipan ini disebut dalam, Ahmad Syafii Maarif, *Al- Qur'an, Realitas Sosial Dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi)* (Bandung: Pustaka, 1985), h. 10

sepenuhnya etik al-Quran, tapi lebih banyak etik golongan, suku, bangsa dan kelompok kepentingan.[266] Dan bila hal ini yang terjadi, maka peradaban sebuah masyarakat akan mengalami kemunduran bahkan akhirnya digulung waktu ketika para pemimpinnya secara sadar membunuh nalar kreativitasnya dalam menanggapi pelbagai tantangan yang menghadangnya.[267]

Prinsip-prinsip Islam yang terbuka dan dinamis yang didasarkan pada etik alQuran nampak sekali pada perjalanan sejarah Islam di Indonesia. Seperti yang dicatat oleh C. Snouck Hurgronje bahwa proses penyebaran Islam ke Nusantara berjalan secara damai.[268]

Islam sebagai pendatang baru telah menggeser peran dua agama besar sebelumnya (Budha dan Hindu). Gelombang besar Islamisasi terjadi pada masa Portugis, sebagian besar bangsawan masuk Islam sebagai upaya mereka melawan Kristenisasi jaman Portugis. Sedangkan Kristenisasi yang didukung oleh pemerintah kolonial, misalnya Gubernur Jendral Jan Pieter Zoon Koen (1587-1629) tidak berpengaruh besar terhadap perpindahan agama, meski menggunakan politik beras. Terhadap cara Koen ini, Buya Ahmad Syafii menyatakan, "*Dalam perkembangan sejarah kemudian, cara-cara Koen ini tidak pernah efektif, karena pada umumnya iman yang dibeli dengan benda adalah sebuah iman yang berkualitas rendah.*"[269] Singkatnya adalah ketidaktepatan membaca sejarah dan nilai etika al-Quran itulah yang menjadikan wajah Islam menjadi brutal, anarkis dan beku.

Dalam bukunya *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (2009), Ahmad Syafii mengemukakan empat hal yang menjadi kegalauannya dalam dunia Islam khususnya di Indonesia, *pertama*, ia tidak rela bila bangsa ini tercabik-cabik oleh politik agama, kepentingan picik, lokal, dan primordialisme. *Kedua*, adanya kesenjangan antara ajaran dan praktek kehidupan, yaitu tiadanya korelasi antara praktek agama dan perbaikan moral. Di satu sisi, orang rajin beribadah, di sisi

---

[266] Maarif, *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 34

[267] Lihat pengantar Fajar Riza Ul Haq, "Sang Anak Panah: Sebuah Pengantar, Jurnal MAARIF vol. 4, No. 1-Juli 2009. h. 6

[268] Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda,* terj. S. Gunawan, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983), h. 9

[269] Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, h. 116

yang lain, korupsi semakin menggurita dan kekerasan menghancurkan bangsa ini. *Ketiga*, munculnya penyakit yang sifatnya kultural dan mental. Dan keempat, fenomena kemiskinan, dan kebodohan menimpa sebagian besar umat Muslim Indonesia.[270]

Terhadap empat hal yang menjadi keresahan tersebut, maka kata kunci yang menjadi penting dikemukakan adalah soal keterhubungan antara Islam, *kemanusiaan*, dan *keindonesiaan*. Penerimaan akan korelasi-intim ketiganya akan membuka jalan menuju ke arah Islam yang harus dikembangkan di Indonesia.[271] Pengembangan model-ideal atas ketiga hal itu akan memberikan solusi tepat pada masalah-masalah yang menimpa bangsa dan negara ini.

Untuk merumuskan pola hubungan yang ideal tersebut, Ahmad Syafii menyodorkan asumsi-asumsi proposisional bahwa *pertama*, Islam Indonesia harus dilandaskan pada model Islam yang damai, karena menurutnya demikianlah awal Islam masuk dan menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Cara damai ini menurut Ahmad Syafii seharusnya mampu memberi corak Islam yang terbuka, meneduhkan dan memberi kenyamanan kepada kelompok-kelompok agamaagama lain.

Kedua, menurut Ahmad Syafii, sejarah menunjukkan bahwa para founding father bangsa ini, yang sebagian besar adalah muslim, baik yang berjuang dalam ranah partai atau gerakan nasionalis, secara *de facto* menerima sistem politik demokrasi, meski demokrasi masih banyak kelemahannya.

Selanjutnya kata Ahmad Syafii yang *ketiga*, demokrasi tidak bisa dilepaskan dari penerimaan pluralitas dan adanya toleransi. Dalam konteks ini, masalah pencarian dasar negara menjadi polemik yang berkepanjangan antara Pancasila atau Islam. Dan Muhammadiyah dan NU telah menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, serta meninggalkan Piagam Jakarta dan menolak *Khilafah Islamiyah*.[272]

Dan yang terakhir, Ahmad Syafii menjelaskan bahwa masa depan agama terletak di dalam upaya ijtihad. Menurutnya peran pendidikan menjadi penting, bukan

[270] Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, h. 22-82.
[271] Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, h. 15.
[272] Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, h. 42.

hanya dalam tujuan pragmatisnya, yaitu menekankan perolehan pengetahuan dan mempersiapkan untuk mendapatkan kesempatan kerja demi meningkatkan kesejahteraan. Islam ingin memerangi kebodohan dan kemiskinan sebagian besar umatnya. Tekanan lain adalah pendidikan diarahkan untuk membantu mengembangkan kemampuan penalaran agar sanggup mempertanggungjawabkan pernyataan, keyakinan dan tindakannya.

Menurut Ahmad Syafii, meneropong hubungan Nusantara dan Islam bagaikan puisi, bersifat historis. Pergumulan Islam di Nusantara kata Ahmad Syafii, memakan waktu panjang dengan stamina perjuangan yang luar biasa hingga kemenangan kuantitatif berhasil dikukuhkan.

Di dunia kuno, kata Ahmad Syafii, hubungan dagang antara kawasan Asia Barat Daya dan Nusantara sudah berlangsung, jauh sebelum Islam muncul ke permukaan sejarah. Kedatangan Islam justru semakin menggairahkan kegiatan perdagangan, karena itu adalah sesuatu yang halal. Kemudian dalam perjalanan waktu, kata Ahmad Syafii, di kawasan khatulistiwa pada dasawarsa ketiga abad ke-20 telah muncul ke peta dunia sebuah bangsa dari kumpulan etnisitas dan sub-kultur yang beragam dan plural, tetapi sebagian besar rakyatnya adalah pemeluk Islam. Tidak diragukan lagi bahwa Islam kemudian merupakan salah satu komponen penting dari nasionalisme bangsa, di samping bahasa dan pengalaman sejarah. Bangsa baru inilah kata Safii, yang mempunyai modal dan akar sejarah yang jauh menembus masa silam berupa kerajaan-kerajaan, berbagai agama, kultur yang beragam, dan bahasa yang ratusan jumlahnya. Di samping Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk, agama-agama lain juga hidup subur karena besarnya toleransi masyarakat dalam menghargai perbedaan.[273]

Menurut Ahmad Syafii, setidak-tidaknya secara kuantitatif, Indonesia dikenal sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia. Sampai saat ini, kata dia, belum ada jawaban tuntas mengapa Islam telah "memenangkan" pertarungan teologis dan komersial pada abad-abad yang lalu di suatu kawasan sosio-kultural yang serbakompleks tersebut. Kemenangan ini hanya bisa disejajarkan dengan

[273] Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, h. 56.

kemenangan bahasa Indonesia yang berasal dari sub-kultur Melayu minoritas di Kepulauan Riau yang jauh berakar di masa silam, zaman Sriwijaya awal yang beragama Budha. Di tangan Islam, bahasa Melayu menjadi semakin berkembang secara dinamis sesuai dengan sifat egalitariannya agama ini.

Hal ini, kata Ahmad Syafii, dapat dibandingkan dengan kemenangan Islam dan bahasa Arab di bekas jajahan Romawi di Asia Barat Daya dan Afrika Utara (negeri Santo Agustinus, 354-430, dan Ibn Khaldun, 1332-1406), diawali pada abad ke-7, tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 Miladiah atau tahun ke-23 kenabian. Para khalifah dan penguasa yang menggantikan Nabi sebagai sebagai pemimpin umat sangat bertanggung jawab untuk proses Islamisasi dan Arabisasi besar-besaran.

Elan vital (antusiasme dan energi hidup) yang tinggi untuk meluaskan pengaruh Islam dan bahasa Arab ke berbagai penjuru dunia kata Ahmad Syafii merupakan modal utama dan stamina spiritual bagi generasi Muslim pada abad-abad awal itu.[274]

Ahmad Syafii menyebut, bahwa proses itu tidak selalu mulus dan damai, kekuatan militer tidak jarang terlibat dan berperan di dalamnya. Bukan untuk memaksa orang memeluk Islam, melainkan dalam rangka ekspansi politik kekuasaan yang dilakukan oleh Arab Muslim. Dalam kenyataannya, agama tidak selalu berdaya mengawal perilaku penyimpangan kekuasaan yang dipraktikkan oleh penguasapenguasa Muslim dalam berbagai rentetan sejarah. Oleh sebab itu, tidak perlu melihat masa lampau tanpa sikap kritis dengan cara "menganggapnya suci", seolah-olah masa lampau itu telah berjalan tanpa cacat, semata-mata karena benaung di bawah label Islam, misalnya; Maka, menurut Ahmad Syafii, kejujuran terhadap masa lampau terletak pada sikap kritis dalam memandangnya, siapa pun yang menjadi aktor-aktor sejarah pada masa itu.

Namun kendati demikian, Ahmad Syafii berpendapat bahwa peta utuh dan sempurna dalam melihat masa lampau tidak mungkin dihadirkan oleh penulisan sejarah mana pun sepanjang abad, pada semua unit peradaban. Bahkan tidak oleh

[274] Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, h. 36

sejarawan besar sekalipun. Menurutnya, sejarah yang baik selalu menuntut kejujuran penulisnya, sesuatu yang tidak mudah karena manusia itu bersifat nisbi dan sarat dengan kepentingan. Yang selalu diminta oleh Ahmad Syafii adalah agar orang jangan menulis sejarah tanpa fakta, betapapun fakta itu dapat merugikan dirinya atau segolongan manusia yang dikaguminya. Menulis sejarah selalu menuntut integritas pribadi sejarawan secara prima. Tanpa integritas, karya sejarah yang dihasilkan pasti mengandung cacat akademik. Karya yang cacat pasti akan menuai kritik dari para pembaca yang ingin meneropong masa lampau melalui lensa yang bersih, tetapi alangkah sukarnya.

Faktor tersebutlah yang tidak terjadi di Intelektual Muslim, menurutnya sebagian sejarawan dan penulis Muslim enggan menyebut fakta miring karena berbagai pertimbangan, seakan-akan perluasan kekuasaan Islam itu selamanya ditempuh dengan jalan damai. Seperti Al-Faruqi yang menggunakan istilah futuhat (bentuk tunggalnya fathah) yang berarti pembukaan, yaitu “membuka hati dan pikiran [manusia] terhadap kebenaran Islam”.18 Padahal kata Ahmad Syafii, hal tersebut untuk penaklukan di masa Nabi dan al-khulafa al-rasyidin (610-661) sampai batasbatas yang jauh konsep “pembukaan” dapat digunakan, khususnya di era Nabi, di mana kekuasaan dan kekayaan duniawi itu sama sekali bukan merupakan bagian dari misinya. Adapun pengepungan terhadap puak Yahudi Bani Quraizha yang berkhianat pasca-Perang *Khandaq*, Ibn Al-Atsir menurunkan informasi bahwa: “Rasulullah memerintahkan untuk membunuh orang dewasa Bani Quraizha dan membiarkan hidup perempuan dan anak-anak".[275]

Dalam pergumulan peradaban di Nusantara, dibandingkan dengan pengguna bahasa Arab, pemakai bahasa Melayu mungkin lebih besar dengan berbagai variasinya, atau setidak-tidaknya seimbang. Menurut Ahmad Syafii, di Indonesia dikukuhkan secara resmi sebagai bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, di dalamnya peran Muhammad Yamin tokoh Jong Sumatranen Bond sangat besar, di Malaysia disebut bahasa Malaysia, tetapi akarnya sama: bahasa Melayu yang berasal dari Kepulauan Riau. Bahasa adalah di antara sumbangan Riau

[275] Ibn Al-Atsir, *Al-Kamil fi Al-Tarikh,* Al-Maktabah Al-Syamilah, juz 1, h. 306

yang terbesar untuk kebudayaan Nusantara. Bahkan tidak hanya penduduk bekas jajahan Belanda di Nusantara yang memakai bahasa Indonesia secara resmi, rakyat Timor Timur pun fasih berbahasa Indonesia.

Kemenangan bahasa Indonesia kata Ahmad Syafii, semestinya menjadi modal utama dalam upaya mengukuhkan apa yang disebut jati diri bangsa. Dengan kata lain, secara kultural Indonesia tidak akan mengalami banyak rintangan untuk berkomunikasi antar suku bangsa. Pemerintah Hindia Belanda pada kisaran abad yang lalu telah memilih bahasa Melayu sebagai "bahasa administrasi kekuasaannya untuk mengoptimalkan eflsiensi eksploitasi kolonialnya".[276] Namun apa pun alasannya, penggunaan bahasa Melayu secara resmi dengan demikian menjadi semakin meluas, menjangkau suku-suku bangsa yang tersuruk di pulau-pulau kecil sekalipun. Sebagai media komunikasi, bahasa Indonesia sungguh strategis posisinya.

Demikianlah kata Ahmad Syafii pentingnya peran Muhammad Yamin dalam upaya menguatkan posisi bahasa Indonesia untuk diterima sebagai bahasa persatuan, sampai-sampai seorang pejabat Belanda P.M. Hooykaas berkomentar bahwa "pemuda dari Sumatera itu (Yamin) akan menjadi seorang pelopor dari usaha pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di Indonesia, dan bahasa Belanda akan terdesak karenanya".[277] Yamin tampaknya akan lebih berwibawa dikenang sebagai seorang ahli dan pemikir bahasa dan kebudayaan tinimbang seorang politikus yang sarat kontroversi.

Memang kata Ahmad Syafii, untuk proses demokratisasi, bahasa Jawa akan banyak sekali menemui kendala, karena strukturnya memang berlatar belakang feodalisme kuno yang berlapis-lapis. Struktur bahasa Jawa memang tidak mengenal demokrasi, karena proses kelahirannya puluhan abad yang lalu sarat dengan sekat-sekat sosial yang kental.

Justru kata Ahmad Syafii, dalam hal ini Ki Hadjar lebih tegas lagi dalam pembelaannya terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan: "... demi persatuan bangsa Indonesia hanya bahasa Indonesialah yang berhak menjadi bahasa

[276] Ajip Rosidi, *Bahasa Indonesia Bahasa Kita*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2001, h. 10
[277] Restu Gunawan, *Muhammad Yamin dan CIta-Cita Persatuan*. Yogyakarta: Ombak, 2005, h. 22

persatuan".[278] Ki Hadjar sebagai seorang tokoh sentral dalam kultur Jawa, tetapi membela posisi bahasa Indonesia haruslah dicatat sebagai salah satu dari sekian banyak sumbangannya kepada kultur perekat bangsa ini. Ki Hadjar sangat sadar tentang keIndonesiaan dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa egalitarian yang menjadi salah satu pilar penting bagi tegaknya sistem demokrasi di negeri ini.

Menurut Ahmad Syafii, dipilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional amat mendukung budaya untuk saling menyapa secara lancar dan efektif antarberbagai sub-kultur yang kaya sambil menyumbangkan kosakata baru kepada bahasa persatuan itu. Bahasa Indonesia adalah bahasa egalitarian. Sekiranya bangsa Indonesia berhasil menemukan corak kepemimpinan nasional yang benar-benar menghayati kekayaan kultural ini dan fasih berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, ada harapan bahwa Indonesia sebagai bangsa dan negara akan bertahan lama. Gesekan antar-suku bangsa akan dapat diselesaikan dengan berpedoman kepada kearifan lokal di bawah payung kearifan nasional, sesuatu yang masih perlu diperjuangkan.

Dalam perjalanan sejarah Nusantara, pada era Sriwijaya, Mataram kuno, Majapahit, atau pada masa modern, menurut Ahmad Syafii kearifan lokal ini kurang sekali diapresiasi, khususnya jika politik kekuasaan yang dikembangkan dengan nafsu sentralistik. Daerah daerah yang terletak jauh dari pusat pada umumnya dianaktirikan, kewajiban mereka adalah tunduk dan membayar upeti kepada pusat kekuasaan. Inilah yang menjadi salah satu sumber keresahan yang berpuncak dalam format pemberontakan-pemberontakan daerah pada era Indonesia modern. Perpaduan antara anak suku bangsa yang heterogen itu belum berjalan tuntas. Hampir semua provinsi yang dikembangkan di Indonesia sejak masa penjajahan berlanjut sampai era kemerdekaan pada mulanya berdasarkan teritori etnis dengan sub-kulturnya.

Ahmad Syafii menjelaskan bahwa perkawinan dan migrasi antar-suku memang sudah berlangsung, tetapi belum menjadi gelombang besar. Oleh sebab itu, upaya untuk terus menguatkan dan mempercepat proses integrasi nasional tidak boleh

[278] Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, h. 114

dianggap enteng. Bangsa ini masih dalam proses kreatif menjadi Indonesia yang utuh dan padu. Dikotomi Jawa-Luar Jawa masih juga belum hilang di era kemerdekaan, sebuah warisan sejarah masa silam yang tidak cepat digugat.[279]

[279] Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, h. 125

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Ahmad Syafi'i Ma'arif merupakan seorang figur yang dikenal luas oleh dunia, baik di kalangan Muslim maupun non muslim. Figurnya sebagai seorang akademisi telah mengantarkannya sebagai Bapak bangsa yang senantiasa mengusung gagasan-gagasan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif yang moderat, pluralis, serta kritis senantiasa mewacanakan ide humanisme dan universalisme Islam. Ahmad Syafi'i Ma'arif senantiasa mengusung ide-idenya melalui berbagai tulisan-tulisan maupun dalam berbagai forum nasional maupun internasional. Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif yang inklusif dan egaliter membuat ia dikenal baik oleh semua orang, tak terkecuali orang-orang lintas iman yang memang menjadi sasaran utama sang Buya dalam menampilkan Islam yang rahmatan lil'alamin tersebut. Universalisme Islam Ahmad Syafi'i Ma'arif menginginkan adanya kesamaan hak bagi seluruh manusia di muka bumi ini.

Syafi'i Ma'arif mendukung sepenuhnya prinsip kebebasan beragama. Ia senantiasa menghargai setiap perbedaan-perbedaan tersebut meskipun berbeda dengan keyakinannya. Keimananan Syafi'i Ma'arif tak tergoyahkan meskipun ia bergelut dengan agama-agama dan keyakinan yang berbeda dengannya. Syafi'i Ma'arif membuka luas-luas hak-hak individu dalam menentukan keyakinannya sendiri. Dengan demikian, pada satu sisi Syafi'i Ma'arif mendapatkan dasar teologis dan pada sisi yang lain mendapatkan penghargaannya terhadap kebebasan beragama berdasarkan konstitusi yang berlaku.

Kebebasan beragama menurut Ahmad Syafii Maarif adalah sikap bebas atau memberi kebebasan bagi semua orang untuk memilih, meyakini, maupun memeluk agamanya masing-masing. Kebebasan beragama merupakan kehendak Allah untuk semua manusia apakah memilih untuk beriman atau tetap dalam kekufuran. Karena pada hakikatnya antara jalan yang terang dengan yang gelap sudah terlihat terang.

Konsep kebebasan beragama dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif tetap meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Prinsip ini sebagai bentuk keimanan manusia, yang meyakini bahwa keberadaan Allah memang mewujud. Namun di luar itu, Islam memberikan menghormatan kepada keyakinan maupun agama lain. Islam meskipun mengajak umat di luar Islam untuk memeluk agama Islam, akan tetapi memberikan ruang yang luas bagi pemeluk agama-agama selain Islam untuk diyakini/dianut oleh pemeluk agama yang lain.

Dalam merumuskan solusi atas problem kebebasan beragama di Indonesia, Syafii Maarif berpikir bahwa masih diperlukan adanya penelaahan kembali Pancasila sebagai jaminan pertama atas kebebasan beragama di Indonesia. Pandangan ini sekaligus menegaskan bahwa kebebasan beragama dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif bukanlah seperti pandangan kelompok ekstrim kanan, yang meyakini bahwa kebebasan beragama berarti yakin akan kebenaran-kebenaran agama selain agama Islam. Selain itu, bukan juga seperti cara pandang ekstim kiri, yang meyakini bahwa kebebasan beragama tidak ada dalam Islam. Konsepsi kedua ini meyakini bahwa beragama tidaklah bebas. Ada ketentuan-ketentuan yang membatasinya, sehingga tidak selayaknya dilakukan oleh setiap orang Islam. Kebebasan beragama dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif adalah boleh, namun tidak mutlak.

Relevansi pemikiran Ahmad Syafii Maarif terhadap kebangsaan tercermin dalam upayanya untuk mempersatukan masyarakat Indonesia melalui ide dan gagasan yang dikembangkan melalui MAARIF Institute sangat terkait dengan peran Syafii Maarif sebagai kader dan pimpinan Muhammadiyah. Yaitu sebagai organisasi Islam di Indonesia, telah dikenal sebagai gerakan modernis moderat yang aktif dalam mempromosikan pemikiran-pemikiran Islam yang inklusif, berdakwah, dan melakukan berbagai aksi sosial untuk kemajuan umat. MAARIF Institute, sebagai bagian dari Muhammadiyah, memiliki perhatian utama dalam memperjuangkan arus pembaruan pemikiran Islam dalam konteks gerakan Muhammadiyah.dentitas kebangsaan yang dijaga dan diperkaya oleh pluralitas agama menjadi fokusnya, menciptakan landasan yang kuat untuk membangun negara yang adil, harmonis, dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Syafii Maarif dikenal sebagai seorang yang kritis terhadap berbagai isu sosial, politik, dan keagamaan. Dia adalah mantan Ketua Umum Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selama kepemimpinannya, ia mendorong reformasi internal dalam organisasi dan mempromosikan gagasan-gagasan tentang pluralisme, demokrasi, dan perdamaian.
2. Demokratisasi di Indonesia sebaiknya menyertakan penegakan kebebasan beragama agar kualitas demokrasi Indonesia dapat lebih baik lagi. Sebab, demokrasi prosedural saja belum cukup untuk menjamin kehidupan yang damai dan toleran, dan penegakan kebebasan beragama merupakan salah satu usaha menjamin kehidupan damai dan toleran itu.
3. Bagi pemerintah, agar dalam mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai kehidupan keberagamaan senantiasa memperhatikan prinsip kebebasan beragama. Sedangkan bagi masyarakat, agar prinsip kebebasan beragama diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat tercipta tatanan sosial-politik yang damai dan toleran.
4. Penulis mengakui bahwa hipotesis dan kesimpulan dalam penelitian ini masih perlu dilakukan pengujian dan pendalaman kembali juga perlu untuk di kritisi karena kekurangan dan keterbatasan penulis dalam memahami pemikiran Ahmad Syafii Maarif serta literatur yang terbatas. Oleh karena itu penulis berharap adanya penelitian lanjutan terkait dengan kebebasan beragama Ahmad Syafii Maarif sebagai penyempurna dari penelitian ini.

Daftar Pustaka

Akhmadi, Agus. “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia.” *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

Alganih, Igneus. “Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001).” *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2016).

Declaration, Cebu. “Cebu Dialogue on Regional Interfaith Cooperation for Peace.” *Development and Human Dignity, Cebu, Philippines* 16 (2006).

Fuad, Ahmad. “Islam Mazhab Kritis, Menggagas Keberagaman Liberatif.” Jakarta: Buku Kompas, 2004.

Hakim, Abd, Yudi Latif, and M Dawam Rahardjo. “Bayang-Bayang Fanatisisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid.” *(No Title)*, 2007.

Huntington, Samuel P. “Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?” *Dalam Jurnal Ulumul Qur’an*, no. 5 (1996).

Maarif, A S. *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. books.google.com, 2009. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=6NXy9gvG4esC%5C&oi=fnd%5C&pg=PA7%5C&dq=%22ahmad+syafii+maarif%22%5C&ots=AYiIizmsrd%5C&sig=FBnZOFgmPbcSlQGctWKUFCcF-Jw.

———. *Membumikan Islam*. books.google.com, 2019. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=LeivDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA191%5C&dq=%22ahmad+syafii+maarif%22%5C&ots=H61WOXJlOt%5C&sig=RNz2jxzYw19_zcCaXuUuHYKNLV0.

———. *Mencari Autensitas Dalam Dinamika Zaman*. books.google.com, 2019. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=c9SuDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA55%5C&dq=%22ahmad+syafii+maarif%22%5C&ots=i8jCnYypki%5C&sig=1ZSCzXOxDw1aIGA1vTrop8UnF9U.

———. *Tuhan Menyapa Kita*. books.google.com, 2006. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=3T32DwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA87%5C&dq=%22ahmad+syafii+maarif%22%5C&ots=IC3VZjcsUp%5C&sig=TowgVTvUJFPqJGdpbjwO_2q6LDg.

Maarif, Ahmad Syafii. *Meluruskan Makna Jihad: Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*. Center for Moderate Muslim, 2005.

———. *Tuhan Menyapa Kita*. IRCISOD, 2020.

Odea, Thomas E. “Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal,” 1995.

Ridwan, Nur Khalik. *Pluralisme Borjuis: Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*. Galang Press, 2002.

Sucipto, Hery, and Nadjamuddin Ramly. *Tajdid Muhammadiyah: Dari Ahmad Dahlan Hingga A. Syafii Maarif*. Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.

Wilson, A N. *Against Religion: Why We Should Try to Live Without It*. Chatto \& Windus, 1991.

Zada, Khamami, and Islam Radikal. “Pergulatan Ormas Ormas Garis Keras Di Indonesia.” *Bandung: Mizan*, 2002.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Kampus II: Jl. Gurun Aur Kubang Putih - Kabupaten Agam - Sumatera Barat – Telepon/ Fax: (0752) 22875
Website: http://fuad.uinbukittinggi.ac.id | email: fuad@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-333/Un.26.4/PP.00.9/02/2023 Bukittinggi, 07 Februari 2023
Lamp : 1
Hal : **Penunjukan Pembimbing**

Yth. Bapak/Ibu : **Dr. H. Nunu Burhanuddin, M.Ag**
Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan judul proposal yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka dengan ini menunjuk Bapak/Ibu sebagai pembimbing

Nama	**: ILHAM SAHRUJI**
NIM	**: 40121003**
Semester	: 4
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Proposal	: ***Humanisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan : Studi Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Jalaluddin Rahmat***

Dengan susunan pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I	Dr. H. Nunu Burhanuddin, M.Ag
Pembimbing II	-

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, terima kasih.

Wasslam,
DEKAN,

Dr. Syafwan Rozi, M.Ag
NIP 197710082005011008

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-316/Un.26.4/HK.00.5/02/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING THESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI S2 AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Membaca : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi an. **Ilham Sahruji,** NIM. 40121003 tanggal 11 Februari 2024 perihal permohonan penerbitan SK Pembimbing Thesis.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Thesis Mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing.
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING THESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI S2 AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

KESATU : Menyetujui judul Thesis Mahasiswa yang bersangkutan : **"Kebebasan Beragama Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif Relevansi Terhadap Kebangsaan"**

KEDUA : Menunjuk Saudara :

Nama	**: Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc.,M.Ag**
NIP.	: 197305102000121002
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina/IV/a
Bidang Keahlian Pokok	: Pemikiran Islam
Sebagai Dosen	: PEMBIMBING

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BUKITTIINGGI
Pada tanggal : 12 Februari 2024
Dekan,

Prof. Dr. Syafwan Rozi, M. Ag
NIP 197710082005011008